



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Udnang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahu 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);

13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 39);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

7. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
8. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta Keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.
9. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori kegiatan dan Arsip Dinamis yang dihasilkan dan mengelompokkannya.
10. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah kategori kerahasiaan informasi Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.
11. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah kategori pembatasan akses terhadap Arsip berdasarkan kewenangan penggunaan Arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
12. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi Arsip berdasarkan Klasifikasi keamanannya.
13. Biasa/Terbuka adalah Klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
14. Terbatas adalah Klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
15. Rahasia adalah Klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
16. Sangat Rahasia adalah Klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamatan bangsa.
17. Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip adalah aturan pembatasan hak akses terhadap fisik dan informasinya sebagai dasar untuk menentukan keterbukaan dan kerahasiaan Arsip dalam rangka melindungi hak dan kewajiban Pencipta Arsip dan pengguna dalam pelayanan Arsip.
18. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses informasi Arsip Dinamis.
19. Tingkat Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengelompokkan Arsip dalam tingkatan tertentu berdasarkan dampak yang ditimbulkan apabila informasi yang terdapat di dalamnya diketahui oleh pihak yang tidak berhak.

20. Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan/ penyediaan Arsip bagi kepentingan pengguna Arsip yang berhak.
21. Pengguna Internal adalah orang yang menggunakan Arsip yang berasal dari lingkungan Kementerian Pertanian.
22. Pengguna Eksternal adalah orang yang menggunakan Arsip yang berasal dari luar instansi Kementerian Pertanian.
23. Pejabat Pengelola Informasi Publik adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan Publik.

Pasal 2

Maksud ditetapkan nya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dalam menyediakan layanan informasi Arsip Dinamis secara cepat, tepat, terotorisasi, dan aman.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan nya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. fisik dan informasi Arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas, dan reliabilitas Arsip dapat tetap terjaga; dan
- b. Arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai dengan aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

BAB II

KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS

Bagian Kesatu

Klasifikasi Arsip Dinamis

Pasal 4

- (1) Arsip Dinamis yang diciptakan pencipta arsip diklasifikasikan menjadi Arsip:
 - a. Biasa;
 - b. Terbatas;
 - c. Rahasia; dan
 - d. Sangat Rahasia.
- (2) Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekaman informasi yang disimpan untuk digunakan.

Bagian Kedua

Keamanan Arsip Dinamis

Pasal 5

Pengamanan fisik Arsip Dinamis maupun informasinya sesuai dengan tingkat klasifikasi dalam hal penyimpanan dan penyampaian.

Pasal 6

Penyimpanan dalam rangka penanganan fisik maupun informasi Arsip Dinamis sesuai dengan tingkat klasifikasi dapat dilakukan dengan memperhatikan media arsip.

Pasal 7

- (1) Untuk melakukan keamanan fisik Arsip Dinamis dilakukan dengan penyimpanan.
- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang simpan.
- (3) Ruang simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
 - a. pemasangan kamera pengawas (CCTV);
 - b. kunci pengamanan ruangan; dan
 - c. media simpan.

Pasal 8

- (1) Arsip Dinamis Klasifikasi Biasa di simpan pada rak besi.
- (2) Arsip Dinamis Klasifikasi Terbatas disimpan pada *filling cabinet*.
- (3) Arsip Dinamis Klasifikasi Rahasia disimpan pada almari besi.

Pasal 9

- (1) Untuk melakukan keamanan informasi Arsip Dinamis penyampaian melalui pengiriman yang dilindungi.
- (2) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan antara Arsip konvensional dan Arsip elektronik.

Pasal 10

Pengiriman Arsip konvensional dilakukan dengan cara:

- a. Arsip Biasa tidak ada persyaratan prosedur khusus;
- b. Arsip Terbatas dimasukkan dalam amplop bersegel;
- c. Arsip Rahasia dilakukan sebagai berikut:
 1. menggunakan warna kertas yang berbeda;
 2. diberi kode Rahasia;
 3. menggunakan amplop dobel;
 4. amplop segel, stempel Rahasia;
 5. konfirmasi tanda terima; dan
 6. harus dikirim melalui orang yang sudah diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian Arsip/dokumen Rahasia.
- d. Arsip Sangat Rahasia sebagai berikut:
 1. menggunakan warna kertas yang berbeda;
 2. menggunakan amplop dobel bersegel;

3. audit jejak untuk setiap titik akses (misal: tanda tangan); dan
4. harus dikirim melalui orang yang sudah diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian Arsip/dokumen Rahasia.

Pasal 11

Pengiriman Arsip elektronik dilakukan sebagai berikut:

- a. Arsip Biasa dilakukan dengan tidak ada prosedur khusus;
- b. Arsip Terbatas dilakukan apabila pesan elektronik atau email berisi data tentang informasi personal, harus menggunakan enkripsi, *email* yang dikirim dengan alamat khusus, *password*, dan lain-lain;
- c. Arsip Rahasia dilakukan sebagai berikut:
 1. harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau *email*;
 2. menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau email Rahasia; dan
 3. menggunakan persandian atau kriptografi;
- d. Arsip Sangat Rahasia dilakukan sebagai berikut:
 1. harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau *email*;
 2. menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau email Rahasia;
 3. menggunakan persandian atau kriptografi; dan
 4. harus ada pelacakan akses informasi untuk suatu pesan elektronik atau *email*.

Pasal 12

Untuk perlindungan dan pemulihan system serta melindungi data terhadap penggunaan internal atau eksternal dilakukan kegiatan *backup* secara teratur.

BAB III AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 13

- (1) Arsip Dinamis dapat dipergunakan oleh pengguna yang diberikan hak akses.
- (2) Pengguna yang diberikan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengguna yang ada di lingkungan:
 - a. insternal instansi; dan
 - b. eksternal instansi.

Pasal 14

Pengguna yang diberikan hak akses di lingkungan internal instansi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yaitu:

- a. Penentu Kebijakan mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pimpinan tingkat tertinggi Bupati mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya.
 2. Pimpinan tingkat tinggi Eselon II (satu tingkat di bawah pimpinan tingkat tertinggi) mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi dan yang satu tingkat dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin.
 3. Pimpinan tingkat menengah (satu tingkat di bawah pimpinan tingkat tinggi) Eselon III mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, dan yang satu tingkat dengan unit di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
- b. Pelaksana kebijakan Eselon IV mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas, rahasia, dan sangat rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, pimpinan tingkat menengah, dan yang satu tingkat di atas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin. Pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 15

Pengguna yang diberikan hak akses di lingkungan eksternal instansi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, yaitu:

- a. publik mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan kategori biasa/terbuka.
- b. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP).

- c. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditangani dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.

Pasal 16

Tabel Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 27 Desember 2019
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019 NOMOR 53

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2019

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
1	URUSAN PERTANIAN				
1	KEBIJAKAN Kebijakan di bidang Hortikultura, Sarana Prasarana Pertanian, Tanaman Pangan, Pemasaran Hasil Pertanian	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
2	PEMBINAAN a Data pengadaan, penyaluran, penggunaan dan peredaran (benih, pupuk, pestisida dan alat mesin) b Penyiapan fasilitas pengembangan (lahan, pemanfaatan sumber - sumber air, produksi pertanian) c Pemeliharaan lahan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
3	PENGEMBANGAN LAHAN DAN PRODUKSI a. Data potensi sumber daya lahan dan air b. Data perkembangan pengembangan lahan dan produksi pertanian c. Sumber daya lahan dan tata guna air d. Konservasi dan rehabilitasi lahan e. Sistem kewaspadaan pangan dan gizi f. Data kawasan dan sentra - sentra produksi pertanian g. Luas panen, Produksi dan Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura h. Laporan hasil kegiatan pengembangan	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
4	PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PERTANIAN 1) Bina usaha pertanian a. Pengembangan usaha pertanian b. Data pengembangan usaha c. Bahan dan sarana d. Promosi dan pengembangan usaha e. Laporan pengembangan usaha 2) Kemitraan dan kewirausahaan pertanian a. Data kemitraan dan kewirausahaan b. Laporan kemitraan dan kewirausahaan 3) Mutu, distribusi dan pemasaran hasil pertanian a. Data kinerja benih/bibit dan mutu hasil pertanian b. Akreditasi mutu benih/bibit c. Bahan pembinaan uji mutu d. Sertifikat benih/bibit, mutu hasil pertanian e. Data penawaran dan permintaan hasil pertanian f. Laporan mutu distribusi dan pemasaran	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
5	PEMBENIHAN DAN PENGEMBANGAN 1) Data pengadaan, penyaluran, penggunaan dan peredaran benih dan teknologi 2) Sistem perbenihan tanaman pangan dan hortikultura 3) Pengembangan teknologi pertanian (produksi, sarana dan prasarana, pengolahan hasil pertanian, alat dan mesin, perbenihan)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
6	PROGRAM BIMAS/LINMAS (Program intensifikasi dan ekstensifikasi) Serangan penyakit dan hama tanaman 1) Pencegahan 2) Pemberantasan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
7	BIMBINGAN DAN PENYULUHAN TERHADAP PENGUSAHA DAN PETANI	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.	Dinas Pertanian

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi dan Analisis Lahan- Rekomendasi Teknis pengendalian lahan (c) Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan				
	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi dan Analisis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan.- Bimbingan Teknis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan. (d) Perluasan Kawasan Tanaman Pangan <ul style="list-style-type: none">- Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan tanaman pangan.- Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan tanaman pangan. (e) Perluasan Kawasan Hortikultura <ul style="list-style-type: none">- Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan hortikultura- Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan hortikultura. (2) Pengelolaan Air Irigasi <ul style="list-style-type: none">(a) Pengembangan Sumber Air<ul style="list-style-type: none">- Air Permukaan- Air Tanah(b) Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air<ul style="list-style-type: none">- Pengembangan Jaringan- Optimasi Air(c) Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup<ul style="list-style-type: none">- Iklim- Konservasi Air dan Lingkungan Hidup(d) Kelembagaan<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi Kelembagaan- Pengembangan Kelembagaan (3) Pembiayaan Pertanian <ul style="list-style-type: none">(a) Pembiayaan Program<ul style="list-style-type: none">- Data dan Informasi pembiayaan program- Pendampingan dan Bimbingan Teknis pembiayaan program(b) Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama<ul style="list-style-type: none">- Pembiayaan Syariah	Biasa/Terbuka		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
		Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	- Kerja Sama pembiayaan				
	(c) Pembiayaan Agribisnis				
	- Materi dan Verifikasi pembiayaan agribisnis				
	- Fasilitasi dan Pemantauan pembiayaan agribisnis				
	(d) Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis				
	- Kelembagaan Agribisnis				
	- Pemberdayaan Agribisnis				
	(4) Pupuk Pestisida				
	(a) Pupuk Organik dan Pembenah Tanah				
	- Tanaman Pangan				
	- Hortikultura				
	(b) Pupuk Anorganik				
	- Tanaman Pangan				
	- Hortikultura				
	(c) Pestisida				
	- Pestisida Kimia				
	- Pestisida Hayati				
	(d) Pengawasan Pupuk dan Pestisida				
	- Pengawasan Pupuk				
	- Pengawasan Pestisida				
	(5) Alat dan Mesin Pertanian				
	(a) Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian				
	- Tanaman Pangan dan Hortikultura				
	(b) Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian				
	- Tanaman Pangan dan Hortikultura				
	(c) Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian				
	- Kelembagaan				
	- Pelayanan				
11	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN				
	(1) Pengolahan Hasil Pertanian				
	(a) Tanaman Pangan				
	- Sereal				
	- Aneka Kacang dan Aneka Umbi				
	(b) Hortikultura				
	- Tanaman Buah dan Sayuran				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	- Tanaman Florakultura dan Tanaman Obat				
	(2) Mutu dan Standarasi (a) Standardisasi <ul style="list-style-type: none">- Tanaman Pangan dan Hortikultura- Perkebunan dan Peternakan (b) Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu <ul style="list-style-type: none">- Tanaman Pangan dan Hortikultura- Perkebunan dan Peternakan (c) Akreditasi dan Kelembagaan <ul style="list-style-type: none">- Tanaman Pangan dan Hortikultura- Perkebunan dan Peternakan (d) Kerjasama dan Harmonisasi <ul style="list-style-type: none">- Tanaman Pangan dan Hortikultura- Perkebunan dan Peternakan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	(3) Pengembangan Usaha dan Investasi (a) Kemitraan dan Kewirausahaan <ul style="list-style-type: none">- Kemitraan- Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif (b) Investasi <ul style="list-style-type: none">- Tanaman Pangan dan Hortikultura- Perkebunan dan Peternakan (c) Promosi Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none">- Daya Saing- Eksibisi dan Ekspo (d) Promosi Luar Negeri <ul style="list-style-type: none">- Daya Saing- Eksibisi dan Ekspo	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	(4) Pemasaran Domestik (a) Informasi Pasar <ul style="list-style-type: none">- Analisis Pasar- Deseminasi Informasi Pasar (b) Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none">- Pemantauan Pasar- Stabilisasi Harga (c) Sarana dan Kelembagaan Pasar <ul style="list-style-type: none">- Sarana Pasar- Kelembagaan Pasar				
12	(d) Jaringan Pemasaran <ul style="list-style-type: none">- Akses Pasar- Sarana Pemasaran <p>PERKEBUNAN</p> <p>A Tanaman Semusim</p> <p>1) Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya</p> <p>a. Identifikasi Sumber Daya Tanaman Semusim</p> <p>b. Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim</p> <p>2) Perbenihan</p> <p>a. Penyiapan Perbenihan Tanaman Semusim</p> <p>b. Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Semusim</p> <p>3) Budidaya</p> <p>a. Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim</p> <p>b. Penerapan Teknologi Budidaya Tenaman Semusim</p> <p>4) Pemberdayaan dan Kelembagaan</p> <p>a. Pemberdayaan Tanaman Semusim</p> <p>b. Kelembagaan Tanaman Semusim</p> <p>B Tanaman Rempah & Penyegar</p> <p>1) Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya</p> <p>a. Identifikasi Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar</p> <p>b. Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar</p> <p>2) Perbenihan</p> <p>a. Penyiapan Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar</p> <p>b. Bimbingan Peredaran Tanaman Rempah & Penyegar</p> <p>3) Budidaya</p>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none">a. Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah & Penyegarb. Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar <p>4) Pemberdayaan dan Kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pemberdayaan Tanaman Rempah & Penyegarb. Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar				
	<p>C Tanaman Tahunan</p> <ul style="list-style-type: none">1) Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya<ul style="list-style-type: none">a. Identifikasi Sumber Daya Tanaman Tahunanb. Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Tahunan2) Perbenihan<ul style="list-style-type: none">a. Penyiapan Perbenihan Tanaman Tahunanb. Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Tahunan3) Budidaya<ul style="list-style-type: none">a. Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunanb. Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan4) Pemberdayaan dan Kelembagaan<ul style="list-style-type: none">a. Pemberdayaan Tanaman Tahunanb. Kelembagaan Tanaman Tahunan <p>D Perlindungan Perkebunan</p> <ul style="list-style-type: none">1) Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim<ul style="list-style-type: none">a. Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusimb. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim2) Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar<ul style="list-style-type: none">a. Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegarb. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar3) Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan<ul style="list-style-type: none">a. Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Prov. Kalsel	Dinas Pertanian
		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	<div>Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan</div> <div>b. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan</div> <div>4) Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran</div> <div>a. Dampak Perubahan Iklim</div> <div>b. Pencegahan Kebakaran</div>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	<div>Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemprov. Kalsel</div>	Dinas Pertanian
13	E Pembinaan Usaha	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	1) Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan				
	a. Bimbingan Usaha Perkebunan				
	b. Perkebunan Berkelanjutan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	2) Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik				
	a. Gangguan Usaha Perkebunan				
	b. Penanganan Konflik	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	3) Proses Penyelesaian Pengusutan Benih Ilegal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	4) Proses Penyelesaian Pengusutan Peredaran Pupuk dan Peredaran Pestisida	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	5) Proses Penyelesaian Sengketa Perusahaan Perkebunan Besar Negara/Swasta	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				
	A Perbibitan Ternak	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	1) Produksi Bibit Ternak Ruminansia				
	a. Produksi Bibit Ternak Ruminansia Besar				
	b. Produksi Bibit Ternak Ruminansia Kecil				
	2) Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia				
	a. Produksi Bibit Ternak Unggas				
	b. Produksi Bibit Aneka Ternak				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	3) Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak a. Penilaian Bibit Ternak b. Pelepasan Bibit Ternak 4) Mutu Bibit ternak a. Sertifikasi Bibit Ternak b. Pengawasan Mutu Bibit Ternak 5) Pengembangan Bibit Ternak a. Analisis Pengembangan Bibit Ternak b. Kelembagaan Pengembangan Bibit Ternak				
	6) Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran B Pakan Ternak 1) Bahan Pakan a. Bahan Pakan Asal Hewan b. Bahan Pakan Asal Tumbuhan 2) Pakan Hijauan a. Budidaya Pakan Hijauan b. Kawasan Penggembalaan dan Integrasi Ternak 3) Pakan Olahan a. Produksi Pakan Olahan b. Pengolahan Pangan 4) Mutu Pakan a. Sertifikasi Pakan b. Pengawasan Pakan 5) Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	C Budidaya Ternak 1) Ternak Potong a. Ternak Sapi dan Kerbau Potong b. Ternak Kambing dan Domba Potong 2) Ternak Perah a. Ternak Sapi dan Kerbau Perah b. Ternak Kambing Perah 3) Ternak Unggas dan Aneka Ternak a. Ternak Unggas b. Aneka Ternak dan Monogastrik 4) Usaha dan Kelembagaan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	<div>a. Pemberdayaan masyarakat/lembaga (LM3)</div> <div>b. Sarjana Membangun Desa (SMD)</div> <div>D Kesehatan Hewan</div> <div>1) Pengamatan Penyakit Hewan</div> <div> a. Epidemiologi dan Ekonomi Veteriner</div> <div> b. Penyidikan Penyakit Hewan</div> <div>2) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan</div> <div> a. Pencegahan Penyakit Hewan</div> <div> b. Pemberantasan Penyakit Hewan</div>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	<div> c. Rekomendasi MBM</div> <div>3) Perlindungan Hewan</div> <div> a. Analisis Risiko Penyakit Eksotik</div> <div> b. Kesiagaan Darurat Penyakit Hewan</div> <div>4) Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan</div> <div> a. Kelembagaan Kesehatan Hewan</div> <div> b. Sumber Daya Kesehatan Hewan</div> <div> c. Laporan THL</div> <div> d. Proposal Poskeswan</div> <div>5) Pengawasan Obat Hewan</div> <div> a. Mutu Obat Hewan</div> <div> b. Peredaran Obat Hewan</div> <div> c. Pendaftaran Obat Hewan</div> <div> d. Rekomendasi Obat Hewan</div> <div>E Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen</div> <div>1) Pascapanen</div> <div> a. Teknologi Pascapanen</div> <div> b. Sarana Pascapanen</div> <div>2) Higien Sanitasi</div> <div> a. Penerapan Higiene Sanitasi</div> <div> b. Inspeksi Higiene Sanitasi</div> <div>3) Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan</div> <div> a. Pengawasan Sanitary</div> <div> b. Pengawasan Keamanan Produk Hewan</div> <div>4) Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan</div> <div> a. Zoonosis</div>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
14	b. Kesejahteraan Hewan 5) Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan a. Pengujian Produk Hewan; b. Registrasi dan Sertifikasi Produk Hewan 6) Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran				
	KETAHANAN PANGAN A Harga dan Cadangan Pangan 1) Data harga pangan pokok Kabupaten/Kota 2) Data pasokan di pasar dan eceran	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	3) Stok cadangan pangan B Distribusi Pangan 1) Pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM) 2) Penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (P-LDPM) 3) Akses pangan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	C Pengawasan Keamanan Pangan 1) Pengujian keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) (a) Uji laboratorium (b) Uji rapit tes kit 2) Laporan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	D Kelembagaan dan Informasi Keamanan Pangan 1) Sistem jaminan mutu OKKPD (a) Pelaku usaha (b) Uji laboratorium (c) Produsen pangan 2) Informasi keamanan pangan E Kerawanan Pangan 1) FSVA 2) SKPG 3) Database desa mandiri pangan 4) Database kawasan mandiri pangan 5) Daerah rawan pangan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
		Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian Dinas Pertanian

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
15	F Ketersediaan Pangan 1) Lumbung pangan 2) Analisis ketersediaan pangan (a) HBKN (b) PPH Ketersediaan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	G Promosi dan Penganekaragaman Pangan 1) Promosi penganekaragaman pangan (a) Pameran 2) Diversifikasi pangan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	H Konsumsi Pangan dan Pengembangan Pangan Lokal 1) Pengembangan pangan lokal (a) KRPL (b) Usaha kecil menengah (UKM) 2) Pengelolaan konsumsi pangan masyarakat (a) Lomba cipta menu (LCM) (b) Beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) (c) Pola pangan harapan (PPH) 3) Pokjanal Posyandu	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	KESEHATAN HEWAN				
	A Perbibitan Ternak 1) Produksi bibit ternak Ruminansia (a) Produksi bibit ternak Ruminansia besar (b) Produksi bibit ternak Ruminansia kecil	Terbuka	Eselon II & III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	2) Produksi bibit ternak Non Ruminansia (a) Produksi bibit ternak unggas (b) Produksi bibit aneka ternak	Terbuka	Eselon II & III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	3) Penilaian dan pelapasan bibit ternak (a) Penilaian bibit ternak (b) Penilaian bibit aneka ternak	Terbatas	Eselon II & III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	4) Mutu bibit ternak (a) Sertifikasi bibit ternak (b) Pelepasan bibit ternak 5) Pengembangan bibit ternak (a) Analisis pengembangan bibit ternak (b) Kelembagaan pengembangan bibit ternak 6) Surat rekomendasi & persetujuan pemasukan/pengeluaran	Terbatas Terbuka Terbatas	Eselon II & III Eselon II & III Eselon II & III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian
	B Pakan Ternak 1) Bahan pakan (a) Bahan pakan asal hewan (b) Bahan pakan asal tumbuhan 2) Pakan hijauan (a) Budidaya pakan hijauan (b) Kawasan penggembalaan dan integrasi ternak 3) Pakan Olahan (a) Produksi pakan olahan (b) Pengolahan pangan 4) Mutu pakan (a) Sertifikasi pakan (b) Pengawasan pakan 5) Surat rekomendasi & persetujuan pemasukan/pengeluaran C Budidaya Ternak 1) Ternak potong (a) Ternak sapi dan kerbau potong	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(b) Ternak kambing dan domba potong			pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	
	2) Ternak perah (a) Ternak sapi dan kerbau perah (b) Ternak kambing perah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	3) Ternak unggas dan aneka ternak (a) Ternak unggas (b) Aneka ternak dan monogastrik	Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	4) Usaha dan kelembagaan (a) Pemberdayaan masyarakat/lembaga (LM3) (b) Sarjana membangun desa (c) <u>Dokumen penyaluran kredit pengembangan usaha tani</u> (d) Dokumen bantuan pengembangan usaha	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	D Kesehatan Hewan				
	1) Pengamatan penyakit hewan (a) Epidemiologi dan ekonomi veteriner (b) Penyidikan penyakit hewan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	2) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan (a) Pencegahan penyakit hewan (b) Pemberantasan penyakit hewan (c) Rekomendasi MBM	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	3) Perlindungan Hewan (a) Analisis risiko penyakit eksotik (b) Kesiagaan darurat penyakit hewan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Pertanian
	4) Kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan (a) kelembagaan kesehatan hewan (b) Sumber daya kesehatan hewan (c) Laporan THL (d) Proposal Poskeswan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	
	5) Pengawasan obat hewan (a) Mutu obat hewan (b) Peredaran obat hewan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(c) Pendaftaran obat hewan (d) Rekomendasi obat hewan E Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen 1) Pascapanen (a) Teknologi pascapanen (b) Sarana pascapanen 2) Higien Sanitasi (a) Penerapan higiene sanitasi (b) Inspeksi higien sanitasi 3) Pengawasan sanitary dan keamanan produk hewan (a) Pengawasan sanitary (b) Pengawasan keamanan produk hewan	 Terbuka Terbatas Terbatas	 Eselon IV Eselon III Eselon III	Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	 Dinas Pertanian
	4) Zoonosis dan kesejahteraan hewan (a) Zoonosis (b) Kesejahteraan hewan 5) Pengujian dan sertifikasi produk hewan (a) Pengujian produk hewan (b) Registrasi dan sertifikasi produk hewan 6) Surat rekomendasi dan persetujuan pemasukan/pengeluaran	Terbatas Terbatas Terbatas	Eselon III Eselon III Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	
II	URUSAN PERDAGANGAN				
1	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PERDAGANGAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perdagangan
2	PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perdagangan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
3	PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perdagangan
4	PELELANGAN BARANG KOMODITAS	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perdagangan
5	PROMOSI / PEMASARAN (A) Pameran Perdagangan (B) Iklan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perdagangan
6	EKSPOR DAN IMPORT	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perdagangan
7	PENGAWASAN DISTRIBUSI/PENYALURAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perdagangan
8	PERDAGANGAN ANTAR PULAU	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perdagangan
9	SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) BARANG	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perdagangan
10	PENERBITAN ANGKA PENGENAL IMPOR (API)	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perdagangan
11	DOKUMEN LAINNYA DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perdagangan
12	PERLINDUNGAN KONSUMEN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perdagangan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
13	PENGUNAAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN PERGUDANGAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perdagangan
14	ANEKA USAHA PERDAGANGAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perdagangan
15	BIMBINGAN DAN PENYULUHAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perdagangan
16	STANDARISASI HARGA	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perdagangan
III	URUSAN PERHUBUNGAN				
1	KEBIJAKAN MENGENAI PERHUBUNGAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISHUB
2	LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA A. Jaringan prasarana dan pelayanan: 1) Penentuan dan penetapan lokasi terminal 2) Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal 3) Pemanfaatan terminal 4) Jaringan trayek angkutan, jaringan lintas jalan primer, dan jaringan 5) Penetapan kelas jalan primer 6) Kualifikasi teknis petugas terminal B. Pengembangan transportasi jalan 1) Peta jalan raya 2) Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan 3) Pengembangan transportasi jalan C. Sarana angkutan jalan 1) Pengujian kendaraan bermotor 2) Teknologi kendaraan bermotor (pengujian, persyaratan teknis dan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISHUB

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
3	<p>D. Lalu lintas jalan</p> <p>1) Manajemen dan rekayasa lalu lintas</p> <p>2) Perlengkapan jalan</p> <p>E. Angkutan jalan</p> <p>1) Angkutan penumpang</p> <p>2) Angkutan barang</p> <p>F. Pengendalian operasional</p> <p>1) Monitoring operasional</p> <p>2) Teknis penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan</p> <p>LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN</p> <p>A. Jaringan transportasi (analisa, evaluasi, trayek dan pengembangan)</p> <p>B. Sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan</p> <p>C. Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan</p>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISHUB
4	<p>D. Peta aliran sungai, peta wilayah danau, tata cara, dan pengawasan lalu</p> <p>PERKERETAAPIAN</p> <p>A. Peta pintu lintasan kereta api</p> <p>B. Pemanfaatn stasiun</p> <p>C. Penggunaan signal</p>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISHUB
5	<p>PERHUBUNGAN LAUT</p> <p>A. Keamanan lalu lintas (penjagaan, rambu-rambu dan mercusuar)</p> <p>B. Kegiatan pelayaran (dalam dan luar negeri)</p> <p>C. Data kapal dan trayek perkapalan</p>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISHUB

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
6	D. Penggunaan pelabuhan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISHUB
	E. Kegiatan pengerukan laut yang mendangkal				
	F. Kegiatan penjagaan pantai				
	PERHUBUNGAN UDARA			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISHUB
	A. Kegiatan keamanan lalu lintas udara				
	B. Pemanfaatan pelabuhan udara				
	C. Sarana angkutan udara dan trayek penerbangan, terminal, jalan,				
	D. Pelaksanaan program meliputi: pembiayaan, laporan, pengawasan dan evaluasi	Terbatas	Eselon III		
7	PENYULUHAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISHUB
8	Meliputi : Program, metode, pembinaan, percontohan jadwal waktu, pembiayaan dan laporan BANTUAN DANA, PENANAMAN MODAL	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISHUB
9	STANDARISASI PERHUBUNGAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISHUB
	Meliputi : Sarana dan prasarana, data dan statistik				
10	PEMASARAN HASIL PRODUKSI				
	Meliputi: Promosi perhubungan, perlindungan, perhubungan, penentuan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.	DISHUB
11	PERIZINAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang	DISHUB

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
12	Meliputi : Izin mengemudi, izin trayek, izin jalan, izin laut, izin udara dan KEAMANAN DAN KETERTIBAN	Terbatas	Eselon III	mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan	DISHUB
13	Meliputi : Ketertiban lalu lintas, pencegahan dan penyelesaian pelanggaran, LAPORAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.	DISHUB
IV	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1	KEBIJAKAN Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Biasa/Tertulis	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perikanan
2	PENGOLAHAN RUANG LAUT				
	A Konservasi Ekosistem Laut				
	1) Data ekosistem laut dan pesisir yang dilindungi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perikanan
	2) Peta/zona konservasi ekosistem laut, pesisir dan keanekaragaman hayati	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	3) Peta kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan laut	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perikanan
	4) Kemitraan dengan masyarakat dan atau lembaga swadaya masyarakat dalam pengelolaan konservasi ekosistem laut, pesisir dan keanekaragaman hayati	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perikanan
	5) Konservasi ekosistem laut, pesisir dan keanekaragaman hayati	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perikanan
	B Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perikanan
	1) Pemetaan ruang laut dan pesisir				
	2) Data potensi sumberdaya laut dan pesisir				
	3) Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi pesisir dan pantai				
	4) Penataan ruang laut dan pesisir untuk pengembangan ekosistem				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	<p>daerah</p> <p>5) Penerbitan izin usaha pemanfaatan ruang laut dan pesisir sesuai kewenangan</p> <p>6) Monitoring dan evaluasi penataan pemanfaatan ruang laut dan pesisir</p>				
3	<p>C Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan PPK</p> <p>1) Rencana Bimtek Masyarakat Pesisir dan PPK</p> <p>2) Data pesisir dan PPK</p> <p>3) Supervisi pemberdayaan masyarakat pesisir dan PPK</p> <p>4) Monitoring dan evaluasi masyarakat pesisir dan PPK</p>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perikanan
	<p>PERIKANAN TANGKAP</p> <p>A. Kenelayanan</p> <p>1) Data kelembagaan/kelompok nelayan</p> <p>2) Bimtek pengembangan SDM nelayan secara kelembagaan/kelompok</p> <p>3) Lembaga/kelompok usaha kenelayanan</p> <p>4) Perlindungan nelayan</p>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perikanan
	<p>B Pengelolaan Sumberdaya Penangkapan</p> <p>1) Pengelolaan pemanfaatan dan menjaga kelestarian sumberdaya penangkapan</p> <p>2) Pengelolaan kawasan tangkapan yang mempunyai sumberdaya penangkapan potensial</p> <p>3) Penerbitan izin usaha perikanan penangkapan ikan diatas 5 GT sd 30 GT</p> <p>4) Pemantauan penggunaan alat tangkap</p> <p>5) Pengendalian penangkapan</p> <p>6) Monitoring dan evaluasi kelestarian sumberdaya tangkap</p>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perikanan
	<p>C Sarana dan Prasarana Penangkapan</p> <p>1) Petunjuk teknis pelaksanaan</p> <p>2) Peningkatan dan pengembangan prasarana penangkapan</p> <p>3) Rehabilitasi dan pembangunan seta pengelolaan pelabuhan perikanan</p>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perikanan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
4	4) Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana penangkapan				
	PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN				
	A Perizinan Usaha dan Investasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perikanan
	1) Pengelolaan perizinan usaha				
	2) Data potensi perikanan				
	3) Pemeriksaan permohonan izin usaha				
	4) Penerbitan izin usaha				
	B Teknologi dan Informasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perikanan
	1) Petunjuk teknis teknologi dan informasi				
	2) Data pelaku usaha				
	3) Bimbingan teknologi dan informasi				
	4) Evaluasi pengembangan teknologi dan informasi				
	C Sarana dan Prasarana Budidaya Pengolahan dan Pemasaran	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Perikanan
	1) Petunjuk teknis sarana dan prasarana budidaya pengolahan				
	2) Data sarana prasarana budidaya pengolahan dan pemasaran perikanan				
	3) Pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana budidaya pengolahan pemasaran perikanan				
	4) Memfasilitasi pembangunan				
	5) Penerbitan izin usaha				
	6) Pemantauan pengembangan pembangunan sarana dan prasarana budidaya				
	7) Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
5	<p>PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <p>A Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Keluar dan Perikanan</p> <p>1) Rencana pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan</p> <p>2) Bimtek pemantauan sumber daya kelauran dan perikanan</p> <p>3) Jadwal pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</p> <p>4) Rencana operasi pengawasan penangkapan ikan</p> <p>5) Pemantauan kelompok masyarakat pengawasan sumber daya kelautan</p> <p>6) Monitoring dan evaluasi pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</p> <p>B Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum</p> <p>1) Rencana penanganan pelanggaran dan penegakan hukum</p> <p>2) Data pelanggaran dan komflik masyarakat kelautan dan perikanan</p> <p>3) Bimtek pelanggaran kelautan dan perikanan</p> <p>4) Pemantauan penanganan dan pelanggaran dan penegakan hukum</p> <p>5) Monitoring dan evaluasi penanganan dan pelanggaran dan penegakan hukum</p>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p>	<p>Dinas Perikanan</p> <p>Dinas Perikanan</p>
	<p>C Sarana dan Prasarana pengawasan</p> <p>1) Rencana sarana dan prasarana pengawasan</p> <p>2) Data sarana dan prasarana pengawasan</p> <p>3) Sosialisasi dan Bimtek sarana dan prasarana pengawasan</p> <p>4) Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan</p> <p>5) Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan</p> <p>6) Fasilitasi sarana dan prasarana pengawasan</p> <p>7) Pemantauan pemanfaatan sarana dan prasarana pengawasan</p> <p>8) Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana pengawasan</p>	<p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon IV</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p>	<p>Dinas Perikanan</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
V	URUSAN PENANAMAN MODAL				
1	KEBIJAKAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DPMPTSP
2	PERENCANAAN PENANAMAN MODAL				
	A Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DPMPTSP
	1) Agribisnis				
	a) Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan				
	b) Kelautan, Perikanan dan Peternakan				
	2) Energi				
	a) Energi Terbarukan				
	b) Energi Tak Terbarukan				
	3) Daya Mineral				
	a) Mineral Logam				
	b) Mineral Non Logam				
	B Perencanaan Industri Manufaktur	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DPMPTSP
	1) Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka				
	a) Industri Logam dan Mesin				
	b) Industri Tekstil dan Aneka				
	2) Industri Kimia				
	a) Industri Kimia Dasar				
	b) Industri Barang Kimia dan Farmasi				
	3) Industri Alat Transportasi dan Telematika				
	a) Industri Alat Transportasi dan Telematika				
	b) Industri Telematika				
	C Jasa dan Kawasan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DPMPTSP
	1) Jasa Perdagangan dan Pariwisata				
	a) Jasa Perdagangan				
	b) Jasa Pariwisata				
	2) Ketenagakerjaan, dan Jasa Lainnya				
	a) Jasa Kesehatan, Pendidikan, dan Ketenagakerjaan				
	b) Jasa Lainnya				
	3) Kawasan Ekonomi				
	a) Kawasan Ekonomi Khusus				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
3	b) Kawasan Ekonomi Lainnya				
	D Perencanaan Infrastruktur	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DPMPTSP
	1) Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan, dan Jembatan				
	a) Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkeretaapian				
	b) Infrastruktur Jalan dan Jembatan				
	2) Insfrastruktur Energi dan Sumber Daya Air				
	a) Infrastruktur Energi				
	b) Infrastruktur Sumber Daya Air				
	3) Infrastruktur Transportasi Laut, Udara, dan Insfrastruktur Lainnya				
	a) Infrastruktur Transportasi Laut				
	b) Infrastruktur Transportasi Udara dan Insfrastruktur Lainnya				
3	E Rencana alokasi bersubsidi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DPMPTSP
	F Rencana Alokasi Dana Talangan untuk Kabupaten	Terbatas	Eselon III		
	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
	A Deregulasi Penanaman Modal	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DPMPTSP
	1) Sektor Primer				
4	a) Pertanian, Kelautan dan Perikanan				
	b) Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan				
	2) Sektor Sekunder				
	a) Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika				
	b) Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka				
4	3) Sektor Tersier				
	a) Pariwisata, Perdagangan dan Telekomunikasi				
	b) Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Jasa Lainnya				
	PROMOSI PENANAMAN MODAL				
	A Pengembangan Promosi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DPMPTSP
	1) Analisis Strategi Promosi				
	a) Analisis Target Promosi				
	b) Analisis Daya Saing Promosi				
	2) Fasilitas Promosi Luar Negeri				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
5	B Promosi Sektoral 1) Daya Alam, Jasa dan Kawasan a) Industri Sumber Daya Alam b) Jasa dan Kawasan 2) Promosi Industri Manufaktur a) Industri Logam, Barang Logam, Mesin dan Elektronik b) Industri Manufaktur Lainnya 3) Infrastruktur a) Infrastruktur Transportasi, Jalan, dan Jembatan b) Infrastruktur Energi, Sumber Daya Air, dan Infrastruktur Lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DPMPTSP
	C Fasilitasi Promosi Daerah	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DPMPTSP
	D Pameran dan Sarana Promosi 1) Pameran a) Penyusunan Program dan Monitoring b) Penyelenggaraan dan Evaluasi 2) Media Cetak a) Materi Promosi b) Publikasi dan Distribusi 3) Media Elektronik a) Materi Promosi b) Pelayanan Informasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	KERJASAMA PENANAMAN MODAL A Kerjasama Bilateral dan Multilateral	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DPMPTSP
	B Kerjasama Regional	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DPMPTSP
	C Kerjasama Dunia Usaha Internasional	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DPMPTSP
	D Kerjasama BUMD 1) Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMD 2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMD berjalan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DPMPTSP

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
6	3) Dokumen kepengurusan BUMD yang sedang dalam proses 4) Dokumen rahasia perusahaan BUMD 5) BUMD Bidang Keuangan (Bank Kalsel dan BPR BKK) : Data nasabah PELAYANAN PENANAMAN MODAL A Pelayanan Aplikasi 1) Aplikasi Sektor Primer dan Tersier 2) Aplikasi Sektor Sekunder B Pelayanan Perizinan 1) Perizinan Sektor Primer dan Tersier a) Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana b) Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi c) Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa 2) Perizinan Sektor Sekunder a) Industri Mesin, Logam dan Barang Logam b) Industri Kimia dan Barang Kimia c) Industri Aneka	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DPMPTSP
7	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL A Pemantauan Penanaman Modal B Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal C Fasilitas Penyelesaian Masalah D Pengawasan Penanaman Modal E Pencabutan / Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DPMPTSP
		Biasa/Terbuka	Eselon IV		
		Biasa/Terbuka	Eselon IV		
		Biasa/Terbuka	Eselon IV		
		Terbatas Terbatas	Eselon III Eselon III	Memiliki dampak yang dapat	DPMPTSP
	F Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP di Bidang Penanaman	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DPMPTSP
VI	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				
1	KEBIJAKAN Kebijakan dibidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.	DLH

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
2	TATA LINGKUNGAN			Tanah Bumbu	
	A Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
	1) Invetarisasi, penerapan ekoregion dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan (a) Dokumentasi inventarisasi (b) Pedoman Inventarisasi (c) Penetapan Ekoregion (d) Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Provinsi (e) Pedoman penyusunan RPPLH Provinsi (f) Rencana pengawasan waktu/kegiatan oleh PPLHD				
	2) Evaluasi pemanfaatan sumber daya alam (a) Evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam (b) Kebijakan pemanfaatan sumber daya alam				
	B Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
	1) Evaluasi penerapan				
	2) Perencanaan lingkungan hidup				
	C Ekonomi Lingkungan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
	1) Perencanaann (a) Valuasi ekonomi (b) Internalisasi lingkungan				
	2) Insentif dan pendanaan lingkungan				
	D Dampak Lingkungan				
	1) Bimtek dampak lingkungan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
	2) Penerapan sistem kajian dampak lingkungan	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	(a) Penilaian dokumen lingkungan (b) Pemeriksaan dokumen lingkungan				
	3) Evaluasi dan tindak lanjut (a) Rencana detail hasil AMDAL	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
3	(b) Evaluasi (c) Tindak lanjut	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
	PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN A Pemantauan dan Pengawasan 1) Manufaktur, prasarana dan jasa (a) Industri kimia (b) Industri logam, elektronik dan mesin (c) Aneka industri (d) Prasarana dan jasa 2) Pertambangan, energi, minyak dan gas 3) Agro industri dan usaha skala kecil (a) Peternakan dan perikanan (b) Perkebunan (c) Kehutanan dan hortikultura (d) Usaha skala kecil 4) Udara sumber bergerak (a) Transportasi air dan udara (b) Transportasi darat (c) Transportasi kereta api dan kendaraan berat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
	B Evaluasi dan Pengembangan 1) Manufaktur, prasarana dan jasa (a) Industri kimia (b) Industri logam, elektronik dan mesin (c) Aneka industri (d) Prasarana dan jasa 2) Pertambangan, energi, minyak dan gas 3) Agro industri dan usaha skala kecil (a) Peternakan dan perikanan (b) Perkebunan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
	(c) Kehutanan dan hortikultura (d) Usaha skala kecil 4) Udara sumber bergerak (a) Transportasi air dan udara (b) Transportasi darat (c) Transportasi kereta api dan kendaraan berat				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
4	<p>PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PERUBAHAN IKLIM</p> <p>A Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan</p> <ul style="list-style-type: none">1) Pengembangan<ul style="list-style-type: none">(a) Sumber daya genetik(b) Keamanan hayati2) Pemanfaatan<ul style="list-style-type: none">(a) Sumber daya genetik3) Pengelolaan sumber daya genetik<ul style="list-style-type: none">(a) Pengembangan dan pemanfaatan(b) Pemantauan dan pengawasan4) Keamanan hayati<ul style="list-style-type: none">(a) Pengembangan dan pengelolaan(b) Pengembangan dan pengawasan5) Pengendalian kerusakan lahan<ul style="list-style-type: none">(a) Lahan budidaya(b) Lahan non budidaya <p>B Kerusakan Ekosistem Perairan Darat</p> <ul style="list-style-type: none">1) Kerusakan ekosistem<ul style="list-style-type: none">(a) Sungai(b) Kerusakan ekosistem(c) Pengelolaan kualitas air2) Danau<ul style="list-style-type: none">(a) Pengendalian kerusakan ekosistem(b) Pengelolaan kualitas air3) Rawa<ul style="list-style-type: none">(a) Rawa gambut(b) Rawa bukan gambut	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
	<p>C Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut</p> <ul style="list-style-type: none">1) Pencegahan2) Penanggulangan3) Pemulihan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
5	D Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer 1) Perangkat mitigasi 2) Inventarisasi emisi gas rumah kaca (a) Laporan inventarisasi GRK nasional (b) Data bidang inventarisasi GRK 3) Pengendalian bahan perusak ozon (a) Surat rekomendasi kepada importir terdaftar dan bahan perusak ozon (b) Hibah bantuan luar negeri terkait program perlindungan lapisan ozon 4) Pengendalian kerusakan akibat kebakaran hutan dan lahan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
	E Adaptasi Perubahan Iklim 1) Perangkat adaptasi perubahan iklim (a) Pengembangan perangkat adaptasi perubahan iklim (b) Pemantauan dan evaluasi adaptasi perubahan iklim 2) Kerentanan perubahan iklim (a) Identifikasi dan analisis kerentanan perubahan iklim (b) Media kliring kerentanan perubahan iklim	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
	PENGELOLAAN B3, LIMBAH DAN SAMPAH A Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun 1) Registrasi dan notifikasi (a) Registrasi (b) Notifikasi 2) Pemantauan (a) Sektor industri (b) Sektor non industri 3) Evaluasi dan tindak lanjut (a) Sektor industri (b) Sektor non industri	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
	B Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 1) Pengumpulan dan pemanfaatan 2) Pengangkutan dan pengolahan 3) Penimbunan dan dumping	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
6	4) Notifikasi dan rekomendasi limbah lintas batas (a) Notifikasi (b) Rekomendasi limbah lintas batas C Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3 1) Pemantauan (a) Pertambangan, energi dan minyak, gas (b) Manufaktur (c) Argoindustri (d) Prasana, jasa dan Non institusi 2) Tanggap darurat dan pemulihan kontaminasi (a) Pertambangan, energi dan minyak, gas (b) Manufaktur (c) Argoindustri (d) Prasarana, jasa dan Non Institusi D Pengelolaan Sampah 1) Pembatasan sampah 2) Daur ulang dan pemanfaatan sampah 3) Pembentukan dewan adipura 4) Penetapan pemenang adipura	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
	HUKUM LINGKUNGAN A Hukum Administrasi Lingkungan 1) Pengelolaan dan pengembangan pengaduan (a) Pengelolaan pengaduan (b) Pengembangan pengaduan 2) Penataan hukum administrasi lingkungan (a) Penerapan hukum administrasi lingkungan (b) Pengembangan hukum administrasi lingkungan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
	B Penyelesaian sengketa lingkungan 1) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (a) Administrasi Gugatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
7	(b) Gugatan 2) Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan (a) Kerugian negara dan masyarakat (b) Lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
	C Penegakan Hukum Pidana Lingkungan 1) Penyidikan perkara yang sedang ditangani oleh PPHSCH (a) Administrasi penyidikan (b) Pelaksanaan penyidikan 2) Koordinasi penuntunan, evaluasi dan tindak lanjut (a) Koordinasi penuntunan (b) Evaluasi dan tindak lanjut 3) Koordinasi pembinaan penyidik pegawai negeri sipil				
	KOMUNIKASI LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
	A Komunikasi Lingkungan 1) Pengembangan Komunikasi (a) Program komunikasi (b) Evaluasi komunikasi 2) Publikasi dan kampanye (a) Publikasi (b) Kampanye	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
	B Penguatan Inisiatif Masyarakat 1) Komunitas pendidikan lingkungan (a) Pengembangan dan bimbingan (b) Evaluasi 2) Kearifan lingkungan (a) Inventarisasi (b) Revitalisasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
	C Peningkatan Peran Masyarakat 1) Masyarakat perkotaan (a) Masyarakat kawasan permukiman (b) Masyarakat kawasan rentan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
	2) Masyarakat Pedesaan (a) Masyarakat petani				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
8	(b) Masyarakat nelayan				
	D Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan 1) Organisasi sosial dan masyarakat 2) Organisasi profesi dan dunia usaha	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
	PEMBINAAN SARANA TEKNIS LINGKUNGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS				
	A Data dan Informasi Lingkungan 1) Pengelolaan data (a) Pengumpulan dan pengelolaan data (b) Manajemen basis data 2) Pengelolaan Informasi (a) Analisis data dan penyajian informasi (b) Perpustakaan 3) Pengembangan Perangkat Lunak (a) Pengembangan instrumen layanan informasi (b) Pengembangan instrumen analisis data 4) Pengembangan Sistem dan Pemeliharaan Jaringan (a) Pengembangan sistem jaringan (b) Pemeliharaan jaringan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
	B Kelembagaan Lingkungan 1) Kelembagaan dan tata laksana (a) Pengembangan kelembagaan (b) Tata laksana 2) Fasilitatif standar pelayanan minimal (a) Fasilitasi standar pelayanan minimal daerah Provinsi (b) Fasilitasi standar pelayanan minimal daerah Kabupaten/Kota	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
	C Standarisasi dan Teknologi 1) Standarisasi manajemen dan pengujian lingkungan (a) Perangkat manajemen lingkungan (b) Pengujian lingkungan 2) Standarisasi kompetensi keahlian dan lembaga penyedia jasa lingkungan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
	(a) Kompetensi keahlian lingkungan				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(b) Kompetensi lembaga penyedia jasa lingkungan 3) Teknologi ramah lingkungan (a) Pengembangan kriteria teknologi ramah lingkungan (b) Verifikasi teknologi ramah lingkungan				
	D Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan 1) Pemantauan dan kajian kualitas lingkungan (a) Pemantauan kualitas lingkungan (b) Kajian kualitas lingkungan 2) Laboratorium rujukan dan pengujian (a) Laboratorium rujukan (b) Laboratorium pengujian dan kalibrasi 3) Hasil uji laboratorium lingkungan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DLH
VII	URUSAN PERINDUSTRIAN				
1	SARANA DAN PRASARANA Meliputi pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISDAGRI
2	PENINGKATAN PRODUKSI Meliputi bahan baku, bahan penolong, bahan penunjang dan teknologi tepat guna	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISDAGRI
3	PEMBINAAN , PENGEMBANGAN, PENYULUHAN DAN MONITORING PERINDUSTRIAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISDAGRI
4	BANTUAN a. Modal/dana rangsangan bagi kelompok industri dan kerajinan rakyat b. Peralatan industri dan kerajinan c. Konsultan/Tenaga ahli	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISDAGRI

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
5	DAFTAR INVENTARISASI MENURUT JENIS INDUSTRI Meliputi industri berat, industri sandang, industri ringan, industri logam, industri sedang, indsutri pangan, industri obat - obat dan aneka industri lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISDAGRI
6	STANDAR MUTU HASIL PRODUKSI	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISDAGRI
7	PENGAJUAN HAK MEREKA, CIPTA, PATEN, DESAIN YANG MASIH DALAM PROSES KEMENKUMHAM	Terbatas	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISDAGRI
8	PEMASARAN HASIL PRODUKSI Meliputi promosi hasil, perlindungan hasil industri, penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau dan pemasaran luar negeri	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISDAGRI
9	DATA DAN STATISTIK BIDANG PERINDUSTRIAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISDAGRI
VIII	URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA				
1	KEBIJAKAN Kebijakan penanggulangan bencana meliputi kebijakan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPBD
2	PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN A Pengurangan Resiko Bencana 1) Pencegahan (a) Pengkajian resiko (b) Pengelolaan Resiko 2) Mitigasi (a) Mitigasi struktur (b) Mitigasi Non struktur	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPBD

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
3	B Pemberdayaan Masyarakat 1) Peran lembaga usaha (a) Usaha padat modal (b) Usaha padat karya 2) Peran organisasi sosial masyarakat (a) Organisasi internasional (b) Organisasi sosial masyarakat internasional 3) Peran masyarakat (a) Peningkatan kesadaran masyarakat (b) Peningkatan ketahanan masyarakat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPBD
	C Kesiapsiagaan 1) Peringatan dini (a) Pemaduan sistem jaringan (b) Pemantauan dan peringatan (c) Peta rawan bencana 2) Perencanaan siaga (a) Kebutuhan dan potensi sumber daya (b) Penerapan rencana strategis 3) Penyiapan sumber daya (a) Penyediaan dan penyiapan sumber daya (b) Pengendalian	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPBD
	PENANGANAN DARURAT A Tanggap Darurat 1) Perencanaan darurat (a) Pendataan darurat (b) Perencanaan operasi 2) Pengendalian operasi (a) Pengorganisasian pos komando (b) Sarana dan prasarana pos komando 3) Penyelamatan dan evakuasi (a) Penyelamatan (b) Evakuasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPBD
	B Bantuan Darurat 1) Bantuan sandang pangan (a) Bantuan sandang	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPBD

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(b) Bantuan pangan				
4	2) Bantuan kesehatan dan air bersih (a) Bantuan kesehatan (b) Bantuan air bersih 3) Bantuan hunian sementara (a) Pembangunan hunian sementara (b) Pendukung hunian sementara C Perbaikan darurat 1) Pembersihan lingkungan (a) Penyiapan peralatan (b) Angkutan 2) Perbaikan sarana vital (a) Prasarana sosial (b) Prasarana ekonomi 3) Pemantauan dan pelaporan (a) Pemantauan (b) Pelaporan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPBD
	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI				
	A Penilaian Kerusakan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPBD
	1) Inventarisasi kerusakan (a) Invetarisasi fisik (b) Invetarisasi sosial ekonomi				
	2) Estimasi pembiayaan (a) Estimasi pembiayaan pembangunan (b) Estimasi pembiayaan sosial ekonomi				
	B Pemulihan dan Peningkatan Fisik	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPBD
	1) Rehabilitasi rekonstruksi fasilitas umum (a) Rehabilitasi fasilitas umum (b) Rekonstruksi fasilitas umum				
	2) Rehabilitasi rekonstruksi fasilitas sosial (a) Rehabiltasi fasilitas sosial (b) Rekonstruksi fasilitas sosial				
	3) Rehabilitasi rekonstruksi perumahan (a) Rehabilitasi rekonstruksi berat (b) Rehabilitasi rekonstruksi ringan				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	C Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi 1) Pemulihan dan peningkatan sosial budaya (a) Pemulihan dan peningkatan sosial budaya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPBD
5	(b) Pemulihan dan peningkatan sosial kesehatan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kab. Tanah Bumbu	BPBD
	2) Pemulihan dan peningkatan ekonomi (a) Pemulihan ekonomi (b) Peningkatan ekonomi				
	D Penanganan Pengungsi 1) Data identitas korban bencana (a) Di pengungsian (b) Meninggal dunia	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPBD
	2) Perlindungan dan pemberdayaan pengungsi (a) Perlindungan pengungsi (b) Pemberdayaan pengungsi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPBD
	3) Kompensasi dan pengembalian hak pengungsi (a) Kompensasi (b) Pengembalian hak	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPBD
	4) Penempatan pengungsi (a) Pemulangan dan repatriasi (b) Relokasi/Pengalihan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPBD
	LOGISTIK DAN KEDARURATAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPBD
	A Logistik 1) Inventarisasi kebutuhan dan pengadaan (a) Analisis kebutuhan (b) Pengadaan				
	2) Penyimpanan dan distribusi (a) Penyimpanan (b) Distribusi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPBD
	B Peralatan 1) Inventarisasi kebutuhan dan pengadaan (a) Analisis kebutuhan (b) Pengadaan				
	2) Penyimpanan dan pemeliharaan (a) Penyimpanan (b) Pemeliharaan				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	3) Pengerahan dan distribusi (a) Pengerahan (b) Distribusi				
IX	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
1	KEBIJAKAN Kebijakan dalam Kelembagaan Koperasi dan UKM, Produksi, Pembiayaan,	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
2	MONITORING DAN EVALUASI	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
3	KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM A Organisasi dan Badan Hukum Koperasi (1) Organisasi Koperasi dan UKM (a) Organisasi Koperasi (b) Organisasi UKM (2) Badan Hukum Koperasi (a) Penatausahaan Badan Hukum Koperasi (b) Evaluasi Badan Hukum Koperasi (3) Penelaahan Kasus Hukum (a) - Kasus Hukum Koperasi (b) - Kasus Hukum UKM B Peraturan Perundang-Undangan (1) Penyusunan dan Evaluasi Perundang-Undangan Koperasi (a) Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Koperasi (b) Evaluasi Perundang-Undangan Koperasi (2) Penyusunan dan Evaluasi Perundangan-undangan UKM (a) Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan UKM (b) Evaluasi Perundang-Undangan UKM (3) Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(a) Produk Peraturan Perundang-Undangan Pusat (b) Peraturan Daerah C Tata laksana Koperasi dan UKM (1) Tata laksana Koperasi (a) Tata laksana Koperasi Primer	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
	(b) Tata laksana Koperasi Sekunder (2) Tata laksana Usaha Kecil dan Menengah (a) Tata laksana Usaha Kecil (b) Tata laksana Usaha Mengah (3) Klasifikasi Koperasi dan UKM (a) Klasifikasi Koperasi (b) Klasifikasi UKM D Keanggotaan Koperasi (1) Partisipasi Usaha dan Permodalan (a) Partisipasi Usaha (b) Partisipasi Permodalan (c) Simpanan Koperasi (2) Partisipasi Pengawasan (a) Rapat Anggota (b) Pengawasan (3) Pengembangan Anggota (a) Kaderisasi (b) Penyuluhan E Pengendalian dan Akuntabilitas (1) Pengendalian (a) Pengendalian Intern (b) Tindak Lanjut Hasil Pengendalian (2) Bidang Akuntabilitas dan Akuntansi (a) Akuntabilitas (b) Akuntansi dan Audit (3) Monitoring dan Evaluasi (a) Monitoring (b) Evaluasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
4	PRODUKSI A Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura 1) Tanaman Pangan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.	DISNAKERTRANSKOP dan UM

[illegible]

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(b) Pangan, Kimia dan Aneka 2) Kerajinan (a) Logam (b) Non Logam 3) Pertambangan dan Migas (a) Pertambangan Umum (b) Pertambangan Migas				
	4) Jasa dan Aneka Usaha (a) Jasa (b) Aneka Usaha				
	E Ketenaga Listrikan dan Aneka Usaha 1) Ketenaga Listrikan dan Konstruksi (a) Listrik (b) Konstruksi 2) Aneka Usaha (a) Jasa Umum (b) Angkutan 3) Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi (a) Pariwisata (b) Pos dan Telekomunikasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
5	PEMBIAYAAN A Program Pendanaan (1) Program Pendanaan Jangka Pendek (a) Program Pendanaan Koperasi Jangka Pendek (b) Program Pendanaan UKM Jangka Pendek (2) Program Pendanaan Jangka Menengah dan Panjang (a) Program Pendanaan Koperasi Jangka Menengah dan Panjang (b) Program Pendanaan UKM Jangka Menengah dan Panjang (3) Program Pendanaan Usaha Mikro dan Dana Bergulir (a) Program Pendanaan Usaha Mikro (b) Program Pendanaan Dana Bergulir	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
	B Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam (1) Pengembangan dan Pengendalian KSP	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan	DISNAKERTRANSKOP dan UM

[illegible]

[illegible]

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
7	<p>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</p> <p>A. Pengembangan Kewirausahaan</p> <p>(1) Lembaga Kewirausahaan</p> <p>(a) - Pengembangan Jaringan Kewirausahaan</p> <p>(b) - Peningkatan Sumber Daya Kewirausahaan</p> <p>(2) Penumbuhan Kewirausahaan</p> <p>(a) - Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan</p> <p>(b) - Evaluasi Kewirausahaan</p>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
	<p>(3) Sosialisasi Kewirausahaan</p> <p>(a) - Perangkat Lunak</p> <p>(b) - Promosi Kewirausahaan</p> <p>B Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM</p> <p>(1) Diklat Formal dan Informal</p> <p>(a) Diklat Formal</p> <p>(b) Diklat Informal</p> <p>(2) Diklat Non Formal</p> <p>(a) Perangkat Lunak</p> <p>(b) Sarana dan Prasarana Diklat</p> <p>(3) Kerjasama Lembaga Diklat</p> <p>(a) Hubungan Lembaga Diklat Pemerintah</p> <p>(b) Hubungan Lembaga Diklat Non Pemerintah</p> <p>C Peran Serta Masyarakat</p> <p>(1) Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi dan</p> <p>(a) Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi</p> <p>(b) Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap UKM</p> <p>(2) Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi dan UKM</p> <p>(a) Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi</p> <p>(b) Peningkatan Dukungan LSM Terhadap UKM</p> <p>(3) Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi</p> <p>(a) Dukungan Organisasi Profesi terhadap Koperasi</p>	<p>Terbatas</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon III</p> <p>Eselon IV</p>	<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p>	<p>DISNAKERTRANSKOP dan UM</p> <p>DISNAKERTRANSKOP dan UM</p>

[illegible]

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(b) Evaluasi dan Pelaporan (2) Penyelenggaraan (a) Sumber Daya Manusia (b) Pembiayaan (3) Tata Laksana Penelitian (a) Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi (b) Sarana dan Prasarana D Pengembangan Perkaderan UMK (1) Penyuluhan (a) Penyelenggaraan (b) Materi Penyuluhan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
	(2) Perkaderan (a) Penilaian (b) Pengembangan (3) Kerja Sama dan Jaringan (a) Lembaga Pemerintah (b) Lembaga Non Pemerintah				
X	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1	KEBIJAKAN Kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Biasa.Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DKBPPPA
2	PENGARUSUTAMAAN GENDER, EKONOMI, POLITIK SOSIAL DAN HUKUM A Data Gender B Advokasi dan Fasilitasi C Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Gender	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DKBPPPA
3	PERLINDUNGAN PEREMPUAN (KEKERASAN, MASALAH SOSIAL, TENAGA KERJA, KORBAN PERDAGANGAN) A Data Perlindungan Perempuan B Advokasi dan Fasilitasi C Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Perlindungan Perempuan	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DKBPPPA

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
4	D Sistem Aplikasi dan Jaringan Informasi Gender	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DKBPPPA
	E Analisis dan Penyajian Informasi Gender	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DKBPPPA
	PERLINDUNGAN ANAK (HAK SIPIL, MASALAH SOSIAL, KEKERASAN TERHADAP ANAK, ANAK BERKEBUTUHAN)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DKBPPPA
	A Data Perlindungan Anak B Advokasi dan Fasilitasi C Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Perlindungan Anak				
5	IDENTITAS SAKSI DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DKBPPPA
6	IDENTIFIKASI ANAK BERMASALAH DENGAN HUKUM	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	
7	IDENTIFIKASI SAKSI, PELAKU, PELAPOR DAN SAKSI AHLI	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DKBPPPA
8	TEMPAT PERLINDUNGAN KORBAN	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DKBPPPA
9	TUMBUH KEMBANG ANAK (PENDIDIKAN, KESEHATAN, PARTISIPASI, LINGKUNGAN DAN PENANAMAN NILAI) A Data Tumbuh Kembang Anak	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DKBPPPA

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
XI	B Advokasi dan Fasilitas C Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Tumbuh Kembang Anak				
	URUSAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
1	Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi kebijakan dibidang 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk NSPK	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPORA
2	Pengembangan destinasi pariwisata A. Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata				
	(1) Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (Kawasan Strategis Pariwisata)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPORA
	(2) Kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata (Perancangan Destinasi Pariwisata)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPORA
	(3) Pengembangan Zona Kreatif (a) Zona Kreatif Berbasis Seni dan Budaya (b) Zona Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPORA
	(4) Invetasi Pariwisata (a) Pengembangan Potensi Investasi (b) Promosi Investasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPORA
	(5) Pengembangan Objek Vital Nasional	Terbatas	Eselon III		DISPORA
	B. Pengembangan Daya Tarik Wisata (1) Bimtek Daya Tarik Wisata (2) Fasilitas Pengembangan Daya Tarik Wisata (3) Pengembangan Daya Tarik Wisata Kota Pusaka (4) Penilaian Kelayakan Tugas Pembantuan (5) Penghargaan Pengelolaan Daya Tarik Wisata (Cipta Award)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPORA
	C. Industri Pariwisata				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(1) Sarana Pariwisata (a) usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata (b) penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, serta tirta dan spa. (c) Sertifikasi kelembagaan dan SDM industri pariwisata (d) Pengawasan industri pariwisata	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas Terbatas	Eselon IV Eselon IV Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPORA DISPORA DISPORA DISPORA
	(2) Jasa Pariwisata: (a) jasa transportasi wisata (b) jasa informasi pariwisata (c) penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi (d) jasa perjalanan wisata (e) jasa konsultan pariwisata (f) jasa pramuwisata dan penyelenggaraan pertemuan (g) insentif (h) konvensi (i) pameran (3) Pengembangan Produk dan Pelayanan D. Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata (1) Kemitraan dan Kelembagaan Masyarakat E. Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event (1) Pengembangan Wisata Kulier dan Belanja (2) Pengembangan Rekreasi dan Hiburan (a) Pengembangan Wisata Spa dan Kesehatan (b) Pengembangan Wisata Olah Raga	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPORA DISPORA DISPORA

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
3	<p>(3) Pengembangan Wisata Alam dan Budaya</p> <p>PEMASARAN PARIWISATA</p> <p>A. Pengembangan pasar dan informasi pariwisata</p> <p>(1) Informasi Pasar Dalam Negeri</p> <p>(a) Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri</p> <p>(b) Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri</p> <p>(2) Informasi Pasar Luar Negeri</p> <p>(a) Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri</p> <p>(b) Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri</p> <p>(3) Hubungan Lembaga Pariwisata dan</p> <p>(a) Hubungan Lembaga Pariwisata</p> <p>(4) Perancangan Pemasaran Pariwisata</p> <p>(a) Perancangan Pemasaran Dalam Negeri</p> <p>(b) Perancangan Pemasaran Luar Negeri</p>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPORA
	<p>B. Promosi pariwisata luar negeri</p> <p>(1) Wilayah ASEAN</p> <p>(2) Wilayah Asia</p> <p>(3) Wilayah Eropa</p> <p>C. Promosi Pariwisata Dalam Negeri</p> <p>D. Pencitraan Indonesia</p> <p>(1) Strategi Pencitraan Indonesia</p> <p>(a) Perencanaan Pencitraan Indonesia</p> <p>(2) Komunikasi Media Cetak, Media Elektronik dan Digital, dan Media Ruang</p> <p>(a) Promosi Media</p> <p>(b) Sarana dan Distribusi Media</p> <p>(3) Kerjasama dan Kemitraan</p> <p>(a) Kerjasama dan Kemitraan Antar Lembaga Pemerintah</p> <p>(b) Kerjasama dan Kemitraan Antar Lembaga Non-Pemerintah</p>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPORA
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPORA
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPORA

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
4	E. Promosi Konvensi, Insentif, event, dan minat khusus (3) Promosi Minat Khusus (a) Wisata Bahari (b) Wisata Non Bahari	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPORA
	A. Pengembangan industri Perfilman (1) Fasilitas Industri Perfilman (a) Fasilitas Usaha Perfilman (b) Fasilitas Kegiatan Perfilman (2) Festival dan Eksibisi Film (a) Festival Film (3) Produksi (a) Pelayanan Produksi Film (4) Pemasaran Film (a) Pertunjukan Film	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPORA
5	B. Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik (1) Pengembangan Seni Pertunjukan (a) Kreasi dan Produksi Seni Pertunjukan (b) Fasilitas Pengembangan Seni Pertunjukan (2) Pengembangan Industri Musik (a) Kreasi dan Produksi Musik (b) Fasilitas Pengembangan Industri Musik (3) Pemasaran Seni Pertunjukan dan Industri Musik	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPORA
	C. Pengembangan Seni Rupa (1) Pengembangan Seni Rupa Murni, Seni Rupa Terapan, Fotografi (a) Kreasi dan Produksi Karya Seni (b) Fasilitas Pengembangan Seni (2) Pemasaran dan Pengembangan Apresiasi (b) Apresiasi Karya Seni Rupa	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPORA
	A. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang	DISPORA

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	<div>(1) Pengembangan Karya Kreatif Audio dan Video</div> <div>(2) Pengembangan Karya Kreatif Periklanan</div> <div> (a) Iklan Cetak</div> <div> (b) Iklan Elektronik</div> <div>B. Desain dan Arsitektur</div> <div> (1) Komunikasi Visual</div> <div> (a) Komunikasi Visual</div> <div> (2) Desain Produk dan Kemasan</div> <div> (3) Mode</div> <div> (a) Desain Busana</div> <div> (b) Desain Non Busana</div> <div>C. Kerjasama dan Fasilitasi</div> <div> (1) Lisensi Teknologi</div> <div> (a) Pemanfaatan Teknologi</div> <div> (2) Sentra Inovasi dan</div> <div> (a) Pengembangan Sentra Inovasi</div>	<div>Biasa/Terbuka</div> <div>Biasa/Terbuka</div>	<div>Eselon IV</div> <div>Eselon IV</div>	<div>mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div>	<div>DISPORA</div> <div>DISPORA</div>
6	<div>(3) Sentra Kreatif</div> <div> (a) Pengelolaan Sentra Kreatif</div> <div>(4) Akses Pembiayaan</div> <div> (a) Akses Pembiayaan Non Bank</div> <div> (b) Akses Pembiayaan Non Bank</div> <div>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</div> <div>A. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataa</div> <div> (1) Program dan Evaluasi</div> <div> (2) Data dan Publikasi</div> <div>B. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif</div> <div> (1) Program dan Evaluasi</div> <div> (2) Data dan Publikasi</div> <div>C. Pengembangan SDM Kepariwisataa dan Ekonomi Kreatif</div> <div> (1) Program dan Evaluasi</div> <div> (2) Penyelenggaraan dan Kerjasama</div>	<div>Biasa/Terbuka</div> <div>Biasa/Terbuka</div> <div>Biasa/Terbuka</div>	<div>Eselon IV</div> <div>Eselon IV</div> <div>Eselon IV</div>	<div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div>	<div>DISPORA</div> <div>DISPORA</div> <div>DISPORA</div>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
XII 1 2	D. Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif (1) Program dan Evaluasi (2) Evaluasi dan Kerjasama	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPORA
	URUSAN SOSIAL				
	1 Kebijakan Kebijakan bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Sosial
	2 Rehabilitasi Sosial A Kesejahteraan sosial anak 1) Kesejahteraan sosial anak balita a. Pengangkatan anak b. Pengasuhan anak balita 2) Kesejahteraan sosial anak terlantar a. Pengasuhan anak dalam keluarga b. Pengasuhan anak dalam lembaga	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Sosial Dinas Sosial
	3) Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum a. Perlindungan dan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum b. Pengembangan remaja 4) Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus a. Kelembagaan dan penguatan keluarga b. Aksesibilitas anak dengan kecacatan	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Sosial Dinas Sosial
	B Rehabilitasi sosial 1) Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit a. Dalam penantian b. Luar panti 2) Kelembagaan dan advokasi sosial 3) Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Sosial Dinas Sosial
	C Rehabilitasi sosial tuna sosial				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	1) Gelandangan dan pengemis	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Sosial
	2) Tuna susila dan korban <i>traffiking</i> perempuan	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	3) Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	a. Penyiapan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Sosial
	b. Reintegrasi				
	4) Pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas				
	D Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Sosial
	1) Pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan pengembangan peran masyarakat				
	2) Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dalam institusi dan luar institusi	Terbatas		Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	
	E Pelayanan sosial lanjut usia				
	1) Pelayanan sosial dalam dan luar panti	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Sosial
	2) Pengembangan kelembagaan				
	a. Pembinaan lembaga				
	b. Kerjasama lembaga				
	3) Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Sosial
3	Perlindungan dan Jaminan Sosial				
	A Pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Sosial
	1) Bimbingan dan standardisasi				
	2) Perizinan dan pengumpulan				
	B Perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran				
	C Perlindungan sosial korban bencana sosial	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Sosial
	1) Ketahanan sosial masyarakat				
	a. Kesperasian sosial	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Sosial
	b. Penguatan sumber daya				
	2) Tanggap darurat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Sosial
	a. Bantuan darurat				
	b. Advokasi sosial				
	3) Pemulihan sosial	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang	Dinas Sosial

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	<div>a. Penguatan sosial</div> <div>b. Reintegrasi sosial</div> <div>4) Kerjasama</div> <div><div>a. Kerjasama Pemerintah</div><div>b. Kerjasama Non Pemerintah</div></div> <div>D Perlindungan sosial korban bencana alam</div> <div><div>1) Kesiapsiagaan dan mitigasi</div><div>2) Tanggap darurat</div><div><div>a. Bantuan darurat</div><div>b. Advokasi sosial</div></div><div>3) Pemulihan sosial dan penguatan sosial</div><div>4) Kerjasama</div><div><div>a. Kerjasama Pemerintah</div><div>b. Kerjasama Non Pemerintah</div></div></div> <div>E Jaminan sosial</div> <div><div>1) Seleksi dan verifikasi</div><div>2 Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan</div><div><div>a. Pendampingan</div><div>b. Penyaluran</div></div><div>3) Kerjasama</div><div><div>a. Kerjasama Pemerintah</div><div>b. Kerjasama Non Pemerintah</div></div></div>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Sosial
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Sosial
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Sosial
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Sosial
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Sosial
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Sosial
4	<div>Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan</div> <div>A Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial</div> <div><div>1) Ketahanan keluarga</div><div><div>a. Bimbingan kesejahteraan sosial keluarga</div><div>b. Konsultasi dan Advokasi keluarga</div></div><div>2) Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial</div><div>3) Kemitraan dunia usaha</div><div><div>a. Kerjasama</div><div>b. Bimbingan sosial</div></div><div>4) Karang taruna</div><div><div>a. Kelembagaan</div><div>b. Pengembangan kapasitas</div></div></div> <div>B Pemberdayaan komunitas adat terpencil</div> <div><div>1) Persiapan pemberdayaan</div></div>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Sosial
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Sosial
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Sosial
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Sosial
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang	Dinas Sosial

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	<div>a. Identifikasi</div> <div>b. Analisis</div> <div>2) Pemberdayaan sumber daya manusia</div> <div><div>a. Pemberdayaan sumber daya manusia adat terpencil</div><div>b. Pemberdayaan pendamping sosial komunitas adat terpencil</div></div> <div>3) Penggalan dan pengembangan potensi</div> <div><div>a. Penggalan potensi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan</div><div>b. Pengembangan potensi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan</div></div> <div>4) Keserasian dan penguatan komunikasi adat terpencil</div> <div><div>a. Keserasian sosial</div><div>b. Penguatan sosial</div></div> <div>5) Kerjasama kelembagaan</div> <div><div>a. Kerjasama kelembagaan</div><div>b. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan</div></div> <div>C Penanggulangan kemiskinan perkotaan dan perdesaan</div> <div>1) Identifikasi dan analisis</div> <div>2) Pengembangan kapasitas</div> <div><div>a. Pengembangan kapasistas sumber daya manusia</div><div>b. Pengembangan kapasitas usaha</div></div>	<div>Biasa/Terbuka</div> <div>Biasa/Terbuka</div> <div>Biasa/Terbuka</div> <div>Biasa/Terbuka</div> <div>Biasa/Terbuka</div> <div>Biasa/Terbuka</div> <div>Biasa/Terbuka</div> <div>Biasa/Terbuka</div>	<div>Eselon IV</div> <div>Eselon IV</div> <div>Eselon IV</div> <div>Eselon IV</div> <div>Eselon IV</div> <div>Eselon IV</div> <div>Eselon IV</div> <div>Eselon IV</div>	<div>mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div>	<div>Dinas Sosial</div> <div>Dinas Sosial</div> <div>Dinas Sosial</div> <div>Dinas Sosial</div> <div>Dinas Sosial</div> <div>Dinas Sosial</div> <div>Dinas Sosial</div> <div>Dinas Sosial</div>
	<div>D Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial</div> <div>1) Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan</div> <div><div>a. Pengangkatan</div><div>b. Penghargaan</div><div>c. Kesejahteraan</div></div> <div>2) Pelestarian nilai - nilai kepahlawanan dan keperintisan</div> <div><div>a. Identifikasi</div><div>b. Pendayagunaan</div></div> <div>3) Pengembangan kesetiakawanan sosial</div> <div><div>a. Penggalan nilai</div><div>b. Pelestarian nilai</div></div> <div>4) Pengelolaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional</div>	<div>Biasa/Terbuka</div> <div>Biasa/Terbuka</div> <div>Biasa/Terbuka</div> <div>Biasa/Terbuka</div>	<div>Eselon IV</div> <div>Eselon IV</div> <div>Eselon IV</div> <div>Eselon IV</div>	<div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div>	<div>Dinas Sosial</div> <div>Dinas Sosial</div> <div>Dinas Sosial</div> <div>Dinas Sosial</div>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
XIII	a. Pengelolaan taman makam pahlawan nasional utama b. Standardisasi taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional			Tanah Bumbu	
	URUSAN KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI				
	A. PERUMUSAN KEBIJAKAN Kebijakan di bidang Perencanaan Tenaga Kerja, Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
	B. PERENCANAAN TENAGA KERJA 1. Perencanaan Tenaga Kerja Makro a. Perencanaan Tenaga Kerja Daerah 1) Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah 2) Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah 3) Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
	2. Perencanaan Tenaga Kerja Mikro a. Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah 1) Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah 2) Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja 3) Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja b. Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta 1) Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Swasta 2) Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja 3) Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
	C. PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	<div>1. Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan</div> <div>a. Pengembangan Standarisasi Kompetensi</div> <div>1) Penerapan Standar Kompetensi</div> <div>2) Bimbingan Penerapan Standar Kompetensi</div> <div>3) Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan</div> <div>Program Pelatihan Ketenagakerjaan</div> <div>Penyusunan Materi Pelatihan Ketenagakerjaan</div> <div>4) Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan</div> <div>Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan</div> <div>Penyusunan Materi Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan</div> <div>5) Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian</div> <div>Program Pelatihan Ketransmigrasian</div> <div>Penyusunan Materi Pelatihan Ketransmigrasian</div> <div>b. Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja</div> <div>1) Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan</div> <div>Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja</div> <div>Pengembangan Sistem Informasi Kelembagaan</div> <div>2) Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan</div> <div>Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan</div> <div>Bimbingan Pengelolaan Sarana dan Fasilitas</div>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
	<div>3) Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan</div> <div>Standar Mutu Lembaga Pelatihan</div> <div>Bimbingan Penerapan Standar Mutu</div> <div>4) Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga</div> <div>Sistem Pendanaan Pelatihan</div> <div>Kerjasama Antar Lembaga</div> <div>c. Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan</div> <div>1) Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah</div> <div>Peningkatan Kompetensi Instruktur dan PSM Lembaga</div> <div>Pengembangan Karir Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan</div> <div>2) Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta</div>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	<p>Peningkatan Kompetensi Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta</p> <p>Pengembangan Karir Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta</p> <p>3) Tenaga Pelatihan</p> <p>Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelatihan</p> <p>Pengembangan Karir Tenaga Pelatihan</p> <p>4) Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan</p> <p>Registrasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan</p> <p>Penyebaran Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan</p> <p>d. Bina Pemagangan</p> <p>1) Pemagangan Dalam Negeri</p> <p>Program Pemagangan Dalam Negeri</p> <p>Bimbingan dan Penyuluhan Pemagangan Dalam Negeri</p> <p>2) Pemagangan Luar Negeri</p> <p>Program Pemagangan Luar Negeri</p> <p>Bimbingan dan Penyuluhan Pemagangan Luar Negeri</p> <p>3) Perizinan dan Advokasi Pemagangan</p> <p>Perizinan dan Rekomendasi</p> <p>Advokasi dan Perlindungan</p> <p>4) Promosi dan Jenjang Pemagangan</p> <p>Promosi dan Sistem Informasi Pemagangan</p> <p>Pemagangan Jejaring Pemagangan</p>				
	<p>e. Produktivitas dan Kewirausahaan</p> <p>1) Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan</p> <p>Promisi Produktivitas dan Kewirausahaan</p> <p>Kerjasama Peningkatan Produktivitas dan Kewirausahaan</p> <p>2) Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas</p> <p>Sistem dan Metode Produktivitas</p> <p>Alat dan Teknik Peningkatan Produktivitas</p> <p>3) Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas</p> <p>Pengukuran Produktivitas</p>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.</p>	<p>DISNAKERTRANSKOP dan UM</p> <p>DISNAKERTRANSKOP dan UM</p> <p>DISNAKERTRANSKOP dan UM</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	<div>Kajian Produktivitas</div> <div>4) Pengembangan Kewirausahaan</div> <div>Pelatihan Manajemen Kewirausahaan</div> <div>Bimbingan Konsultasi</div> <div>5) Transmigrasi</div> <div>6) Nama dan alamat Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berkerja pada Perusahaan di Kalimantan Selatan</div> <div>D. PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA</div> <div>1. Pengembangan Pasar Kerja</div> <div>a. Informasi Pasar Kerja</div> <div>1) Informasi Pasar Kerja Dalam Negeri</div> <div>2) Informasi Pasar Kerja Luar Negeri</div> <div>b. Analisis Pasar Kerja</div> <div>1) Analisis Pasar Kerja Dalam Negeri</div> <div>2) Analisis Pasar Kerja Luar Negeri</div> <div>c. Bursa Kerja</div> <div>1) Bursa Kerja Dalam Negeri</div> <div>2) Bursa Kerja Luar Negeri</div> <div>d. Analisis Jabatan</div> <div>1) Analisis dan Informasi Jabatan</div> <div>2) Pengembangan Sistem Analisis Jabatan</div>	<div>Biasa/Terbuka</div> <div>Terbatas</div> <div>Terbatas</div> <div>Biasa/Terbuka</div>	<div>Eselon IV</div> <div>Eselon III</div> <div>Eselon III</div> <div>Eselon IV</div>	<div>Tanah Bumbu</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.</div> <div>Tanah Bumbu</div> <div>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div>	<div>DISNAKERTRANSKOP dan UM</div> <div>DISNAKERTRANSKOP dan UM</div> <div>DISNAKERTRANSKOP dan UM</div> <div>DISNAKERTRANSKOP dan UM</div>
	<div>2. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri</div> <div>a. Antar Kerja</div> <div>1) Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)</div> <div>2) Kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja</div> <div>b. Penempatan Tenaga Kerja Khusus</div> <div>1) Penempatan Tenaga Kerja Khusus Muda dan Wanita</div> <div>2) Penempatan Tenaga Kerja Khusus Penyandang Cacat dan Lansia</div> <div>c. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan</div> <div>1) Penyuluhan Jabatan</div>	<div>Biasa/Terbuka</div>	<div>Eselon IV</div>	<div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div>	<div>DISNAKERTRANSKOP dan UM</div>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	<div>2) Bimbingan Jabatan</div> <div>d. Pemberdayaan Pengantar Kerja</div> <div>1) Pengembangan Kompetensi Pengantar Kerja</div> <div>2) Kerjasama antar Lembaga</div> <div>3. Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri</div> <div>a. Kelembagaan Penempatan</div> <div>1) Perizinan Kelembagaan</div> <div>2) Evaluasi Kinerja</div> <div>b. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)</div> <div>1) Penyiapan dan Dokumen Penempatan TKI</div> <div>2) Fasilitasi Penyediaan TKI</div> <div>c. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia</div> <div>1) Advokasi dan Kepulangan</div> <div>2) Sarana dan Perlindungan</div> <div>d. Kerjasama Internasional</div> <div>1) Kerjasama Bilateral</div> <div>2) Kerjasama Regional dan Multilateral</div> <div>4. Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal</div> <div>a. Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal</div> <div>1) Tenaga Kerja Mandiri</div> <div>2) Tenaga Kerja Sektor Informal</div> <div>b. Pengembangan Padat Karya</div> <div>1) Padat Karya Perdesaan</div> <div>2) Padat Karya Perkotaan</div> <div>c. Terapan Teknologi Tepat Guna</div>	<div>Terbatas</div> <div>Terbatas</div>	<div>Eselon III</div> <div>Eselon III</div>	<div>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div>	<div>DISNAKERTRANSKOP dan UM</div> <div>DISNAKERTRANSKOP dan UM</div>
	<div>1) Pengembangan Teknologi Tepat Guna</div> <div>2) Penyebarluasan Teknologi Tepat Guna</div> <div>d. Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga</div> <div>1) Pemberdayaan Pendampingan</div> <div>2) Kerjasama Antar Lembaga</div> <div>5. Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing</div> <div>a. Analisis dan Perizinan Sektor Industri</div>	<div>Biasa/Terbuka</div>	<div>Eselon IV</div>	<div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.</div>	<div>DISNAKERTRANSKOP dan UM</div>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	<div>1) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri</div> <div>2) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri</div> <div>b. Analisis dan Perizinan Sektor Jasa</div> <div>1) Rencana Pembangunan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa</div> <div>2) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa</div> <div>c. Pengendalian dan Kerjasama Kelembagaan</div> <div>1) Pengendalian</div> <div>2) Kerjasama Kelembagaan</div> <div>6. Standardisasi Profesi</div> <div>a. Sistem Informasi dan Registrasi</div> <div>1) Dokumen yang berhubungan dengan sistem informasi dan registrasi</div> <div>2) Dokumen yang berhubungan dengan Sertifikasi kompetensi kerja</div> <div>b. Pembakuan Akreditasi</div> <div>1) Dokumen yang berhubungan dengan kompetensi dan akreditasi</div> <div>2) Dokumen yang berhubungan dengan penyelenggaraan konvensi dan persidangan</div> <div>E. PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA</div> <div>1. Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi</div> <div>a. Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama</div> <div>1) Peraturan Perusahaan</div> <div>2) Perjanjian Kerja Bersama</div> <div>b. Perjanjian Kerja</div> <div>c. Kesejahteraan Pekerja</div> <div>1) Program Kesejahteraan</div> <div>2) Fasilitas Kesejahteraan</div> <div>d. Analisis Diskriminasi Syarat Kerja</div> <div>1) Penanggulangan Diskriminasi Syarat Kerja</div>	<div>Biasa/Terbuka</div> <div>Terbatas</div>	<div>Eselon IV</div> <div>Eselon III</div>	<div>Tanah Bumbu</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div>	<div>DISNAKERTRANSKOP dan UM</div> <div>DISNAKERTRANSKOP dan UM</div>
	<div>2) Perjanjian Kerja Bersama</div> <div>b. Perjanjian Kerja</div> <div>c. Kesejahteraan Pekerja</div> <div>1) Program Kesejahteraan</div> <div>2) Fasilitas Kesejahteraan</div> <div>d. Analisis Diskriminasi Syarat Kerja</div> <div>1) Penanggulangan Diskriminasi Syarat Kerja</div>				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	<div>2) Evaluasi Diskriminasi Syarat Kerja</div> <div>2. Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial<div>a. Organisasi Pekerja dan Pengusaha<div>1) Organisasi Pekerja</div><div>2) Organisasi Pengusaha</div></div><div>b. Kelembagaan Hubungan Industrial<div>1) Lembaga Kerjasama BIPARTIT</div><div>2) Lembaga Kerjasama TRIPARTIT</div></div><div>c. Pemasyarakatan Hubungan Industrial<div>1) Penyiapan Masyarakat Materi Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial</div><div>2) Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial</div></div></div> <div>3. Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial<div>a. Pengupahan<div>1) Usulan penetapan upah minimum Bupati/Walikota kepada Gubernur</div><div>2) Usulan pengguhan pelaksanaan upah minimum dari Dunia Usaha kepada Gubernur</div><div>3) Penerapan Standar Pengupahan</div><div>4) Pengurusan Pengupahan</div></div></div>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
	<div>b. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja<div>1) Pengurusan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja</div><div>2) Kepesertaan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja</div></div> <div>4. Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial</div>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.	DISNAKERTRANSKOP dan UM

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	<div><div><div>a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial<div><div>1) Pencegahan Dini</div><div>2) Penanganan Mogok dan Penutupan Perusahaan</div></div></div><div>b. Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial<div><div>1) Pengurusan Perselisihan Hubungan Industrial</div><div>2) Evaluasi dan Pelaporan</div></div></div><div>c. Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan<div><div>1) Fungsionalisasi Perantara dan Legitimasi Mediator, Konsiliator,</div><div>2) Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan di Luar Peradilan</div></div></div></div><div>F. PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN<div><div>1. Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja<div><div>a. Pengawasan Norma Kerja<div><div>1) Pengawasan Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat</div><div>2) Pengawasan Norma Pengupahan</div></div></div><div>b. Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat<div><div>1) Pengawasan Norma Hubungan Kerja</div><div>2) Pengawasan Norma Perlindungan Berserikat</div></div></div><div>c. Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja<div><div>1) Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dalam Negeri</div><div>2) Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri</div><div>3) Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek</div></div></div></div></div></div><div>Biasa/Terbuka</div><div>Eselon IV</div><div>Tanah Bumbu</div><div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div><div>DISNAKERTRANSKOP dan UM</div></div></div>				
	<div><div>2. Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak<div><div>a. Pengawasan Norma Kerja Perempuan<div><div>1) Pengawasan Norma Penghapusan Diskriminasi</div><div>2) Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan</div></div></div></div></div><div>Biasa/Terbuka</div><div>Eselon IV</div><div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div><div>DISNAKERTRANSKOP dan UM</div></div>				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none">b. Pengawasan Norma Kerja Anak<ul style="list-style-type: none">1) Pengawasan Norma Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan2) Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Anakc. Kerjasama Lintas Sektoral<ul style="list-style-type: none">1) Kerjasama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Perempuan2) Kerjasama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Anakd. Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak<ul style="list-style-type: none">1) Advokasi Tenaga Kerja Perempuan2) Advokasi Tenaga Kerja Anak <p>3. Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan<ul style="list-style-type: none">1) Pengawasan Norma Mekanik2) Pengawasan Norma Pesawat Uap dan Bejana Tekanb. Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan<ul style="list-style-type: none">1) Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan2) Pengawasan Norma Listrik dan Penanggulangan Kebakaranc. Pengawasan Norma Kesehatan Kerja<ul style="list-style-type: none">1) Pengawasan Norma Pelayanan Kesehatan Kerja2) Pengawasan Norma Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerjad. Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya<ul style="list-style-type: none">1) Pengawasan Norma Lingkungan Kerja2) Pengawasan Norma Bahan Berbahayae. Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3<ul style="list-style-type: none">1) Pengawasan Norma Kelembagaan dan Keahlian K32) Pengawasan Norma Sistem Manajemen K3	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
	<p>4. Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan</p> <p>5. Bina Penegakan Hukum</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang	DISNAKERTRANSKOP

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	<div>1) Teknis Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan</div> <div>2) Penindakan Norma Ketenagakerjaan</div> <div>b. Penyidikan Norma Ketenagakerjaan</div> <div>1) Teknis Penyidikan Norma Ketenagakerjaan</div> <div>2) Administrasi Penyidikan Norma Ketenagakerjaan</div> <div>c. Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil</div> <div>1) Pemberdayaan PPNS</div> <div>2) Sarana dan Prasarana PPNS</div> <div>d. Kerjasama Penegakan Hukum</div> <div>1) Kerjasama Lembaga Penegakan Hukum</div> <div>2) Kerjasama Pemeriksaan dan Penyidikan</div> <div>e. Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan (Nota pemerikaan dan BAP)</div> <div>G. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA</div> <div>1. Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</div> <div>a. Pengkajian K3</div> <div>1) Analisis dan Standardisasi bidang K3</div> <div>2) Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih</div> <div>b. Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K3</div> <div>2. Pengembangan SDM dan Kompetensi K3</div> <div>a. SDM K3</div> <div>1) Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan</div> <div>2) Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3</div> <div>b. Kompetensi K3</div> <div>1) Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan</div> <div>2) Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan</div> <div>4) Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM</div>	<div>Biasa/Terbuka</div> <div>Biasa/Terbuka</div> <div>Biasa/Terbuka</div> <div>Terbatas</div> <div>Biasa/Terbuka</div> <div>Biasa/Terbuka</div>	<div>Eselon IV</div> <div>Eselon IV</div> <div>Eselon IV</div> <div>Eselon III</div> <div>Eselon IV</div> <div>Eselon IV</div>	<div>mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div>	<div>dan UM</div> <div>DISNAKERTRANSKOP dan UM</div> <div>DISNAKERTRANSKOP dan UM</div> <div>DISNAKERTRANSKOP dan UM</div> <div>DISNAKERTRANSKOP dan UM</div> <div>DISNAKERTRANSKOP dan UM</div> <div>DISNAKERTRANSKOP dan UM</div>
	<div>5) Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3</div> <div>H. KETRANSMIGRASIAN</div>				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	<div>1. Perencanaan dan Pemberdayaan<div>a. Pencadangan areal untuk pemukiman Transmigrasi</div><div>b. Peta lokasi Transmigrasi</div><div>c. Data lahan Transmigrasi</div><div>d. Rencana strategis pembangunan Transmigrasi</div><div>e. Penyusunan rencana satuan kawasan pengembangan</div></div> <div>2. Pengembangan kawasan, pengerahan dan penempatan penduduk<div>a. Usulan penempatan Transmigrasi</div><div>b. Peta lahan Transmigrasi</div><div>c. Peta lahan eks lokasi Transmigrasi</div><div>d. Pembangunan infrastruktur lokasi Transmigrasi</div></div>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISNAKERTRANSKOP dan UM
XV	URUSAN KESEHATAN				
1	PERUMUSAN KEBIJAKAN Kebijakan di bidang Bina Upaya Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan <div>A Pengkajian dan pengusulan kebijakan</div> <div>B Penyiapan bahan</div> <div>C Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan</div> <div>D Pengumpulan dan pengolahan data</div> <div>E Penetapan dalam bentuk nspk dan standarisasi</div>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan
2	UPAYA KESEHATAN A Upaya Kesehatan Dasar <div>(1) Pelayanan Kedokteran Keluarga</div> <div>(2) Praktik Klinis Bagi Dokter di Fanyaskes Primer</div> <div>(3) Pelaksanaan Kesehatan Primer</div> <div>(4) Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas</div> <div>(5) Kesehatan Gigi dan Mulut di Rumah Sakit</div> <div>(6) ICD 10, Destistry & Stomatology</div> <div>(7) Infeksi Menular Lewat Tranfusi Darah</div> <div>(8) Penyakit Mulut di Tingkat Primer</div> <div>(9) Pembiayaan Darah</div> <div>(10) Penggunaan Darah Rasional</div>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan
	<div>(11) Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring</div> <div>(12) Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, sangat terpencil dan</div> <div>(13) Akreditasi Puskesmas</div>				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(14) Puskesmas Berprestasi B Upaya Kesehatan Rujukan (1) Pelayanan Kesehatan Rujukan (a) Rumah Sakit Bergerak (b) Rumah Sakit Pratama (c) Rumah Sakit Publik (d) Rumah Sakit Privat (e) Rumah Sakit Khusus (2) Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi dan Konsorsium Upaya (3) Pelayanan Rumah Sakit Privat (a) Akses Pelayanan SPGDT Call 119 (b) Akses Pelayanan Rekeyasa Jaringan dan Sel Punca (c) Pelayanan Geriartri (d) Pelayanan Medical Tourism (e) Pelayanan Hyperbarik (4) Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan (a) Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan (b) Biaya Klaim Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) dari Luar Negeri (5) Badan Pengawas di Rumah Sakit (6) Perizinan dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas A dan (Penanam (a) Usulan Penetapan atau Peningkatan Kelas dari Pemilik RS atau Pimpinan Badan Hukum Rumah Sakit (b) Rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi (c) Profil dan data Rumah Sakit 3 (tiga) Tahun Terakhir (d) <i>Self Instrumen Assesment</i> sesuai dengan kelas yang diajukan (e) Keputusan Penetapan Kelasa (Jika peningkatan kelas) (f) Ser Sertifikat Lulus Akreditasi (Jika Peningkatan Kelas) (7) Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lain (a) Akreditasi Rumah Sakit Standar Internasional (JCI) (b) Akreditasi Rumah Sakit dengan Standar Nasional (c) Rumah Sakit Pasca Akreditasi Nasional (d) <i>Surveyor</i> Akreditasi Rumah Sakit	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan
	C Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan (1) Mikrobiologi dan Imunologi (a) Laboratorium Kseshatan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	<div>(b) Laboratorium Klinik</div> <div>(c) Laboratorium Puskesmas</div> <div>(d) Laboratorium Mikrobiologi Kultur</div> <div>(2) Patologi dan Toksikologi</div> <div>(a) PNPME</div> <div>(b) Sarana Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)</div> <div>(3) Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</div> <div>(a) Kalibrasi BPFK/LPFK/UPFK</div> <div>(b) Kalibrasi Rumah Sakit</div> <div>(c) Kalibrasi Puskesmas</div> <div>(d) Pemeliharaan Peralatan kesehatan Rumah Sakit</div> <div>(e) Pemeliharaan Peralatan kesehatan Puskesmas</div> <div>(4) Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK)</div> <div>(a) ASPAK Rumah Sakit</div> <div>(b) ASPAK Puskesmas</div> <div>(c) ASPAK Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota</div> <div>D Kesehatan Jiwa</div> <div>(1) Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan</div> <div>(a) Kesehatan Jiwa di Desa Siaga</div> <div>(b) Kegawatdaruratan Psikiatrik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer</div> <div>(c) Promosi Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer</div> <div>(2) Etikolegal dan Asesmen</div> <div>(a) Penanggulangan Penelantaran dan Pemasungan Serta Penanganan Salah Lainnya Terhadap Orang Dengan Penderita Gangguan Jiwa</div> <div>(b) Visum Et Repertum</div> <div>(3) Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko</div> <div>(a) Kesehatan Jiwa Di Sekolah</div> <div>(b) Kesehatan Jiwa dan Dukungan Psikososial Penanggulangan Bencana</div> <div>(c) Penanggulangan Autisme</div> <div>(d) Kesehatan Jiwa Pada Kelompok Berisiko</div>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan
	(e) Psikologi Awal (PFA) Bagi Petugas Siaga Bencana				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
3	<p>PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN</p> <p>A Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra</p> <p>(1) Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa (KLB)</p> <p>(a) Difteri</p> <p>(b) Polio</p> <p>(c) Penyelenggaraan Kegiatan Survei Pre TAS filariasis</p> <p>(d) Surveilans influenza</p> <p>(e) Keracunan Pangan</p> <p>(2) Imunisasi</p> <p>(a) Pekan Imunisasi Nasional</p> <p>(b) Coldchain Bagi Petugas Imunisasi</p> <p>(c) In</p> <p>(d) Imunisasi bagi Petugas Kesehatan</p> <p>(e) Imunisasi di Daerah Sulit</p> <p>(f) Imunisasi TT bagi wanita usia subur(WUS)</p> <p>(g) Imunisasi bagi masyarakat umum</p> <p>(h) Vaksin dan serum program imunisasi, Pencanangan vaksin baru DPT-HIB-Hib</p> <p>(i) Imunisasi Campak, Polio, Difteri, TT, DPT, Pertusis, Tetanus dan HIB B/ Haemophilis Influenza tipe B</p> <p>(4) Kesehatan Matra</p> <p>(a) Mudik Sehat</p> <p>(b) Kesehatan bagi Penumpang Darat, Penumpang Kapal Laut dan Penumpang Pesawat Udara</p> <p>(c) Kesehatan Migran</p> <p>(d) Upaya Kesehatan Penyelaman dan Hyperbarik</p> <p>(e) Penanggulangan Kesehatan akibat gangguan Kamtibmas</p> <p>(f) Kesehatan Transmigrasi bagi tenaga kesehatan</p> <p>B Pengendalian Penyakit Menular Langsung</p> <p>(1) Pengendalian Tuberkulosis</p> <p>(a) Pengendalian Penyakit TB</p> <p>(b) TB Multi Drug Resitance, TB, DOTS, WARSOR TB, TB Anak, TB HIV, Keperawatan TB.</p> <p>(c) Laboratorium TB</p> <p>(2) Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual</p>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p>	<p>Dinas Kesehatan</p> <p>Dinas Kesehatan</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	<div>(a) Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) / <i>Integrated Bio-Behavioural Surveillance</i> (IBBS)</div> <div>(b) <i>Human Immuno Deficiency Virus</i> (HIV)</div> <div>(c) Infeksi Menular Seksual (IMS), Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP), Konseling dan Test</div> <div>(d) Obat <i>Anti Retro Viral</i> (ARV) dan reagen tes HIV</div> <div>(3) Pengendalian Infeksi Pengendalian Saluran Pernafasan Akut</div> <div>(a) <i>Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus</i> (MERS CoV)</div> <div>(b) Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)</div> <div>(4) Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan</div> <div>(a) Diare</div> <div>(b) Tifoid</div> <div>(c) Hepatitis</div> <div>(5) Pengendalian Kusta dan Frambusia</div> <div>(a) Kusta</div> <div>(b) Frambusia</div> <div>(c) Aliansi Nasional Eliminasi Kusta dan Frambusia (ANEK)</div> <div>C Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang</div> <div>(1) Pengendalian Malaria</div> <div>(a) Kelambu berinsektisida (LLINs)</div> <div>(b) Eliminasi malaria</div> <div>(c) Crosschecker mikroskopis malaria</div> <div>(2) Pengendalian Arbovirolesi</div> <div>(a) DBD</div> <div>(b) Chikungunya</div> <div>(c) Ebola</div> <div>(3) Pengendalian Zoonosis</div> <div>(a) Penyakit flu burung</div> <div>(b) Vaksin Anti Rabies (VAR) baru</div> <div>(c) Penyakit Pes</div> <div>(d) Penyakit flu baru Hemagglutinin tipe 1 dan Neuraminidase tipe 1 (H.1.N.1)</div>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	<div><div>(4) Pengendalian Filariasis dan Kecacingan<div>(a) Filariasis</div><div>(b) Kecacingan</div><div>(c) Schistosomiasis</div></div><div>(5) Pengendalian Vektor</div><div>D Pengendalian Penyakit Tidak Menular<div>(1) Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah<div>(a) Penyakit Jantung</div><div>(b) Penyakit Pembuluh darah</div><div>(c) Penyakit Hipertensi</div><div>(d) Penyakit Stroke</div></div><div>(2) Pengendalian Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik<div>(a) Penyakit Diabetes Mellitus</div><div>(b) Penyakit gangguan Metabolik</div><div>(c) Penyakit gangguan Tiroid</div><div>(d) Gangguan Obesitas</div></div><div>(3) Pengendalian Penyakit Kanker</div><div>(4) Pengendalian Penyakit Kronis dan Generatif<div>(a) Penyakit Akibat produk tembakau</div><div>(b) Asma, Lupus, Thalassemia</div></div><div>(5) Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan<div>(a) Pengendalian Cidera</div><div>(b) Pengendalian Kecelakaan Lalu Lintas</div><div>(c) Penanganan Kesehatan akibat Tindak Kekerasan</div></div></div><div>E Penyehatan Lingkungan<div>(1) Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar<div>(a) Pengawasan Kualitas Air Minum</div><div>(b) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat</div></div><div>(2) Penyehatan Pemukiman dan Tempat-Tempat Umum<div>(a) Higiene sanitasi dan Bangunan Umum</div><div>(b) Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan</div><div>(c) Pengendalian faktor resiko di rumah dan tempat umum</div></div><div>(3) Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat<div>(a) Penanggulangan kedaruratan bidang Kesehatan Lingkungan</div></div></div></div> <div>Biasa/Terbuka</div> <div>Eselon IV</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Dinas Kesehatan</div>				

Biasa/Terbuka

Eselon IV

Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu

Dinas Kesehatan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(b) Fasilitas Kesehatan Masyarakat di daerah terpencil perbatasan kepulauan (c) Pelabuhan Sehat, Pasar Sehat, dan Kota Sehat (d) Penyehatan kawasan dan sanitasi dasar (4) Higiene Sanitasi Pangan (a) Makanan Jajanan (b) Restoran / Rumah Makan (c) Jasa Boga (d) Depot Air Minum (5) Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi (a) Medis Fasyankes (b) Limbah Medis (Free Mercury) (c) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) (d) Pengamanan Dampak kesehatan radiasi non pengion				
4	GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK A Gizi (1) Gizi Makro (a) Gerakan Nasional Sadar Gizi dalam rangka percepatan perbaikan gizi (1000 HPK, Stunting) (b) Pemantauan Pertumbuhan Anak (posyandu) (2) Gizi Mikro (a) Upaya penanggulangan masalah gizi mikro (GAKI (Gangguan (b) Manajemen Taburia (c) Upaya penanggulangan masalah gizi mikro lainnya (3) Gizi Klinik dan Dietetik (a) Pelayanan Gizi di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Instansi (b) Tatalaksana Anak Gizi Buruk (c) Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Lebih (4) Konsumsi Makanan dan Jasa Makanan (a) Makanan Pendamping ASI (b) ASI Eksklusif (c) Pedoman Gizi Seimbang (d) Makanan Bayi dan Anak	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(e) Buffer Stock Makanan Pendamping ASI				
	<div>(f) Makanan Tambahan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis dan Balita Gizi Kurang</div> <div>(g) Makanan Tambahan Anak Sekolah</div> <div>(5) Kewaspadaan Gizi</div> <div>(a) Surveilans Gizi</div> <div>(b) Epidemiologi Kasus Gizi Buruk</div> <div>(c) Penanganan Bidang Gizi dalam Situasi Bencana</div> <div>(d) Jejaring Informasi Pangan dan Gizi</div> <div>B Kesehatan Ibu</div> <div>(1) Kesehatan Ibu Hamil</div> <div>(a) Pelayanan Antenatal Terpadu</div> <div>(b) Pelayanan Kelas Ibu Hamil</div> <div>(c) Pencegahan Penularan HIV AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA)</div> <div>(2) Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas</div> <div>(a) Kemitraan Bidan dan Dukun</div> <div>(b) Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)</div> <div>(c) Supervisi Fasilitatif</div> <div>(3) Kesehatan Maternal Dengan Pencegahan Komplikasi</div> <div>(a) Audit Maternal Perinatal</div> <div>(b) Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)/Pemberdayaan Masyarakat</div> <div>(c) Tanda Bahaya pada Kehamilan</div> <div>(d) Surveilans Kematian Ibu</div> <div>(4) Keluarga Berencana</div> <div>(a) Pelayanan KB Pasca Persalinan</div> <div>(b) Pelatihan KB Pasca Persalinan</div> <div>(5) Perlindungan Kesehatan Reproduksi</div> <div>(a) Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT)</div> <div>(b) Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana (Paket Pelayanan Awal Minimal/PPAM Kespro)</div> <div>(c) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan</div>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(d) Pengarus Utamaan Gender Bidang Kesehatan (PUGBK)				
	<div>C Kesehatan Anak<div>(1) Kelangsungan Hidup Bayi<div>(a) Pelayanan Kesehatan Neonatal</div><div>(b) Manajemen Asfeksia</div><div>(c) Manajemen BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah)</div><div>(d) Pencegahan Infeksi</div></div><div>(2) Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah<div>(a) Pelatihan SDIDTK (Stimulasi Dini Interfensi Deteksi Tumbuh Kembang)</div><div>(b) Rujukan Tumbuh Kembang</div><div>(c) Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Komputer (ICATT)</div></div><div>(3) Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko<div>(a) Screening Hypotheroid Congenital</div><div>(b) Surveillance Kesehatan Anak</div><div>(c) Surveillance Kesehatan Bawaan</div></div><div>(4) Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja<div>(a) Tempat Penanganan Kesehatan Remaja di Rumah Sakit</div><div>(b) Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja</div><div>(c) Usaha Kesehatan Sekolah</div></div><div>(5) Perlindungan Kesehatan Anak<div>(a) Korban kekerasan terhadap anak</div><div>(b) Anak dengan disabilitas</div><div>(c) Anak terlantar/anak jalanan di panti</div><div>(d) Anak yang berhadapan dengan hukum di Lapas/Rutan</div><div>(e) Anak kelompok terasing/kelompok minoritas</div></div></div> <div>D Kesehatan Tradisional Alternatif, dan Komplementer<div>(1) Kesehatan Tradisional Keterampilan<div>(a) Akupresure</div><div>(b) Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional</div></div></div>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(c) Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan di Fasyankes (d) Pelayanan Tradisional Keterampilan Lainnya				
	(2) Kesehatan Tradisional Ramuan (a) Health Tourism (b) Peningkatan Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) (c) Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) (d) Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional (e) Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan di Fasyankes (3) Kesehatan Alternatif dan Komplementer (a) Akupunktur (b) Obat Herbal / Obat Tradisional (c) Integrasi Yankestrad (d) Pelayanan Alternatif Komplementer lainnya (4) Penapisan dan Kemitraan (a) Sentra Penerapan dan Pengembangan Pengobatan Tradisional (b) Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif dan (c) Penapisan Pengobat Tradisional Asing (d) Kemitraan Pengobatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer (e) Pengobat Tradisional (Lokal) (f) Asosiasi Pengobat Tradisional E Kesehatan Kerja dan Olahraga (1) Pelayanan Kesehatan Kerja (a) Penyakit Akibat Kerja (b) Pemeriksaan Kesehatan Pekerja (c) Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) (2) Kapasitas Kerja (a) Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (b) Kapasitas Kesehatan Kerja (c) TP ASI (3) Lingkungan Kerja (a) Pelayanan Kesehatan Kerja di KKP	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(b) K3 Perkantoran (c) K3 Rumah Sakit (d) K3 Puskesmas (e) Biomonitoring Efek Kesehatan (f) Review Pedoman Pengendalian Risiko Kesehatan				
5	(4) Kemitraan Kesehatan Kerja (a) Pengembangan Jabfung Pembimbing Kesehatan Kerja (b) Kesehatan nelayan (c) Integrasi pos UKK (d) Kabupaten/kota percontohan (e) Penguatan profesi (5) Kesehatan Perkotaan (a) Kawasan Kumuh dan Miskin Perkotaan (b) Forum Kota (6) Kesehatan Olahraga (a) Kebugaran Jasmani bagi Karyawan/Pekerja (b) Kebugaran Jasmani bagi Calon Jemaah Haji (c) Kebugaran Jasmani bagi Usia Sekolah (d) Olahraga bagi Ibu Hamil/Masa Nifas (e) Olahraga Bagi Usia Lanjut (f) Pelayanan Kesehatan Olahraga Masyarakat KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN A Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan, Pengelolaan, Analisis, Pemantauan & Evaluasi) (2) Pengadaan Obat (a) Pengadaan Vaksin Reguler (b) Obat <i>Esensial</i> (c) Obat Pelayanan Kesehatan Dasar, Kabupaten Kota dan Nasional (d) Obat Program Malaria (e) Obat Program Kesehatan Anak (f) Obat Program Kesehatan Ibu (g) Obat Program Gizi (h) Obat Anti Tuberkulosis (i) Obat Program Percepatan Pembangunan Kesehatan Tanah Papua	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(j) Obat dan Alat Kesehatan Haji Indonesia (k) Obat Penderita <i>Thalassemia</i> (l) Obat Psikotropika Generik (m) Obat <i>Anti Retro Viral</i> (3) Perbekalan Kesehatan (a) Gudang Farmasi (b) Kelengkapan Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan				
	(c) Pemusnahan Obat, Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan (d) Pengadaan Reagen Screening Darah (e) Obat <i>Buffer Stock</i> (f) Hasil <i>Stock Opname</i> Obat B Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan (1) Alat Kesehatan (a) Alat kesehatan (b) Kependium alat kesehatan (c) Pelabelan alat kesehatan dan PKRT (d) Post Market & Surveillance alat kesehatan (e) Produk alat kesehatan elektromedik (f) Produk alat kesehatan non elektromedik (2) Produsen dan Distributor Alat Kesehatan dan Obat (a) Industri Farmasi (b) Pedagang Besar Farmasi (c) Pedagang Eceran Obat (d) Penyalur Alat Kesehatan (e) Toko Alat Kesehatan (f) Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan (3) Produk Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (a) Produk Diagnostik In Vitro (b) Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) (c) PKRT Klas III (d) PKRT Klas I dan II (e) Perusahaan Rumah Tangga PKRT (f) Penggunaan Pestisida Di Rumah Tangga (g) Post Market & Surveillance PKRT	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	C Kefarmasian (Standarisasi, klinis, komunitas dan Obat Tradisional) (4) Penggunaan Obat Rasional (a) Obat Rasional (b) Informasi Obat (c) Kefarmasian untuk Terapi Antibiotik (d) Pemantauan Terapi Obat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan
	D Produksi dan Distribusi Kefarmasian (1) Obat Tradisional (a) Farmakope Indonesia (b) Farmakope Herbal Indonesia (c) Suplemen I Farmakope Indonesia (d) Suplemen II Farmakope Indonesia (e) Suplemen II Farmakope Indonesia (f) Suplemen I Farmakope Herbal Indonesia (g) Suplemen II Farmakope Herbal Indonesia (h) Suplemen III Farmakope Herbal Indonesia (i) Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) (j) Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT) (k) Usaha Jamu Gendong (UJG) (l) Usaha Jamu Racik (UJR) (m) Farmakope Herbal Indonesia & Suplemennya Versi Bahasa Inggris (2) Kosmetik dan Makanan (a) Keamanan Pangan (b) Kosmetika bagi Petugas (c) Industri Rumah Tangga bagi Petugas (d) Makanan Jajanan Anak Sekolah (e) Kodeks Kosmetika Indonesia (f) Materia Kosmetika Bahan Alam Indonesia	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan
7	PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN A Pencegahan, Mitigasi,Kesiapsiagaan (1) Pencegahan dan Mitigasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(2) Kesiapsiagaan B Tanggap Darurat dan Pemulihan (1) Tanggap Darurat (2) Pemulihan C Pemantauan dan Informasi (1) Pemantauan (2) Informasi D Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam bidang Pengendalian Penyakit E Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana				
8	PENGEMBANGAN DAN JAMINAN KESEHATAN A Tersedianya data NHA Setiap Tahun B Tersedianya dokumen Teknis Penguatan Pelaksanaan JKN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan
9	KESEHATAN HAJI A Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji (1) Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji (2) Pelayanan Kesehatan jamaah Haji kab/kota (3) Klaim Pelayanan Kesehatan di Embarkasi/Debarkasi atau KKP (4) Pelayanan Kesehatan Embarkasi (5) Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) (6) Rekrutmen Tenaga Musiman B Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji (1) Advokasi dan Kemitraan Pembinaan Kesehatan Haji (2) Kesehatan Haji di Kab/kota (3) Kesehatan Haji Terpadu (4) Pemeriksaan Jasa Boga Catering Jemaah Haji (5) Vaksinasi jamaah Haji (6) Sanitasi Asrama Haji (7) Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Indonesia dan Arab Saudi	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
10	PROMOSI KESEHATAN A Sarana Promosi Kesehatan (1) Booklet (2) Poster (3) Leaflet	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(4) Pamflet (5) Lembar Balik (6) Selebaran (7) Buletin (8) Festival (9) Lomba (10) Pameran (11) Seminar (12) Iklan Layanan Masyarakat (13) Film				
	(14) Radio Spot				
	B Pembinaan Advokasi dan Kemitraan serta Pemberdayaan Peran (1) Saka Bhakti Husada (2) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (3) Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Kesehatan (4) Kawasan Tanpa Rokok (5) Kerjasama dengan Swasta dibidang Kesehatan (6) Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan (7) Koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor di Bidang Kesehatan (8) Peran Serta Kader PKK dan Dasawisma dalam Mendukung Kesehatan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan
	C Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan (1) Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan (2) Kampanye Promosi Kesehatan (3) Video Animasi Promosi Kesehatan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan
	D Hari Kesehatan (1) Hari Kesehatan Nasional (2) Hari Kesehatan Dunia (3) Hari tanpa Tembakau se-Dunia (4) Hari-hari Besar Kesehatan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan
11	DATA DAN INFORMASI	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang	Dinas Kesehatan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	A Statistik Kesehatan (1) Statistik Derajat dan Upaya Kesehatan (2) Statistik Lingkungan dan Sumber Daya Kesehatan B. Analisis dan Diseminasi Informasi (1) Analisis Data Kesehatan (2) Diseminasi Informasi Kesehatan C Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data Kesehatan (1) Pengembangan Sistem Informasi (2) Bank Data			mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	
	D Identitas Penderita HIV/AIDS	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan
	E Dokumen Rekam Medis Termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan
	F Laporan Kasus/Diagnosis Penyakit Pasien	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan
	G Identitas Subjek Penelitian Dalam Rangka Pengembangan Kesehatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan
	H Rahasia Kedokteran, Yaitu Penemuan Dokter Dalam Rangka Pengobatan dan Dicatat Dalam Rangka Medis	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan
	I Hasil Audit Medik Pada Sarana Kesehatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	J Hasil Audit Terkait Dengan Medical Error	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan
	K Pelepasan Informasi Medis Untuk Kepentingan Klaim Asuransi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dinas Kesehatan
XVI	URUSAN PEMERINTAH DAERAH				
1	KEBIJAKAN Kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan dalam negeri , kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, otonomi daerah, bina pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil serta keuangan daerah	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	Kesbang Pol
2	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK A Pembinaan ideologi dan Pengendalian 1) Pembinaan ideologi Pancasila, kesatuan bangsa, organisasi sosial politik dan kemasyarakatan 2) Laporan keadaan politik 3) Pemberlakuan keadaan bahaya dan jam malam (a) Pemberitahuan (b) Ketentuan pelaksanaan (c) Pengawasan 4) Monitoring dan evaluasi mengenai keadaan IPOLEKSOSBUD B Pembinaan Partai Politik 1) Data dan kepengurusan parpol 2) Agenda kerja aktivitas parpol 3) Monitoring kegiatan parpol C Pengawasan Organisasi Terlarang 1) Pendirian, pembubaran dan pengawasan partai/organisasi terlarang	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	Kesbang Pol
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	Kesbang Pol
		Rahasia		Menimbulkan kerugian yang serius terhadap Privacy, keuntungan	Kesbang Pol

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	<div>2) Daftar dan data pengurus anggota partai/organisasi terlarang</div> <div>3) Pemutihan bagi anggota partai/organisasi terlarang</div> <div>4) Izin meninggalkan tempat atau pindah domisili bagi anggota partai/organisasi terlarang</div> <div>5) Daftar organisasi terlarang</div> <div>6) Laporan mengenai organisasi terlarang</div> <div>D Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan</div> <div>Organisasi kemasyarakatan terdiri dari organisasi berdasarkan kesamaan kegiatan dan agama/kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa</div>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	<div>kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu</div>	Kesbang Pol
	<div>E Pembinaan Wawasan Kebangsaan</div> <div>F Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu dan PILKADA</div> <div>1) Fasilitasi pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden</div> <div>2) Fasilitasi pelaksanaan pemilu anggota legislatif</div> <div>3) Fasilitasi pemilihan kepala daerah</div> <div>4) Daftar organisasi peserta pemilu (OPP)</div> <div>5) Fasilitasi pendaftaran pemilih sampai dengan penetapan daftar pemilih</div> <div>6) Fasilitasi pengamanan dan pengendalian masa kampanye</div> <div>7) Fasilitasi dan mediasi sengketa pemilu/PILKADA</div> <div>G Penanganan Konflik Terorisme</div> <div>Data narapidana teroris pada lembaga pemasyarakatan</div> <div>H Kegiatan Intelijen Terkait Dengan Ideologi, Politik, Sosial, Budaya dan Keamanan Serta Penanganan Kasus Yang Mengganggu Masyarakat</div> <div>1) Penanganan Terorisme</div>	<div>Biasa/Terbuka</div> <div>Biasa/Terbuka</div> <div>Rahasia</div> <div>Rahasia</div>	<div>Eselon IV</div> <div>Eselon IV</div>	<div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Menimbulkan kerugian yang serius terhadap Privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi</div> <div>Menimbulkan kerugian yang serius terhadap Privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan</div>	<div>Kesbang Pol</div> <div>Kesbang Pol</div> <div>Kesbang Pol</div> <div>Kesbang Pol</div>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
3	2) Arsip daftar orang yang masuk G 30 S PKI dan organisasi terlarang lainnya 3) Data narapidana teroris pada lembaga pemasyarakatan PEMERINTAHAN UMUM A Lambang 1) Sayembara 2) Penetapan penggunaan lambang 3) Ketentuan mengenai lambang pada logo, pataka bentuk dinas, lembaga dan organisasi lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	reputasi Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	Bagian Pemerintahan
	B Pemerintah Pusat 1) Susunan kabinet (a) Pengangkatan menteri (b) Penunjukan menteri (c) Amanat menteri 2) Dewan pertimbangan otonomi daerah (a) Pembantuan keanggotaan (b) Sekretariat DPOD C Pemerintah Daerah 1) Pembentukan, pemekaran, peningkatan, pemecahan dan penghapusan wilayah daerah 2) Penyelesaian sengketa batas wilayah 3) Administrasi dan dokumentasi perbatasan antar wilayah 4) Pemindahan pusat Pemerintahan 5) Pemberian, penggantian/perubahan nama wilayah 6) Kerjasama antara daerah 7) Pencalonan, pengusulan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala daerah/Wakil kepala daerah 8) Pencalonan, pengusulan, pengesahan, pengangkatan dan	Biasa/Terbuka Rahasia Rahasia Rahasia Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas Terbatas	Eselon IV Eselon II Eselon II Eselon II Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu Menimbulkan kerugian yang serius terhadap Privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah	Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
4	pemberhentian Anggota DPRD			fungsi pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	
	9) Pencalonan, pengusulan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah	Terbatas	Eselon III		
	10) Data anggota DPRD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Pemerintahan
	11) Data rancangan-rancangan keputusan DPRD	Terbatas	Eselon III		
	12) Catatan-catatan, Notulen, Risalah rapat yang dinyatakan tertutup	Terbatas	Eselon III		
	13) Laporan pertanggung jawaban Kepala Daerah	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	Bagian Pemerintahan
	14) Pembinaan lembaga perangkat adat	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
4	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
	A Data dan Informasi Pemberdayaan Masyarakat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPMD
	B Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPMD
	C Naskah Ujian Tertulis Bagi Bakal Calon Kepala Desa, Perangkat Desa, Maupun Aparatur Pemerintah Lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPMD
	D Pembinaan Lembaga Masyarakat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPMD
	E Pembinaan Sumber Daya Manusia				
	1) Latihan Pembangunan Desa Terpadu (LPDT)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPMD
	2) Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)				
	F Pembinaan Partisipasi Masyarakat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPMD
	1) Data Proyek Masyarakat				
	2) Peningkatan Asosiasi LPM				
	G Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang	DPMD

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	H Pemberdayaan Perempuan dan PKK	Biasa/Terbuka	Eselon IV	mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPMD
	I Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Penanggulangan Kesehatan, HIV, AIDS, LB, Bencana Alam, Narkoba, Masalah Sosial	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPMD
	J Pembinaan Anak Remaja 1) Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan 2) Pembinaan Program Pasca Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPMD
	K Pembinaan Usaha Ekonomi Keluarga 1) Bantuan Pembangunan (a) Program pembangunan desa (b) Program pengembangan kecamatan (c) Program pengentasan kemiskinan (penyaluran raskin) (d) Dana tentang lokasi PKK dan bantuan pembangunan desa/kelurahan 2) Usaha Keluarga (a) Usaha kecil, jasa, kerajinan dan agrobisnis (b) Usaha kecil menengah dan koperasi (c) Bantuan stimulan (Swasta dan Pemerintah) (d) Optimalisasi hasil kerja/mandiri (e) Penanggulangan kemiskinan (KPK) 3) Data Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Keluarga, Hasil Usaha Masyarakat 4) Bantuan Perkreditan (a) Pembinaan usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP)	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan	DPMD DPMD DPMD DPMD

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
5	(b) Data usaha simpan pinjam URUSAN KEPENDUDUKAN , PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA A Perencanaan Umum dan Program Kependudukan 1) Pendaftaran Pendudukan Meliputi : (a) Formulir biodata penduduk (b) Formulir permohonan, perpanjangan pembaharuan KTP, KK dan # Mutasi penduduk pengawasan KTP dan Mutasi penduduk (c) Formulir permohonan, perlindungan dokumen KTP, KK dan akta-akta adopsi, perubahan penggantian nama, pemalsuan dokumen, pendidikan, sensus kependudukan, warga negara asing	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DISDUKCAPIL
	(d) Pengangkatan pejabat luar biasa catatan sipil dan pembantunya (e) Pendaftaran dan perpindahan penduduk WNA (f) Pendaftaran dab perpindahan WNI (g) Pendaftaran dan perpindahan penduduk pengungsi dan rentan, akibat bencana alam, kerusakan soaial, daerah terbelakang (h) Proses pengangkatan pejabat luar biasa, pencatatan sipil dan pembantunya B Pencatatan Sipil 1) Pencatatan Sipil Meliputi (a) Formulir permohonan akta kelahiran perkawinan, perceraian, ganti perubahan nama kenal lahir/mati, adopi, pendidikan sensus kependudukan perubahan pengganti nama, pemalsuan dokumen (b) Akta kelahiran dan kematian (c) Kasus-kasus nikah cerai, rujuk yang meliputi penyelesaian dan	Biasa/Terbuka Rahasia Terbatas	Eselon IV Eselon II Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu Menimbulkan kerugian yang serius terhadap Privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi Memiliki dampak yang dapat	DISDUKCAPIL DISDUKCAPIL

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	laporannya			mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISDUKCAPIL
	(d) Kewarganegaraan WNA meliputi, permohonan, kelengkapan persyaratan dan penetapannya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DISDUKCAPIL
	(e) Data dan informasi mengenai pencatatan pewarganegaraan non perkawinan dan kelahiran	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DISDUKCAPIL
	(f) Catatan kelahiran dan kematian	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DISDUKCAPIL
	(g) Catatan perkawinan dan perceraian agama islam	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	(h) Catatan perkawinan dan perceraian non islam	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	(i) Catatan perkawinan dan perceraian advokasi perkawinan dan perceraian	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	(j) Indentifikasi dan investarisasi sistem, prosedur dan standar pelayanan pencatatan pengangkatan pengakuan, pengesahan anak, perubahan dan pembatalan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DISDUKCAPIL
	(k) Catatan tentang pengangkatan, pengakuan, pengesahan anak, perubahan dan pembatalan akta	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DISDUKCAPIL
	(l) Data dan informasi tentang pencatatan kewarganegaraan akibat perkawinan, kelahiran dan non perkawinan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DISDUKCAPIL
	(m) Kebijakan dan pedoman teknis pencatatan kewarganegaraan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DISDUKCAPIL
	(n) Bahan-bahan monitoring, pemantauan dan evaluasi pencatatan sipil	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	(o) Sistem dokumentasi pencatatan sipil	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DISDUKCAPIL
	C Informasi Kependudukan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DISDUKCAPIL
	1) Pengembangan perakat lunak, keras dan jaringan komunikasi data				
	2) Fasilitas teknis pengembangan perangkat lunak, keras, jaringan komunikasi data				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	3) Manual teknis pengolahan data pendaftaran penduduk dan catatan sipil, daerah maju / berkembang 4) Kebijakan dan pedoman teknis pengolahan data pendaftaran penduduk, biodata, NIK, KTP dan KK 5) Manual teknis pengolahan data kejadian vital meliputi kelahiran, kematian, kedatangan dan perpindahan penduduk 6) Manual teknis pengolahan data penduduk dan non registrasi 7) Manual teknis pengolahan sistem pelayanan media elektronik cetak dan outlet 8) Fasilitas pelayanan media elektronik, cetak dan outlet 9) Bahan-bahan monitoring, pemantauan dan evaluasi informasi kependudukan 10) Sistem dokumentasi informasi kependudukan				
	D Perkembangan Penduduk 1) Struktur dan komposisi penduduk 2) Fertilitas, kesehatan dan reproduksi 3) Morbilitas dan mortalitas penduduk dan fasilitas 4) Data kuantitas penduduk 5) Data kualitas penduduk 6) Pengembangan kualitas anak, remaja, penduduk usia produktif dan lanjut usia 7) Data informasi pengembangan kualitas penduduk 8) Penataan persebaran penduduk antara wil sementara dan migran non permanen 9) Data dan informasi persebaran penduduk 10) Telaahan dan pengkajian sistem perlindungan dan pemberdayaan penduduk 11) Penataan penduduk sementara dan non migran permanen	Terbatas Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon III Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DISDUKCAPIL DISDUKCAPIL DISDUKCAPIL DISDUKCAPIL DISDUKCAPIL

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	12) Manual teknis perlindungan penduduk 13) Telaahan dan kajian pengelolaan kelembagaan pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan sosial budaya 14) Manual teknis pelayanan kelembagaan pemberdayaan masyarakat ekonomi dan sosial budaya 15) Telaahan dan pengkajian pengembangan wawasan kependudukan melalui pendidikan jalur sekolah, luar sekolah dan masyarakat E Proyeksi dan Penyesuaian Kebijakan Kependudukan 1) Telaahan dan pengkajian pengembangan, dokumentasi, pemanfaatan data kependudukan 2) Kebijakan dan pedoman teknis kependudukan 3) Telaahan dan pengkajian implikasi, analisis, struktur dan komposisi, pemanfaatan proyeksi penduduk	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon III Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DISDUKCAPIL DISDUKCAPIL DISDUKCAPIL
	4) Data, informasi dan dokumentasi proyeksi penduduk 5) Klasifikasi dan pedoman teknis proyeksi penduduk 6) Telaahan dan pengkajian dampak kependudukan advokasi dan standarisasi 7) Kebijakan dan pedoman teknis analisis dampak kependudukan 8) Telaahan dan pengkajian penyerasian lembaga usaha swasta, masyarakat dan mitra Internasional 9) Penyelesaian lembaga pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota 10) Kebiajakn dan pedoman teknis penyelesaian kelembagaan F Kewarganegaraan Asing 1) Laporan jumlah WNI keturunan asing	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan	DISDUKCAPIL DISDUKCAPIL DISDUKCAPIL DISDUKCAPIL DISDUKCAPIL

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	G Keluarga Berencana 1) Kebijakan yang ada hubungannya dengan program Keluarga Berencana 2) Pengadaan prasarana dan sarana untuk Keluarga Berencana gedung/bangunan, sarana mobilitas dan sarana lainnya 3) Penghargaan terhadap KB lestari 4) Pembinaan Keluarga Berencana 5) Laporan peserta KB (a) Penggunaan alat kontrasepsi KB, spiral IUD, pil, kondom, sterilisasi/vasektomi 6) Data/hasil evaluasi mengenai pelaksanaan KB 7) Hasil pertemuan, seminar, survei ilmiah KB 8) Laporan kasus masalah KB 9) Laporan umum pelaksanaan program KB	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DISDUKCAPIL
XVII	URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
1	KEBIJAKAN BERSIFAT PENGATURAN A Kebijakan tentang pendidikan dan Pengajaran meliputi: kurikulum, pendidikan anak usia dini, non formal dan informal, pendidikan dasar, menengah, atas dan pendidikan tinggi B MoU (Memorandum of Understanding)	Biasa/Terbuka Terbatas	Eselon IV Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DPDK DPDK
2	KEBIJAKAN BERSIFAT PENETAPAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
3	PEMBINAAN PENDIDIKAN A Pendidikan anak usia dini, non formal dan informal (1) Paud (a) Bahan ajar - Alat permainan edukatif	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(b) Pelatihan (c) <i>Block Grant</i> (d) Sosialisasi (e) Peringatan hari anak nasional (2) Pendidikan masyarakat (a) Penyelenggaraan program - Bahan ajar - Penyusunan majalah (b) Pemberian bantuan sosial - Penilaian proposal - Pemberian bansos (c) Pembinaan program - Temu koordinasi - Bintek program/pendampingan - Peningkatan kapasitas kelembagaan (d) Lomba, penghargaan, dan anugerah (e) Peringatan hari anak nasional (f) Pameran/publikasi/sosialisasi				
	(3) Kursus dan pelatihan (a) Per Penyelenggaraan program - Uji kompetensi (akreditasi) - Penilaian dan penetapan kinerja lembaga kursus dan pelatihan (LKP) - Pendataan lembaga kursus dan pelatihan - Penguatan kerja sama dengan lembaga/mitra (b) Pemberian bantuan sosial (c) Pembinaan program: bintek, orientasi teknis, dan temu karya (d) Standar kursus dan pelatihan - Kurikulum - Bahan ajar (e) Lomba lembaga kursus berprestasi (f) Publikasi dan promosi kursus (g) Sertifikasi (4) Pendidik dan tenaga pendidikan (a) Bahan ajar (b) <i>Block grant</i>				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	<div>(c) Sosialisasi (modul)</div> <div>(d) Data pendidik dan tenaga pendidik</div> <div>B Pendidikan dasar</div> <div>(1) Sekolah dasar</div> <div>(a) Kurikulum</div> <div>(b) Bahan ajar</div> <div>(c) Pelatihan</div> <div>(d) <i>Block grant</i></div> <div>(e) Bimbingan teknis/sosialisasi</div> <div>(f) Lomba, sayembara, dan festival</div> <div>(g) Bantuan operasional sekolah [BOS]</div> <div>(h) Bantuan siswa miskin</div> <div>(2) Sekolah menengah pertama</div> <div>(a) Kurikulum</div> <div>(b) Bahan ajar</div> <div>(c) Pelatihan</div> <div>(d) <i>Block grant</i></div> <div>(e) Bimbingan teknis/sosialisasi</div>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
	<div>(f) Lomba, sayembara, dan festival</div> <div>(g) Bantuan operasional sekolah [BOS]</div> <div>(h) Bantuan siswa miskin</div> <div>(3) Pendidikan khusus-layanan khusus/PK-LK</div> <div>(a) Bahan ajar</div> <div>(b) Petunjuk teknis</div> <div>(c) <i>Block grant</i></div> <div>(d) Sosialisasi</div> <div>(e) Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore</div> <div>(f) Kurikulum/bahan pembelajaran</div> <div>(g) Alat bantu pembelajaran</div> <div>(h) Pendataan</div> <div>(i) Kelembagaan</div> <div>- Unit kesehatan sekolah</div> <div>- Pendidikan jasmani adaptif</div> <div>- Pendidikan inklusi</div> <div>- <i>Block grant</i></div> <div>- Bimbingan teknis/sosialisasi</div>				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	<p>- Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore</p> <p>(4) Pendidik dan tenaga pendidik</p> <p>(a) Pendataan dan pemetaan</p> <p>(b) Pembinaan guru dan tenaga pendidik</p> <p>(c) Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik (standar, uji, dan sertifikasi kompetensi)</p> <p>(d) Penilaian prestasi kerja (angka kredit) guru, dan pengawas sekolah</p> <p>(e) Penghargaan guru dan tenaga kependidikan</p> <p>(f) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan</p> <p>(g) <i>Block grant</i></p> <p>(h) Bimbingan teknis/sosialisasi</p> <p>C Pendidikan menengah</p> <p>(1) Sekolah menengah atas dan SMK</p> <p>(a) Kurikulum</p> <p>(b) Bahan ajar</p> <p>(c) Pelatihan</p> <p>(d) <i>Block Grant</i></p>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
	<p>(e) Bimbingan teknis/sosialisasi</p> <p>(f) Lomba, sayembara, dan festival</p> <p>(g) Bantuan operasional sekolah [BOS]</p> <p>(h) Bantuan siswa miskin</p> <p>(2) Pendidikan khusus-layanan khusus/PK-LK</p> <p>(a) Bahan ajar</p> <p>(b) Petunjuk teknis</p> <p>(c) <i>Block grant</i></p> <p>(d) Sosialisasi</p> <p>(e) Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore</p> <p>(f) Kurikulum/bahan pembelajaran</p> <p>(g) Alat bantu pembelajaran</p> <p>(h) Pendataan</p> <p>(i) Kelembagaan</p> <p>- Unit kesehatan sekolah</p> <p>- Pendidikan jasmani adaptif</p> <p>- Pendidikan inklusi</p>				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	<div><div><div>- <i>Block grant</i></div><div>- Bimbingan teknis/sosialisasi</div><div>- Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore</div></div><div>(3) Pendidik dan tenaga pendidik</div><div><div>(a) Pendataan dan pemetaan</div><div>(b) Pembinaan guru dan tenaga pendidik</div><div>(c) Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik (standar, uji, dan sertifikasi kompetensi)</div><div>(d) Penilaian prestasi kerja (angka kredit) guru, dan pengawas sekolah</div></div><div><div>(e) Penghargaan guru dan tenaga kependidikan</div><div>(f) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan</div><div>(g) <i>Block grant</i></div><div>(h) Bimbingan teknis/sosialisasi</div></div><div>D Naskah Ujian Nasional dan Ujian Sekolah/Lembaga</div></div>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DPDK Prov. Kalsel
4	E Proses Scanning Lembar Hasil Ujian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DPDK Prov. Kalsel
	F Proses Pengelolaan Data Peserta Didik, Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) dan Sarana Prasarana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DPDK Prov. Kalsel
	KEBUDAYAAN				
	A Pelestarian cagar budaya dan permuseuman				
	(1) Registrasi nasional	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
	(a) Pendaftaran dan penetapan				
	(b) Pengelolaan data				
	(2) Pelindungan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
	(a) Perizinan dan pengamanan				
	(b) Pemeliharaan dan pemugaran				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(3) Pengembangan dan pemanfaatan (a) Pengembangan (b) Pemanfaatan (4) Eksplorasi dan dokumentasi (a) Eksplorasi cagar budaya (b) Dokumentasi cagar budaya dan koleksi museum (c) kebudayaan dan pariwisata B Pembinaan kesenian dan perfilman (1) Pembinaan seni pertunjukan (a) Seni pertunjukan tradisional (b) Seni pertunjukan nontradisional (2) Pembinaan seni rupa (a) Seni rupa murni (b) Seni rupa terapan	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon III Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK DPDK DPDK DPDK DPDK
	(3) Pembinaan literasi dan apresiasi film (a) Literasi (b) Apresiasi (4) Dokumentasi dan publikasi (a) Dokumentasi seni dan film (b) Publikasi seni dan film C Pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi (1) Kelembagaan dan kepercayaan (a) Pemberdayaan lembaga (b) Hubungan antar lembaga (2) Komunitas kepercayaan (a) Komunitas adat (b) Upacara adat (3) Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(a) Pengetahuan tradisional (b) Ekspresi budaya tradisional (4) Lingkungan budaya dan pranata sosial (a) Lingkungan budaya (b) Pranata sosial D Sejarah dan nilai budaya (1) Sejarah (a) Penggalian sumber sejarah (b) Penulisan sejarah (2) Pemetaan nilai (a) Pemetaan (b) Klasifikasi (3) Verfikasi dan perumusan nilai (a) Verifikasi nilai (b) Perumusan nilai (4) Dokumentasi dan publikasi (a) Dokumentasi sejarah dan nilai budaya (b) Publikasi sejarah dan nilai budaya E Internalisasi nilai dan diplomasi budaya (1) Internalisasi nilai budaya (a) Pengemasan nilai budaya (b) Penanaman nilai budaya (2) Kekayaan budaya (a) Pencatatan kekayaan budaya (b) Penetapan kekayaan budaya (3) Warisan budaya nasional dan dunia (a) Warisan budaya benda (b) Warisan budaya takbenda (4) Diplomasi budaya (a) Diplomasi dalam negeri (b) Diplomasi luar negeri	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
5	KURIKULUM A Pembinaan kurikulum B Hasil evaluasi penyusunan kurikulum	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
6	PERBUKUAN A Penyusunan standar mutu buku B Pengumpulan naskah C Penilaian mutu buku dan pemilihan D Persetujuan dan pengesahan naskah E Penerbitan/pencetakan F Master buku/naskah yang dicetak G Distribusi buku H Pengembangan naskah I Pengkajian buku	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
7	PENILAIAN PENDIDIKAN A Penilaian akademik B Penilaian non akademik C Analisis dan sistem informasi penilaian	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
8	PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA A Pengembangan dan pelindungan (1) Pengkajian (a) Bahasa (b) Sastra (2) Pembakuan dan pelindungan (3) Informasi dan publikasi B Pembinaan dan pemasyarakatan (1) Pemasyarakatan (a) Penyuluhan (b) Bantuan teknis C Pembelajaran (a) Proses pembelajaran (b) Pembinaan tenaga kebahasaan dan kesusasteraan D Peningkatan dan pengendalian (a) Peningkatan fungsi dan peran (b) Pengendalian penggunaan bahasa	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
9	PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	A Pengembangan profesi pendidik (1) Peningkatan kompetensi (a) Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal (b) Pengembangan profesi pendidikan dasar (c) Pengembangan profesi pendidik pendidikan menengah dan kejuruan (2) Sertifikasi (a) Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal (b) Pengembangan profesi pendidikan dasar (c) Pengembangan profesi pendidik pendidikan menengah dan kejuruan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
	B Pengembangan tenaga kependidikan (1) Program (a) Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik (b) Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai (2) Evaluasi (a) Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik (b) Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
	C Pengembangan SDM kebudayaan (1) Program (a) Peningkatan kompetensi (b) Sertifikasi (2) Evaluasi (a) Peningkatan kompetensi (b) Sertifikasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
	D Penjaminan mutu pendidikan (1) Pemetaan mutu (a) Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal (b) Penjaminan mutu pendidikan dasar (c) Penjaminan mutu pendidikan menengah dan kejuruan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
10	(2) Sistem informasi (a) Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal (b) Penjaminan mutu pendidikan dasar (c) Penjaminan mutu pendidikan menengah dan kejuruan				
	E Penyusunan materi/SOP/instrumen/panduan/pedoman (1) Proposal/TOR/KAK	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
	F Penyelenggaraan pelatihan/diseminasi/sosialisasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
	G Penyelenggaraan bimtek/monitoring dan evaluasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
	H Lomba/sayembara/festival/olimpiade pendidikan nasional internasional	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN A Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film (1) Perancangan dan produksi (2) Penyiaran dan pengendalian	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
11	B Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis multimedia dan <i>web</i> (1) Perancangan dan produksi (2) Aplikasi dan pengendalian	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
	C Pengembangan jejaring (1) Pengkajian dan perancangan (2) Pemeliharaan dan pengendalian	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
	DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN A Data peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan (1) Validasi dan integrasi data peserta didik	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan	DPDK

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	(2) Validasi dan integrasi data peserta pendidik dan tenaga kependidikan			Kab. Tanah Bumbu	
	B Data satuan pendidikan dan proses pembelajaran (1) Validasi dan integrasi data satuan pendidikan (2) Validasi dan integrasi data proses pembelajaran	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
	C Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik (1) Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik anak (2) Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dasar	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
12	ARKEOLOGI				
	A Program dan kerja sama penelitian (1) Program (2) Kerja sama	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
	B Data dan informasi penelitian (1) Data (2) Informasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
13	MONITORING DAN EVALUASI	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
XVIII	URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
1	Pemberdayaan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda : A Seleksi Pertukaran Pemuda Antara Negara (PPAN) dan Kapal Pemuda Nusantara B Paduan suara dalam rangka HUT RI dan hari - hari besar nasional	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
2	Peningkatan Wawasan, Iptek dan Imtaq Pemuda : A Peningkatan iman dan taqwa B Sosialisasi kebijakan kepemudaan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
3	Peningkatan Kapasitas dan Kreatifitas Pemuda : A Sarjana dan pemuda penggerak pembangunan pendidikan (SP4) B Napak tilas	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
4	Kepemimpinan, Kepeloporan, kepramukaan dan Organisasi Kepemudaan A Pelatihan Paskibraka tingkat Provinsi B Peningkatan wawasan kepaskibrakaan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
5	Pengembangan Standarisasi dan Infastruktur Pemuda : A Pelatihan Satgas bencana bagi Pramuka dan pemuda B Kepeloporan pemuda daerah	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
6	Kewirausahaan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda : A Seleksi Paskibraka tingkat Provinsi dan Nasional B Pengembangan sarana kewirausahaan pemuda	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
7	Pengelolaan Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga A Pengembangan dan pembibitan olahragawan (Sentra Olahraga) B Pembinaan dan pengembangan PPLP	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
8	Pengembangan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus : A Festival pencak silat/kuntaw tingkat Provinsi B Pelestarian olahraga permainan tradisional C Festival Olahraga Rekreasi Daerah (FORDA) tingkat Provinsi D Peringatan HAORNAS	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
9	Kemitraan dan Penghargaan Olahraga : A Jalan sehat HUT RI dan hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan B Lomba gerak jalan 17,8,45 Km tingkat Provinsi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
10	Pembibitan da Tenaga Olahraga A POPDA Paralympic (Soina) B Pembibitan dan pembinaan olahraga Paralympic Berbakat (PEPARDA) C Kompetisi sepak bola pelajar, tenis lapangan, tenis meja, angkat besi, dayung, judo, taekwondo, bola voli, atlentik dan panahan D Keberangkatan Kontogen pekan olahraga pelajar wilayah /Nasional	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
11	(POPWIL/POPONAS) E Pembibitan dan pembinaan olahraga berbakat (POPDA) Peningkatan Tenaga dan Organisasi Olahraga : A Grand design keolahragaan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	DPDK
12	Standarisasi Sarana dan Prasarana Olahraga : A Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana B Peningkatan lapangan tenis pelajar Kalimantan Selatan	Rahasia	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap Privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	DPDK
XIX	URUSAN AGAMA				
1	Kebijakan Keagamaan Meliputi Kebijakan di Bidang Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Budha, Kerukunan Umat Beragama dan Penyelenggaraan Haji dan Umroh	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	Bagian Kesra Setda
2	Bimbingan Masyarakat Islam A Wakaf 1) Permohonan lain tukar menukar Tanah Wakaf (Ruislah)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	Bagian Kesra Setda
	2) Permohonan penunjukan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Uang	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	Bagian Kesra Setda
	3) Bantuan Pengembangan Wakaf Produktif	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Kesra Setda
	4) Bantuan Sertifikasi Tanah Wakaf	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	
	5) Pendataan Wakaf	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu	Bagian Kesra Setda
	6) Akta Ikrar Wakaf	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Kesra Setda

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6
	<div>7) Formulir Wakaf</div> <div>8) Surat Pengesahan Nadzir Wakaf</div> <div>B Zakat</div> <div>1) Bimbingan dan pembinaan Lembaga Zakat</div> <div>2) Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat</div> <div>C Rumah ibadah</div> <div>1) Bantuan pengelola rumah ibadah</div> <div>2) Bantuan rumah ibadah</div> <div>3) Penyuluhan dan bimbingan kemasjidan</div>	<div>Biasa/Terbuka</div> <div>Biasa/Terbuka</div> <div>Biasa/Terbuka</div> <div>Biasa/Terbuka</div> <div>Terbatas</div> <div>Biasa/Terbuka</div>	<div>Eselon IV</div> <div>Eselon IV</div> <div>Eselon IV</div> <div>Eselon IV</div> <div>Eselon III</div> <div>Eselon IV</div>	<div>mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu</div>	<div>Bagian Kesra Setda</div> <div>Bagian Kesra Setda</div> <div>Bagian Kesra Setda</div> <div>Bagian Kesra Setda</div> <div>Bagian Kesra Setda</div> <div>Bagian Kesra Setda</div>
	<div>D Kerukunan umat beragama</div> <div>1) Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)</div> <div>E Event Keagamaan</div> <div>1) Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ)</div> <div>2) Seleksi Tilawatil Quran (STQ)</div> <div>3) Dharma Gita</div> <div>4) Pesparawi</div> <div>F Penyelenggaraan Haji dan Umroh</div> <div>1) Penetapan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD)</div>	<div>Biasa/Terbuka</div> <div>Biasa/Terbuka</div> <div>Terbatas</div>	<div>Eselon IV</div> <div>Eselon IV</div> <div>Eselon III</div>	<div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div>	<div>Bagian Kesra Setda</div> <div>Bagian Kesra Setda</div> <div>Bagian Kesra Setda</div>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
I	FUNGSI KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN PEJABAT NEGARA				
	1 FORMASI PEGAWAI a. Usulan dari Unit Kerja SKPD, disertai: 1) analisa jabatan 2) beban kerja b. Usulan Permintaan Formasi kepada Menpan dan RB dan Kepala BKN c. Persetujuan Menpan dan RB d. Penetapan Formasi ASN e. Penetapan Formasi Khusus	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
	2 PENGADAAN PEGAWAI a. Proses Penerimaan Pegawai meliputi: 1) Pengumuman 2) Seleksi Administrasi 3) Pemanggilan Peserta Test 4) Pelaksanaan Ujian Tertulis 5) Keputusan Hasil Ujian 6) Wawancara b. Penetapan Pengumuman Kelulusan c. Berkas Lamaran yang tidak diterima d. Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP 1) Surat Lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan Kesehatan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
3	e. Nota Usul Pengangkatan CASN menjadi ASN lebih dari 2 tahun	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
	f. SK CASN/ASN Kolektif	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
	PEMBINAAN KARIR PEGAWAI				
	a. Diklat/Kursus/Magang/Tugas Belajar/Ujian Dinas/Ijin Belajar Pegawai: 1) Surat Perintah/Surat Tugas/SK/Surat Ijin 2) Laporan Kegiatan Pengembangan Diri	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
	b. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/Sertifikat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
	c. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi PNS	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
	d. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
	e. Disiplin Pegawai 1) Daftar Hadir 2) Rekapitulasi Daftar Hadir	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
	f. Berkas Hukuman Disiplin	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
	Penghargaan dan Tanda Jasa	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
4	PENYELESAIAN PENGELOLAAN KEBERATAN PEGAWAI	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
5	MUTASI PEGAWAI				
	a. Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan,'Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Mutasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
	b. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
	c. Mutasi Keluarga 1) Surat Izin Pernikahan/Perceraian 2) Surat Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian 3) Surat Nikah /Ceraai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu	BKD Tanah Bumbu

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	4) Akte Kelahiran Anak				
6	5) Surat Keterangan Adopsi Anak				
	6) Surat Keterangan Meninggal Dunia				
	d. Usul kenaikan pangkat/golongan/jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
	e. Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
	f. Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai	Biasa/Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
	g. Peninjauan Masa Kerja	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
	h. Berkas Baperjakat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
	ADMINISTRASI PEGAWAI				
	a. Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
	b. Cuti Besar	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
	c. Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
	d. Cuti Alasan Penting	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
	e. Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
	f. Dokumentasi Identitas Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
	1) Usul Penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu				
	2) Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan				
	3) Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)				
	4) Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)				
	g. Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	h. Berkas Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
7	KESEJAHTERAAN PEGAWAI				
	a. Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
	b. Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai/ASKES	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
	c. Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
	d. Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
	e. Berkas tentang Layanan Pakaian Dinas	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
	f. Berkas tentang Layanan Pegawai yang meninggal karena dinas	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
	g. Berkas tentang Pemberian Tali Kasih	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
	h. Berkas tentang Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
	i. Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
8	PEMBERHENTIAN PEGAWAI TANPA HAK PENSIUN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah	BKD Tanah Bumbu
9	PERSELISIHAN/SENGKETA KEPEGAWAIAN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah	BKD Tanah Bumbu

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
10	USUL PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN PENSIUN PEGAWAI/JANDA/ DUDA DAN ASN YANG MENINGGAL	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
11	<div>BERKAS PERSEORANGAN APARATUR SIPIL NEGARA</div> <div><div>a. Berkas Lamaran yang diterima</div><div>b. Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya</div><div>c. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN</div><div>d. SK Pengangkatan CASN</div><div>e. Hasil Pengujian Kesehatan</div><div>f. SK Pengangkatan ASN</div><div>g. SK Peninjauan Masa Kerja</div><div>h. SK Kenaikkan Pangkat</div><div>i. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan</div><div>j. SK Pengangkatan dalam Jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional</div><div>k. SK Perpindahan Wilayah Kerja</div><div>l. SK Perpindahan Antar Instansi</div><div>m. SK Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN)</div><div>n. Berita Acara Pemeriksaan</div><div>o. SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin ASN</div><div>p. SK Perbantuan/Dipekerjakan di luar Instansi Induk</div><div>q. SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan</div><div>r. SK Pemberian Uang Tunggu</div><div>s. SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara</div><div>t. SK Pengalihan ASN</div><div>u. SK Pemberhentian sebagai ASN</div><div>v. SK Pemberhentian Sementara</div><div>w. Surat Keterangan Pernyataan Hilang</div><div>x. Surat Keterangan Kembalinya ASN yang dinyatakan hilang</div><div>y. SK Penggantian Nama</div><div>z. Surat perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran</div><div>aa. Akta Nikah/Cerai</div><div>bb. Akta Kelahiran</div><div>cc. Isian Formulir PUASN</div></div>	Rahasia	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	BKD Tanah Bumbu

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	dd. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ASN dan Jabatan ee. Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol ff. Surat Keterangan Mutasi Keluarga gg. Surat Keterangan Meninggal Dunia/hilang hh. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan				
	ii. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional jj. Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus kk. Surat Pemberitahuan Kenaikkan Gaji Berkala ll. Surat Tugas/ Izin Belajar Dalam/ Luar Negeri mm. Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri nn. Kartu Daftar Ulang (Kardaf) ASN oo. Ijazah/Sertifikat pp. SK Penempatan/Penarikan Pegawai qq. SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk rr. Surat Pertimbangan Status ASN ss. SK Pengaktifan Kembali Sebagai ASN tt. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah uu. SK Pensiun				
12	BERKAS PERSEORANGAN PEJABAT NEGARA	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak	BKD Tanah Bumbu
13	BERKAS PERSEORANGAN PEJABAT LAINNYA a. Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD b. Ketua, Wakil Ketua, Anggota KPUD, dan Bawaslu c. Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Lainnya	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	BKD Tanah Bumbu
14	BERKAS PERSEORANGAN KEPALA SKPD	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak	BKD Tanah Bumbu
II	FUNGSI KEUANGAN				
	A RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P)				
	1. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) a. Kebijakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas - Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Musrenbang	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none">- Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja)b. Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerahc. KUA beserta Nota Kesepakatannyad. Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)e. Nota Kesepakatan PPA				
	<ul style="list-style-type: none">f. Prioritas Plafon Anggaran2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)<ul style="list-style-type: none">a. Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang telah disetujuib. Dokumen RKA-SKPD3. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada<ul style="list-style-type: none">a. Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah<ul style="list-style-type: none">- Nota Keuangan Pemerintah- Materi RAPBDb. Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintahc. Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang RaPerda APBDd. Dokumen Rancangan Penjabaran APBD beserta lampirannyae. Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Gubernur tentang RAPBD beserta penjabarannyaf. Hasil Evaluasi Gubernur tentang RAPBDg. Penetapan Perda APBD oleh Gubernur beserta penjabarannyah. Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)<ul style="list-style-type: none">a. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan<ul style="list-style-type: none">1 Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)2 Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja)3 Dokumen evaluasi pelaksanaan RKPD4 Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah5 Prioritas Plafon Anggaran Perubahanb. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan<ul style="list-style-type: none">Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan yang telah	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
	<ul style="list-style-type: none">3. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada<ul style="list-style-type: none">a. Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah<ul style="list-style-type: none">- Nota Keuangan Pemerintah- Materi RAPBDb. Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintahc. Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang RaPerda APBDd. Dokumen Rancangan Penjabaran APBD beserta lampirannyae. Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Gubernur tentang RAPBD beserta penjabarannyaf. Hasil Evaluasi Gubernur tentang RAPBDg. Penetapan Perda APBD oleh Gubernur beserta penjabarannyah. Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
	<ul style="list-style-type: none">4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)<ul style="list-style-type: none">a. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan<ul style="list-style-type: none">1 Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)2 Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja)3 Dokumen evaluasi pelaksanaan RKPD4 Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah5 Prioritas Plafon Anggaran Perubahanb. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan<ul style="list-style-type: none">Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan yang telah	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	disetujui Sekretaris Daerah c. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 1 Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD Perubahan: Nota Keuangan Pemerintah Materi RAPBD				
	2 Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan 3 Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang RaPerda APBD Perubahan 4) Dokumen Rancangan Penjabaran APBD Perubahan beserta 5 Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Gubernur tentang RAPBD Perubahan beserta penjabarannya 6 Hasil Evaluasi Gubernur tentang RAPBD Perubahan 7 Penetapan Perda APBD Perubahan oleh Gubernur beserta 8 Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Perubahan 5 Draf Rencana Kerja Pemerinta Kabupaten Klaten (Renja) dan daraf Rencana 6 <i>Exercise</i> / perhitungan dan Rancangan APBD Perubahan Pemerintah Provinsi 7 <i>Exercise</i> / perhitungan dan Rancangan APBD Perubahan Pemerintah Provinsi 8 Rancangan KUA 9 Rancangan PPAS 10 Rancangan PPAS Perubahan 11 Rancangan KUPA 12 DPA-SKPD Provinsi Kalimantan Selatan 13 DPPA-SKPD Provinsi Kalimantan Selatan 14 Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah dan besaran 15 DPA PPKD	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah	BPKAD BPKAD BPKAD BPKAD BPKAD BPKAD BPKAD BPKAD
	B PENYUSUNAN ANGGARAN 1 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten 2 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi 3 Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah 4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV Eselon III Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD BPKAD BPKAD

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	5 Data penerimaan APBD yang dikelola Bendaharawan Umum Daerah	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
	C PELAKSANAAN ANGGARAN 1. Surat Penyedia Dana (SPP, SPM, dan Sp2D) : UP, GU, TU, LS	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
	2 Pendapatan a. Pendapatan Asli Daerah Surat Ketetapan Pajak Daerah Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah antara lain : -Pajak Hotel -Pajak Restoran -Pajak Hiburan -Pajak Reklame -Pajak Penerangan Jalan -Pajak Mineral Bukan Logam Bantuan -Pajak Parkir -Pajak Air Tanah -Pajak Sarang Burung Walet -PBB Sektor Perdesaan dan perkotaan -Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Bukti Penarikan Retribusi, antara lain : a) Retribusi Jasa Umum -Retribusi Pelayanan Kesehatan -Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil -Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat -Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum -Retribusi Pelayanan Pasar -Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor -Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran -Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta -Retribusi Pengujian Kapal Perikanan b) Retribusi Jasa Usaha -Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah -Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD

[illegible]

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	3 Belanja	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
	4 Pembiayaan Daerah a. Bukti Pengeluaran Pembiayaan b. Pengeluaran dari Dana Cadangan c. Pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM) d. Penyertaan Modal kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik				
	5 Dokumen Penatausahaan Keuangan - Surat Penyediaan Dana (SPD) - Surat Permohonan Pembayaran (SPP) - Surat Perintah Membayar (SPM)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
	- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
	6 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana - Buku Kas Umum (BKU) - Buku Kas Pembantu (BKP) - Ringkasan Perincian Pengeluaran Objek - Rekening Koran Bank - Laporan Pertanggungjawaban Fungsional dan Administrasi - Bukti penyetoran Pajak - Register Penutupan Kas - Berita Acara Pemeriksaan - Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan Termasuk Arsip Data Komputer (ADK) - Laporan Pendapatan Negara - Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) Bulanan/Tiwulan/ Semesteran - Bukti Kas Pengeluaran berikut lampirannya				
	7 Daftar Gaji	Rahasia	Eselon IV	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	BPKAD
	8 Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah	BPKAD
	9 Pertanggungjawaban APBD - Materi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Pemerintah - Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Pemerintah - Pemandangan umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD oleh DPRD - Jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD - Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD terhadap Raperda	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	Pertanggung jawaban APBD - Permohonan Evaluasi Gubernur tentang Raperda dan Raperbup Pertanggung jawaban APBD - Evaluasi Gubernur tentang Raperda Pertanggungjawaban dan - Perda dan Pergub Pertanggungjawaban APBD 10 Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari : - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Neraca - Laporan Perubahan Saldo Lebih - Laporan Operasional - Laporan Arus Kas	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
	- Laporan perubahan Ekuitas - Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 11 Data Belanja Bendaharawan Umum Daerah baik berupa belanja pegawai dan belanja lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
	12 Sgi Penguji SP2D yang disampaikan ke Bank Kalsel untuk pencairan dana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
	13 Dokumen rekonsiliasi dan verifikasi laporan keuangan atas investasi daerah, investasi permanen dan Non permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
	14 Dokumen keuangan penyusunan pertanggungjawaban dana transfer Pemerintah Pusat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
	15 Laporan Keuangan Pemerintah yang belum diaudit (unaudited) oleh auditor internal dan eksternal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
	D PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI				
	1. Dokumen Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (<i>Blue Book</i>)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
	2. Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (<i>Green Book</i>)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	3. Dokumen <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU), dan dokumen sejenisnya 4. Dokumen <i>Loan Agreement</i> (PHLN) seperti : <i>Draft Agreement, Legal Opinion</i> , 5. Dokumen Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, a.l. : Usulan Luncuran Dana 6. Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya : <ul style="list-style-type: none"> - <i>Reimbursement</i> - <i>Direct Payment/ Transfer Procedure</i> - <i>Special Commitment/ L/C Opening</i> - <i>Special Account/ Imprest Fund</i> 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
	7. Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (<i>Payment Advice</i>) 8. Dokumen Realisasi Pencairan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, antara lain: SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya 9. <i>Replenishment</i> (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain: No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA), Statement of Expenditure (SE) 10. <i>Staff Appraisal Report</i> 11. <i>Report</i> /Laporan yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Progress Report</i> - <i>Monthly Report</i> - <i>Quarterly Report</i> 12. Laporan Hutang Daerah : <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Pembayaran Hutang Daerah - Laporan Posisi Hutang Daerah 13. <i>Completion Report/ Annual Report</i> 14. Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
	E PENGELOLAAN APBD/DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)				
	1. Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan: <ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran - Pejabat Pembuat Komitmen - Kuasa Pengguna Barang/Jasa 	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none">- Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah- Pejabat Penandatanganan SPM- Bendahara Penerimaan/Pengeluaran F SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD)				
	1. Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah	BPKAD
	2. Dokumen Kebijakan Akuntansi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah	BPKAD
	3. Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah	BPKAD
	4 Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah	BPKAD
	5 Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah	BPKAD
	G PENYALURAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN				
	1. Surat Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara atas Pengguna Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah	BPKAD
	2. Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya : <ul style="list-style-type: none">- SPP-LS, SPP-GU, SP3, Daftar Perincian Penggunaan Dana, SPPR-LS, SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, Bilyet Giro, SPM Nihil- Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta bukti Pendukungnya al : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank- Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
	3. Buku Rekening Bank	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah	BPKAD
	4. Keputusan Pembukuan Rekening	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah	BPKAD
	5. Pembukuan anggaran terdiri dari : Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan Daftar Pembukuan Pencarian/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencarian (DHP) dan Rekening Koran	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
	H PENERIMAAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN				

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	1. Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
	2. Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn, Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan, dll	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
	I PENGELOLAAN ANGGARAN PILKADA DAN BIAYA BANTUAN PEMILU DARI 1. Dokumen Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan PEMILU dari a. Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan b. Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
	c. Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD, PPK, PPS, KPPS dan Panwasda, Permohonan Pengajuan RKA KPUD d. Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu e. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu f. Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD g. Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada h. Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD i. Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD J PELAKSANAAN ANGGARAN PILKADA DAN ANGGARAN BIAYA BANTUAN 1. Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu 2. Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu 3. Berkas Setor Sisa Dana Pilkada/Pemilu termasuk Setor Komisi Pengadaan Barang/Jasa, Rabat, Bunga, Jasa Giro 4. Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	5. Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
	K. PELAKSANAAN ANGGARAN OPERASIONAL PEMILU				
	1. Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu dan PPKO Provinsi termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
	2. Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah	BPKAD
	3. Berkas Penyaluran Biaya Pemilu ke PPK, PPS dan KPPS termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank dan lain-lain	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
	L PEMERIKSAAN/PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH				
	1. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
	2. Pelaksanaan Pengawasan				
	a Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
	b Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut				
	c Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah	BPKAD
	d Laporan Perkembangan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah	BPKAD
	e Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review Pemerintah Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
	f Good Corporate Governance (GCG)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
	3. Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah:	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu	BPKAD

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
III	<div>a Tuntutan Perbendaharaan</div> <div>b. Tuntutan Ganti rugi</div> <div>FUNGSI NON KEUANGAN NON KEPEGAWAIAN</div> <div>A PERENCANAAN</div> <div><div>1. Pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan</div><div>a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang /Master Plan (RPJP)</div><div>b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)</div><div>c. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan</div><div>d. Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara(PPAS)</div></div> <div>2 Program Kerja Tahunan</div> <div>a. Usulan Unit Kerja beserta data pendukung</div> <div>b. Program Kerja Tahunan Unit Kerja</div>	<div>Biasa/Terbuka</div> <div>Biasa/Terbuka</div> <div>Biasa/Terbuka</div> <div>Biasa/Terbuka</div> <div>Terbatas</div> <div> </div> <div>Biasa/Terbuka</div>	<div></div> <div>Eselon IV</div> <div>Eselon IV</div> <div>Eselon IV</div> <div>Eselon IV</div> <div>Eselon III</div> <div> </div> <div>Eselon IV</div>	<div>pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div> </div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div> </div> <div>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div>	<div></div> <div> </div> <div>BAPPEDA</div> <div> </div> <div>BAPPEDA</div>
	<div>c. Program Kerja Tahunan</div> <div> </div> <div>3. Penetapan / Kontrak Kinerja</div> <div>a. Pimpinan Unit Kerja</div> <div>b. Kepala SKPD</div> <div>4 Laporan</div> <div>a. Laporan Berkala</div> <div>Laporan Harian</div> <div>Laporan Mingguan</div> <div>Laporan Bulanan</div> <div>Laporan Triwulan</div> <div>Laporan Semesteran</div> <div>Laporan Tahunan Unit Kerja</div> <div>Laporan Tahunan SKPD</div> <div>b. Laporan Insidentil</div> <div>5 Evaluasi Program</div> <div>a. Evaluasi program unit kerja</div> <div>b. Evaluasi program SKPD</div> <div>6 Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan</div> <div> </div> <div>7 Konsultasi Perencanaan Pembangunan</div> <div> </div> <div>8 Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan</div>	<div>Terbatas</div> <div> </div> <div>Biasa / Terbatas</div> <div> </div> <div>Biasa/Terbuka</div> <div> </div> <div>Biasa/Terbuka</div> <div> </div> <div>Biasa/Terbuka</div> <div> </div> <div>Biasa/Terbuka</div>	<div>Eselon III</div> <div> </div> <div>Eselon IV</div> <div> </div> <div>Eselon IV</div> <div> </div> <div>Eselon IV</div> <div> </div> <div>Eselon IV</div> <div> </div> <div>Eselon IV</div>	<div>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div> </div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div> </div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div> </div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div> </div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div>	<div>BAPPEDA</div> <div> </div> <div>BAPPEDA</div> <div> </div> <div>BAPPEDA</div> <div> </div> <div>BAPPEDA</div> <div> </div> <div>BAPPEDA</div>

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	9 Aksi Strategis Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Rancangan Awal Perencanaan Aksi Strategis b. Rapat pembahasan rancangan awal dengan SKPD c. Sosialisasi SKPD d. Rencana Akhir Perencanaan Aksi Strategis e. Penetapan Perencanaan Aksi Strategis 10 Perencanaan Pendanaan Pembangunan <ul style="list-style-type: none"> a. Pendanaan APBN b. Pendanaan APBD B HUKUM	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
	1 Program Legislasi <ul style="list-style-type: none"> a. Program Legislasi b. Bahan / Materi program legislasi daerah 	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Hukum
	2 Rancangan Peraturan Perundang-Undangan <ul style="list-style-type: none"> a. Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Undang-undang, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan b. Rancangan Peraturan Pemerintah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai diundangkan 	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Hukum
	<ul style="list-style-type: none"> c. Rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden, termansuk naskah akademik,rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan d. Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik,rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai 				
	3. Peraturan pimpinan Lembaga Negara dan Badan Pemerintah/instansi : Peraturan /Keputusan Gubernur /Bupati/Walikota termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Hukum
	4. Keputusan /Ketetapan Pimpinan Lembaga Negara dan Badan Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> a. Keputusan /Ketetapan Bupati b. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah 	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Hukum
	5. Instruksi / Surat Edaran : <ul style="list-style-type: none"> a. Instruksi / Surat Edaran Gubernur /Bupati/Walikota b. Instruksi / Surat Edaran Pejabat setingkat eselon I dan II termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah 	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Hukum

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	6. Surat Perintah : a. Surat Perintah Kepala Arsip Nasional Republik b. Surat Perintah Pejabat setingkat eselon I dan II	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Hukum
	7. Standar / Pedoman / Prosedur Kerja / Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknis yang bersifat nasional / regional / internasional termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Hukum
	8. Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding(MoU)/Kerjasama : a. Dalam Negeri b. Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Hukum
	9. Dokumentasi Hukum Undang-Undang,Peraturan Pemerintah,Keputusan Presiden dan peraturan-	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Hukum
	10. Sosialisasi / Penyuluhan / Pembinaan Hukum	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Hukum
	11. Bantuan / Konsultasi Hukum /Advokasi Berkas tentang pemberian bantuan/konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Hukum
	12. Kasus / Sengketa Hukum a. Pidana Berkas tentang kasus/sengketa pidana,baik kejahatan maupun - Proses verbal mulai dari penyelidikan,penyidikan sampai dengan vonis - Berkas pembelaan dan bantuan hukum - Telaah hukum dan opini hukum b. Perdata Berkas tentang kasus/sengketa perdata : c. Tata Usaha Negara - Proses verbal mulai dari penyelidikan,penyidikan sampai dengan vonis - Berkas pembelaan dan bantuan hukum - Telaah hukum dan opini hukum - Berkas perkara PTUN sebelum disampaikan ke persidangan d. Perburuhan Berkas tentang kasus/sengketa Perburuhan : - Proses verbal mulai dari penyelidikan,penyidikan sampai dengan vonis - Berkas pembelaan dan bantuan hukum - Telaah hukum dan opini hukum e. Arbitrase	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Hukum

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	<p>Berkas tentang kasus/sengketa Perburuhan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis- Berkas pembelaan dan bantuan hukum- Telaah hukum dan opini hukum <p>f. Sengketa adat</p> <p>g. Kasus-kasus yang berkaitan dengan Anak Berhadapan dengan Hukum</p> <p>h. Anak kasus pelecehan seksual/kekerasan, baik sebagai pelaku</p> <p>13. Perizinan</p> <p>14. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)</p> <ul style="list-style-type: none">a. Hak Ciptab. Hak Paten<ul style="list-style-type: none">Paten BiasaPaten Sederhanac. Hak desain Industrid. Hak Rahasia Dagang	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Bumbu</p>	<p>Bagian Hukum</p> <p>Bagian Hukum</p>
	<p>e. Hak Merk</p> <p>f. DTLS (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)</p> <p>15. Permohonan Haki yang ditolak (Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Merk,</p> <p>C ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN</p> <p>1. Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pembentukanb. Pengubahanc. Pembubaran <p>2. Uraian Jabatan dan Tata Kerja</p> <p>3. Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional</p> <p>4. Evaluasi Kelembagaan</p> <p>D KEARSIPAN</p>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Terbatas</p>	<p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon III</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p>	<p>Bagian Hukum</p> <p>Bagian Ortala</p> <p>Bagian Ortala</p> <p>Bagian Ortala</p>

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	1 Kebijakan Kebijakan tentang pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
	2 Pembinaan kearsipan A) Bina Arsiparis 1 Bimbingan konsultasi arsiparis	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
	2 Penilaian Arsiparis	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
	3 Pemilihan arsiparis teladan a) Penyelenggaraan b) Berkas penetapan arsiparis teladan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	
	4 Database arsiparis	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	
	B) Bimbingan dan Konsultasi (Sosialisasi, Seminar, Lokakarya, Workshop) 1 Penerapan sistem dalam penyelenggaraan kearsipan 2 Penggunaan sarana dan prasarana kearsipan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	
	3 Unit kearsipan 4 Sumber daya Manusia	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
	C) Supervisi dan Evaluasi 1 Perencanaan 2 Pelaksanaan 3 Laporan hasil supervisi				
	D) Data Base Bimbingan, Konsultasi dan Supervisi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
	E) Fasilitasi Kearsipan 1 SDM kearsipan 2 Prasarana dan sarana	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	F) Unit Kearsipan Teladan 1 Penyelenggaraan 2 Berkas penetapan Unit kearsipan teladan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
	G) Jadwal Retensi Arsip	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
	H) Tata Naskah Dinas (TND)	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	I) Klasifikasi arsip	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	J) Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (KKAAD)	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	3 Pengelolaan Arsip				

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	A) Pengelolaan arsip Dinamis				
	1) Penciptaan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
	a) Pencatatan				
	- Buku agenda				
	- Kartu kendali				
	- Lembar pengantar / buku ekspedisi.				
	2 Penggunaan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
	a) Pengklasifikasian Pengamanan dan akses arsip				
	b) Peminjaman				
	3 Pemeliharaan				
	a) Pemberkasan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
	- daftar arsip Aktif				
	b) Penataan Arsip inaktif	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	- Pengaturan fisik				
	- Pengolahan informasi arsip				
	- Penyusunan daftar arsip inaktif				
	c) Penyimpanan Arsip	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
	- Skema penyimpanan arsip aktif dan inaktif				
	- Peta lokai penyimpanan arsip				
	- pengamanan				
	d) Alih Media	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
	- Kebijakan alih alih media				
	- Autentikasi				
	- Berita acara				
	- Daftar arsip yang alihmediakan				
	e) Program arsip vital	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
	4 Autentikasi Arsip Dinamis	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
	a) Pembuktian autensitas				
	b) Pendapat tenaga ahli				
	c) Pengujian				
	d) Penetapan autensitas arsip statis/surat pernyataan penciptaan arsip				
	5 Penyusutan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
	a) Pemindahan Arsip inaktif				
	- berita acara pemindahan				
	- daftar arsip yang dipindahkan				
	b) Pemusnahan Arsip yang tidak bernilai guna				
	- penilaian panitia penilai				

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> - permintaan persetujuan (kepala ANRI, Kepala lembaga kearsipan) - penetapan arsip yang dimusnahkan - berita acara pemusnahan - daftar arsip yang dimusnahkan c) Penyerahan arsip Statis <ul style="list-style-type: none"> - pembentukan panitia penilai - notulen rapat penilai - surat pertimbangan panitia penilai - surat persetujuan dari kepala LKD - surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh dan dapat dipergunakan - keputusan penetapan penyerahan - berita acara penyerahan arsip - daftar arsip yang diserahkan 6 Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis <ul style="list-style-type: none"> a) Database pengolahan arsip aktif b) Database pengolahan arsip inaktif c) Database arsip Statis 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
	B) Pengelolaan Arsip Statis <ul style="list-style-type: none"> 1 Akuisisi <ul style="list-style-type: none"> a) Monitoring fisik dan dan daftar b) Verifikasi terhadap daftar arsip c) Menetapkan status arsip statis d) persetujuan untuk penyerahan e) penetapan arsip yang diserahkan f) berita acara penyerahan arsip g) daftar arsip yang diserahkan 2 Sejarah Lisan <ul style="list-style-type: none"> a) administrasi pelaksanaan sejarah lisan b) Hasil wawancara sejarah lisan <ul style="list-style-type: none"> - berita acara wawancara sejarah lisan - laporan kegiatan - hasil wawancara (kaset / CD) dan transkrip 3 Daftar Pencarian Arsip Statis <ul style="list-style-type: none"> a) pengumuman b) akuisisi daftar pencairan arsip statis 4 Penghargaan dan imbalan 5 Pengolahan 	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	<div>a) Menata informasi</div> <div>b) Menata fisik</div> <div>c) menyusun sarana bantu temu balik<ul style="list-style-type: none">- Guide- Daftar arsip statis- inventaris arsip statis</div> <div>6 Preserfasi</div> <div>a) Preventif<ul style="list-style-type: none">- Penyimpanan- pengendalian hama terpadu- Reproduksi (ahli media)<ul style="list-style-type: none">* Berita acara alih media* Daftar arsip yang dialihmediakan- perencanaan penanggulangan bencana</div> <div>b) Kuratif<ul style="list-style-type: none">- Perawatan arsip</div> <div>7 a) Pembuktian autensitas</div> <div>b) Pendapat tenaga ahli</div> <div>c) Pengujian</div> <div>d) Penetapan autensitas arsip statis/surat pernyataan</div>				
	<div>8 Akses Arsip Statis</div> <div>a) Layanan arsip</div> <div>b) Penerbitan naskah sumber<ul style="list-style-type: none">- Administrasidan proses penyusunan- Hasil naskah sumber arsip</div> <div>c) Pameran arsip</div> <div>9 Jasa Kearsipan</div> <div>a) Konsultasi kearsipan</div> <div>b) Manual kearsipan</div> <div>c) Penata arsip</div> <div>d) Otomasi kearsipan</div> <div>e) Penyimpanan arsip</div> <div>f) Perawatan dan pemeliharaan arsip</div> <div>g) Database jasa kearsipan</div> <div>E KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN</div> <div>1. Telekomunikasi :</div>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Bagian Umum

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	Administrasi penggunaan / langganan peralatan telekomunikasi meliputi :			kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Umum
	2. Perjalanan Dinas a. Dalam Negeri b. Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	
	3. Administrasi penggunaan fasilitas kantor meliputi permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas dan fasilitas	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Umum
	4. Risalah/Notulen Rapat a. Rapat staf b. Rapat pimpinan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Umum
	5. Administrasi penyediaan konsumsi dan akomodasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Umum
	6. Pengurusan kendaraan dinas: a. Pengurusan surat-surat kendaraan dinas b. Pemeliharaan dan perbaikan c. Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Umum
	7. Pemeliharaan gedung dan taman : a. Pertamanan /landscaping b. Penghijauan c. Perbaikan gedung	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Umum
	d. Perbaikan rumah dinas /wisma e. Kebersihan gedung dan taman	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Umum
	8. Pengelolaan jaringan listrik, air, telepon, dan komputer : a. Perbaikan /pemeliharaan b. Pemasangan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Umum
	9. Ketertiban dan keamanan a. Pengamanan,penjagaan,dan pengawalan terhadap pejabat, kantor, dan rumah dinas : 1). Daftar nama satuan pengamanan 2). Daftar jaga / daftar piket 3). Catatan gangguan / pelanggaran /kejadian 4). Surat ijin keluar masuk orang atau barang b. Laporan ketertiban dan keamanan 1). Kehilangan 2). Kerusakan 3). Kecelakaan 4). Gangguan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Umum

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	10. Administrasi pengelolaan parkir	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Umum
	11. Administrasi pakaian dinas pegawai,satpam,petugas kebersihan dan pegawai lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Umum
	F HUBUNGAN MASYARAKAT				
	1. Keprotokolan :				
	a. Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Kalsel	Diskominfo
	b. Buku tamu	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Diskominfo
	c. Agenda kegiatan pimpinan lembaga/instansi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Diskominfo
	d. Kunjungan dinas dalam dan luar negeri				
	1). Kunjungan dinas pimpinan lembaga /instansi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Diskominfo
	2).Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai				
	e. Daftar nama/alamat kantor /pejabat				
	2. Dokumentasi/liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media : kertas/foto/video/rekaman suara /multimedia	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Diskominfo
	3. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan :	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Diskominfo
	a. Kliping koran				
	b. Brosur /Leaflet/poster /plakat				
	c. Pengumuman /pemberitaan				
	4. Hubungan antar lembaga Negara dan Badan Pemerintah/Instansi :	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Diskominfo
	a. Hubungan antar lembaga pemerintah				
	b. Hubungan dengan perusahaan				
	c. Hubungan dengan perguruan tinggi /sekolah,termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapangan (PKL)				
	d. Forum kehumasan (Bakohumas/Perhumas)				
	e. Hubungan dengan media massa :				
	1). Siaran pers/konferensi pers/press release				
	2). Kunjungan wartawan /peliputan				
	3). Wawancara				
	5. Dengar pendapat/hearing DPR	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Diskominfo

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	6. Bahan/materi pidato/sidang MPR, DPR, DPD, kabinet, DPRD, Muspida Provinsi/kabupaten/kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Diskominfo
	7. Naskah pidato sambutan yang belum dibacakan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Diskominfo
	8. Penerbitan Majalah, buletin, koran dan jurnal	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Diskominfo
	9. Publikasi melalui media cetak maupun elektronik	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Diskominfo
	10. Pameran/sayembara/lomba/festival, pembuatan spanduk dan iklan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Diskominfo
	11. Penghargaan/Tanda Kenang-kenangan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Diskominfo
	12. Administrasi pemberian penghargaan/tanda kenang-kenangan kepada masyarakat yang memiliki jasa prestasi besar	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Diskominfo
	G PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN				
	1 Kebijakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan serta penddayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi : kelembagaan, sumberdaya dan jaringan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
	2 Penelitian dan pengkajian a Rencana Kerja - Master plan / rencana strategis - Rencana kerja tahunan : proposal / <i>idea concept paper</i> (ICP) - Berkas / kontrak MoU kerjasama / material transfer agreement (MTA) - Perjanjian penelitian b Administrasi penelitian : surat tugas / surat perintah, pembentukan c Pelaksanaan penelitian / pengkajian - Prosedur / petunjuk - Data primer - Log Book - Studi kelayakan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> - Instrumen penelitian - Pelaksanaan survey - Laporan hasil pendataan / survey - Analisis / pengolahan data d Hasil penelitian / pengkajian / rekomendasi <ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil penelitian dan hasil luaran - Rekomendasi e Hasil penelitian dan pengkajian hasil jasa layanan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
	3 Pengembangan dan Inovasi <ul style="list-style-type: none"> - Rencana Kerja - Administrasi pengembangan dan inovasi - Pelaksanaan - Hasil pengembangan / inovasi 				
	4 Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagunaan/replika/prototipe hasil penelitian/pengkajian/perekayasaan/pengembangan/inovasi : masyarakat, dunia industri, pemerintah				
	5 Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi				
	6 Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu <ul style="list-style-type: none"> a Promosi b Permayarakatan 				BAPPEDA
	7 Pembinaan penelitian/pengkajian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan tekonologi				
	8 Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
	9 Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
	10 Master proceeding/jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi <ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan: jurnal / buletin ilmiah, bahan publikasi khusus b. Leaflet dan booklet c. Kamus istilah 	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
	11 Hak atas kekayaan intelektual (HAKI)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	12 Forum Komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
	13 Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK a. Jasa laboratorium pengujian b. Jasa teknologi produksi c. Jasa studi d. Jasa penyewaan peralatan e. Jasa perbantuan tenaga ahli / profesi f. Jasa setifikasi / kalibrasi dan sertifikasi g. Buku rekaman barang yang diuji / dikalibrasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
	14 Sertifikasi personil peneliti	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
	15 Akreditasi laboratorium	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
	H PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	1. Pedoman-pedoman kediklatan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD
	2. Kurikulum-kurikulum diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD
	3. Modul-modul diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD
	4. Panduan fasilitator	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD
	5. Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD
	6. Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD
	7. Akreditasi Lembaga Diklat - Surat permohonan akreditasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD

[illegible]

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none">- Surat keputusan tim pengajar diklat- Panduan diklat- Laporan panitia penyelenggaraan diklat- Sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat- Daftar peserta diklat- Bahan ajar diklat- Daftar hadir peserta diklat- Daftar hadir widyaiswara- Formulir evaluasi diklat- Formulir evaluasi widyaiswara- Hasil formulasi evaluasi peserta diklat- Sertifikat/ STTPL- Sambutan penutupan diklat				
	14. Laporan penyelenggaraan diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD
	15 Saran/Rekomendasi penyelenggaraan diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD
	16 Evaluasi penyeleggaraan diklat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD
	17 Evaluasi alumni pasca diklat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD
	I KEPUSTAKAAN				
	1. Deposit Bahan Pustaka				
	a. Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				
	b. Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman				
	c. Terbitan Internasional dan Regional				
	d. Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				
	e. Bibliografi dan Katalog				
	f. - Bibliograsi Nasional Indonesia (BNI)				
	- Bibliografi Daerah (BD)				
	- Katalog Induk Nasional (KIN)				
	Katalog Induk Daerah (KID)				
	Katalog Dalam Terbitan (KDT)				
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPERSIP

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	g. Pendaftaran Nomor <i>Internasional Standard Book Number</i> (ISBN) h. Pendaftaran Nomor <i>Internasional Standard Music Number</i> (ISMN) 2. Pengembangan Koleksi a. Akusisi <ul style="list-style-type: none">- Pembelian- Hibah- Hadiah- Tukar Menukar- Implementasi Undang-Undang KCKR- Terbitan Internal- Pendistribusian bahan pustaka surplus- Inventarisasi koleksi (Buku Induk)- Dokumen pengadaan bahan pustaka sebelum proses lelang b. Pengolahan Bahan Pustaka c. Pangkalan Data Katalog Koleksi 3. Jasa Perpustakaan dan Informasi a. Keanggotaan b. Sirkulasi c. Referensi d. Alih Aksara, Alih Bahasa dan Kajian Naskah Nusantara e. Kerjama Perpustakaan <ul style="list-style-type: none">- MoU- Perjanjian kerjasama- Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional f. Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan <ul style="list-style-type: none">- Pengembangan situs web- Pengembangan kemas ulang informasi multimedia	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon III Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPERSIP
					DISPERSIP
					DISPERSIP
					DISPERSIP
	- Pengembangan program aplikasi perpustakaan - Pengembangan pangkalan data kepastakaan digital g. Pangkalan Data Layanan Perpustakaan 4. Preservasi Bahan Pustaka a. Konservasi <ul style="list-style-type: none">- Perawatan Bahan Perpustakaan- Perbaikan Bahan Perpustakaan- Penjilidan Bahan Perpustakaan b. Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto) c. Transformasi Digital d. Kurasi Digital	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPERSIP

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	5. Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca a. Pengembangan Perpustakaan - Perpustakaan Umum - Perpustakaan Khusus - Perpustakaan Sekolah - Perpustakaan Perguruan Tinggi b. Akreditasi Perpustakaan - Permintaan akreditasi - Pemberian akreditasi - Pangkalan data perpustakaan yang diakreditasi c. Pangkalan Data Perpustakaan - Nomor Pokok Perpustakaan - Perpustakaan Berbasis Wilayah d. Pemasyarakatan Minat Baca Organisasi Perpustakaan - Forum Perpustakaan Umum - Forum Perpustakaan Khusus - Forum Perpustakaan Sekolah - Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi - Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca - Organisasi Perpustakaan Lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPERSIP
	6. Pengembangan Pustakawan a. Sertifikasi Tenaga Perpustakaan b. Pembinaan Tenaga Perpustakaan c. Penerbitan Jurnal d. Penilaian Jabatan Fungsional Pustakawan - Tim Penilai Pusat - Tim Penilai Unit Kerja - Tim Penilai Instansi - Tim Penilai Provinsi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPERSIP
	e. Pemasyarakatan f. Evaluasi Tenaga Perpustakaan g. Pangkalan data Tenaga Perpustakaan h. Pangkalan data Tim Penilai Pustakawan J TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 1. Kebijakan Kebijakan sumber daya dan perangkatan Pos dan Informatika, penyelenggaraan Pos dan Informatika				
					DISKOMINFO

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	A) Standarisasi perangkat Pos dan Informatika 1 Teknik Pos dan Telekomunikasi 2 Teknik komunikasi radio 3 Penerapan standar Pos dan Telekomunikasi 4 Kualitas pelayanan dan harmonisasi standar 5 Standar dan audit perangkat lunak	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	
	2. Sumber Daya Dan Perangkat A) Penataan Sumber Daya 1 Alokasi spektrum dinas a) Alokasi dinas tetap b) Alokasi dinas bergerak darat Alokasi spektrum Non dinas tetap dan bergerak darat a) Alokasi dinas penyiaran b) Alokasi dinas penerbangan, maritim dan satelit Orbit satelit a) Notifikasi dan penataan Filinf Satelit b) Tata kelola hubungan antar penyelenggara 4 Ekonomi sumber daya a) Analisa industri dan ekonomi b) Penanganan izin pria 5 Harmonisasi teknik spektrum a) Teknik spektrum antar lembaga b) Harmonisasi dan notifikasi terestrial				DISKOMINFO
	B) Operasi Sumber Daya 1 Pelayanan spektrum dinas a) Pelayanan dinas tetap b) Pelayanan dinas bergerak darat 2 Pelayanan spektrum Non Dinas a) Pelayanan dinas penyiaran b) Pelayanan dinas penerbangan, maritim dan satelit 3 Sertifikasi operator radio	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO
	a) Pelayanan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk b) Pelayanan operator radio 4 Penanganan biaya a) Penanganan piutang biaya hak penggunaan frekuensi radio b) Analisa dan evaluasi biaya hak penggunaan frekuensi radio 5 Konsultasi dan data operasi sumber daya a) Konsultasi dan informasi sumber daya b) Pengelolaan data operasi sumber daya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	DISKOMINFO
	C) Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika				

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	<div>1 Pengelolaan sistem monitoring spektrum<div>a) Rancang bangun teknologi monitoring spektrum</div><div>b) Pemeliharaan sistem informasi monitoring spektrum</div></div> <div>2 Pengelolaan sistem informasi manajemen spektrum<div>a) Rancang bangun sistem informasi manajemen spektrum</div><div>b) Pemeliharaan sistem informasi manajemen spektrum</div></div> <div>3 Monitoring dan Penertiban Spektrum<div>a) Monitoring dan Penertiban Spektrum Dinas Bergerak Tetap dan Bergerak Terestrial</div><div>b) Monitoring dan Penertiban Spektrum Dinas Non Bergerak Tetap dan Bergerak Terestrial</div></div> <div>4 Monitoring dan Penertiban<div>a) Monitoring Standar Perangkat Pos dan Informatika</div><div>b) Penertiban Standar Perangkat Pos dan Informatika</div></div> <div>3. Penyelenggaraan Pos Dan Informatika<div>A) Pos<div>1 Layanan dan Penerapan Pos Universal<div>a) Layanan</div><div>b) Penerapan Layanan</div></div><div>2 Layanan Pos Komersial<div>a) Tata Kelola Layanan</div><div>b) Data dan Informasi Layanan</div></div><div>3 Prangko dan Filateli<div>a) Prangko</div><div>b) Filateli</div></div><div>4 Iklim Usaha Pos<div>a) Pos Universal</div><div>b) Pos Komersial</div></div><div>5 Pentarifan Pos<div>a) Layanan Pos Universal</div><div>a) Pos Komersial</div></div></div></div>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	<div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div>	<div></div> <div>DISKOMINFO</div>
	<div>B) Telekomunikasi<div>1 Layanan Jaringan Telekomunikasi<div>a) Akses</div><div>b) Backbone</div></div><div>2 Layanan Jasa Telekomunikasi<div>a) Jasa Teleponi Dasar, Nilai Tambah Teleponi, Sistem dan Transaksi Elektronik</div><div>b) Jasa Multimedia</div></div></div>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO 1

Biasa/Terbuka

Eselon IV

Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu

Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu

DISKOMINFO

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	3 Penomoran telekomunikasi dan informatika a) Penomoran Telekomunikasi b) Penomoran Informatika 4 Tarif dan interkoneksi a) Tarif telekomunikasi b) Interkoneksi telekomunikasi 5 Kelayakan sistem telekomunikasi a) Pelayanan sistem jaringan dan jasa b) Penerapan teknologi telekpmunikasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	
	C) Penyiaran 1 Pemetaan dan database a) Pemetaan penyelenggaraan radio dan televisi b) Database penyelenggaraan radio dan televisi 2 Verifikasi dan uji coba siaran a) Verifikasi dan uji coba siaran radio b) Verifikasi penyelenggaraan radio dan Televisi 3 Radio a) Lembaga penyiaran komunitas dan lembaga penyiaran radio b) Lembaga penyiaran stwasra radio 4 Televisi a) Lembaga penyiaran komunitas, lembaga penyiaran berlangganan dan lembaga penyiaran asing televisi b) Lembaga penyiaran swasta televisi 5 Iklim usaha penyiaran a) Penyusunan dan evaluasi regulasi penyiaran b) Penerapan kewajiban lembaga penyiaran				DISKOMINFO
	D) Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal 1 Telekomunikasi khusus, penyiaran publik dan kewajiban universal) a) Analisa penyelenggaraan b) Pelayanan 2 Telekomunikasi khusus Non Pemerintah	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO
	a) Analisa penyelenggaraan b) Pelayanan 3 Layanan khusus penyiaran a) Publik radio b) Publik televisi 4 Pelayanan kewajiban universal a) Perencanaan pembangunan b) Monitoring dan evaluasi				

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	5 Pengembangan infrastruktur a) Perencanaan infra struktur b) Analisa ekonomis infastruktur E) Pengendalian Pos dan Informasi 1 Monitoring dan evaluasi Pos a) Monitoring b) Evaluasi 2 Monitoring dan evaluasi jaringan dan telekomunikasi a) Monitoring b) Evaluasi 3 Monitoring dan evaluasi jasa telekomunikasi a) Monitoring b) Evaluasi 4 Monitoring dan evaluasi penyiaran a) Monitoring b) Evaluasi 5 Pencegahan dan penertiban a) Pencegahan b) Penertiban 4. Aplikasi Informatika A) e-Government 1 Tata kelola e-Government a) Program e-Government b) Evaluasi e-Government 2 Teknologi dan infastruktur e-Government a) Teknologi e-Government a) Infastruktur e-Government 3 Interoperabilitas dan interkoneksi e-Government a) Interoperabilitas e-Government b) Interkoneksi e-Government 4 Aplikasi layanan pemerintahan a)Aplikasi layanan pemerintahan pusat b) Aplikasi layanan pemerintahan daerah	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO
					DISKOMINFO
	5 Aplikasi layanan publik a) Inisiasi aplikasi layanan publik b) Fasilitas aplikasi layanan publik B) e-Businness 1 Tata kelola e-Businness a) Program e-Businness b) Evaluasi e-Businness	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	2 Teknologi dan infastruktur e-Businnes a) Teknologi e-Businnes b) Infrastruktur e-Businnes 3 Interoperabilitas dan interkoneksi e-Businnes a) Interoperabilitas e-Businnes b) Interkoneksi e-Businnes 4 Aplikasi layanan e-Businnes a) Bidang usaha dan mikro b) Bidang usaha menengah dan besar C) Pemberdayaan Informatika 1 Pemberdayaan informatika masyarakat perkotaan a) Perancangan model b) Penerapan model 2 Pemberdayaan informatika masyarakat pedesaan a) Pengembangan model b) Penerapan model 3 Pemberdayaan informatika masyarakat perbatasan dan pulau terluar a) Pengembangan model b) Penerapan model 4 Pemberdayaan informatika masyarakat khusus a) Pengembangan model b) Penerapan model D) Pemberdayaa Industri Informatika 1 Industri infrastruktur dan layanan aplikasi informatika a) Pemberdayaan b) Promosi 2 Industri perangkat informatika pengguna a) Pemberdayaan b) Pengembangan produk 3 Industri perangkat lunak a) Pemberdayaan b) Pengembangan produk	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO
	4 Industri konten multimedia a) Pemberdayaan b) Pengembangan produk E) Keamanan Informasi 1 Tatakelola keamanan informasi a) Kelembagaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	<div>b) Manajemen risiko</div> <div>2 Teknologi keamanan informasi</div> <div>a) Infra Struktur</div> <div>b) Aplikasi</div> <div>3 Monitoring evaluasi dan tanggapan darurat keamanan informasi</div> <div>a) Infra Struktur</div> <div>b) Aplikasi</div> <div>4 Penyelidikan dan penindakan</div> <div>a) Monitoring dan evaluasi keamanan informasi</div> <div>b) Tanggap darurat peristiwa keamanan informasi</div> <div>5 Budaya keamanan informasi</div> <div>a) Penyidikan</div> <div>b) Penindakan</div> <div>5. Informasi Dan Komunikasi Publik</div> <div>A) Komunikasi Publik</div> <div>1 Komunikasi publik</div> <div>a) Program komunikasi publik</div> <div>b) Monitoring dan evaluasi</div> <div>2 Pengelolaan opini publik</div> <div>a) Pengumpulan opini publik</div> <div>b) Pengolahan opini publik</div> <div>3 Layanan komunikasi publik</div> <div>a) Pengumpulan data</div> <div>b) Pengolahan data</div> <div>B) Pengolahan dan Penyediaan Informasi</div> <div>1 Informasi layanan hukum dan keamanan</div> <div>a) Politik dan keamanan</div> <div>b) Hukum dan hak asasi manusia</div> <div>2 Informasi perekonomian</div> <div>a) Keuangan, perbankan dan jasa</div> <div>b) Industri dan perdagangan</div> <div>3 Informasi kesejahteraan rakyat</div> <div>a) Agama, sosial dan budaya</div> <div>b) Pendidikan kesehatan dan lingkungan hidup</div>	<div>Biasa/Terbuka</div> <div>Biasa/Terbuka</div>	<div>Eselon IV</div> <div>Eselon IV</div>	<div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div>	<div>DISKOMINFO</div> <div>DISKOMINFO</div>
	<div>C) Pengelolaan Media Publik</div> <div>1 Media cetak</div> <div>2 Media online</div> <div>3 Media luar ruang dan audio visual</div> <div>D) Kemitraan Komunikasi</div> <div>1 Kemitraan komunikasi</div>	<div>Biasa/Terbuka</div> <div>Biasa/Terbuka</div>	<div>Eselon IV</div> <div>Eselon IV</div>	<div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div>	<div>DISKOMINFO</div> <div>DISKOMINFO</div>

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	a) Program kemitraan pemerintahan dan lembaga negara b) Monitoring dan evaluasi 2 Kemitraan media dan dunia usaha a) Program kemitraan media dan dunia usaha b) Monitoring dan evaluasi 3 Kemitraan organisasi kemasyarakatan dan profesi a) Program kemitraan organisasi kemasyarakatan dan profesi b) Monitoring dan evaluasi E) Layanan Informasi Internasional 1 Layanan informasi media asing a) Program layanan informasi media asing b) Monitoring dan evaluasi 2 Layanan informasi perwakilan negara asing dan lembaga internasional a) Program layanan informasi perwakilan negara asing dan lembaga b) Monitoring dan evaluasi layanan informasi 3 Layanan informasi masyarakat luar negeri a) Program layanan informasi b) Monitoring dan evaluasi layanan informasi 6. Pusat Data Dan Sarana Informatika A) Infrastruktur Informatika 1 Jaringan a) Login administrator website/kode akses elektronik b) Setting konfigurasi network c) Segment network d) Security network e) Management bandwidth f) Lokasi server g) Internet protocol/IP address private 2 Piranti teknologi informatika	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO
		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO
	3 Keamanan informasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO
	B) Sistem dan Data 1 Portal dan konten	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	<div>2 Pengumpulan dan pengolahan data<div>a) Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi)</div><div>b) Data administrasi radio dan TV</div><div>c) Sistem manajemen database</div></div> <div>3 Pengembangan aplikasi</div> <div>C) Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat<div>1 Pelayanan informasi<div>a) Media baru</div><div>b) Media konvensional</div><div>c) Dokumentasi dan perpustakaan</div></div><div>2 Hubungan masyarakat<div>a) Publikasi</div><div>b) Analisis berita dan pengelolaan opini publik</div><div>c) Hubungan dan eksternal</div></div><div>3 Bimbingan teknis<div>Bimbingan sumberdaya perangkat Pos dan Informatika, penyelenggaraan Pos dan Informasi dan komunikasi publik, data dan sarana informasi dan humas</div></div><div>4 Evaluasi<div>Evaluasi sumber daya dan perangkat Pos dan Informatika, penyelenggaraan Pos dan Informasi aplikasi dan komunikasi publik, data dan sarana informatika, informasi dan humas</div></div></div>	<div>Terbatas</div> <div>Biasa/Terbuka</div> <div>Biasa/Terbuka</div>	<div>Eselon III</div> <div>Eselon IV</div> <div>Eselon IV</div>	<div>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div> <div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div>	<div>DISKOMINFO</div> <div>DISKOMINFO</div> <div>DISKOMINFO</div>
	<div>K. PERSANDIAN</div> <div>1. Kebijakan<div>A) Kebijakan: pembinaan dan pengendalian persandian, pengamanan<div>1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan</div><div>2 Penyiapan kebijakan</div><div>3 Perumusan kebijakan</div><div>4 Masukan dan dukungan kebijakan</div><div>5 Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)</div></div></div>	<div>Biasa/Terbuka</div>	<div>Eselon IV</div>	<div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div>	<div>DISKOMINFO</div>
	<div>2. Pembinaan Dan Pengendalian Persandian<div>A) Pembinaan dan pengendalian sumber daya manusia, materiil dan<div>1 SDM<div>a) Data personel Sandi</div><div>b) Pembinaan Personel Sandi</div><div>c) Pengawasan dan Pengendalian</div></div></div></div>	<div>Biasa/Terbuka</div>	<div>Eselon IV</div>	<div>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</div>	<div>DISKOMINFO</div>

Batas

Terbatas

Eselon III

Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu

DISKOMINFO

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	2 Materiil dan Jaring Komunikasi Sandi a) Data Materiil dan JKS b) Analisa Kebutuhan Materiil dan Jaringan Komunikasi Sandi c) Perangkat Khusus Persandian d) Data Spesifikasi Sarana Komunikasi Sandi e) Perangkat Keras Persandian/Mesin Sandi f) Perangkat Lunak Sandi 3 Akreditasi dan Sertifikasi a) Akreditasi Diklat b) Sertifikasi Alat	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO DISKOMINFO DISKOMINFO
	3. Pengamanan Persandian A) Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kript 1 Pelaksanaan (Perencanaan Dan Administrasi) 2 Pelaporan B) Analisis sinyal: teknik sandi dan kript 1 Pelaksanaan (Perencanaan Dan Administrasi) 2 Pelaporan C) Meteriil sandi: sistem dan peralatan 1 Pelaksanaan (Perencanaan Dan Administrasi)	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO DISKOMINFO DISKOMINFO
	2 Kunci Sistem Sandi 3 Data Penempatan Jaringan, Peralatan Sandi, dan Tempat Kegiatan Sandi 4 Pelaporan	Terbatas Terbatas Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO DISKOMINFO
	4. Pengkajian Persandian : Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi A) Perencanaan Pengkajian B) Administrasi Pengkajian C) Pelaksanaan D) Pelaporan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO
	L PENGAWASAN 1. Rencana Pengawasan a. Rencana strategis pengawasan b. Rencana kerja tahunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Inspektorat

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	<div><div>c. Rencana kinerja tahunan</div><div>d. Penetapan kinerja tahunan</div><div>e. Rakor pengawasan tingkat Provinsi</div><div>2. Pelaksanaan Pengawasan</div><div>a. Laporan hasil audit (LHA), Laporan hasil pemeriksaan (LHP),Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI), yang</div><div>b. Laporan hasil audit (LHA),Laporan hasil pemeriksaan (LHP),Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO),Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Laporan Akuntan (LA),Laporan Auditor Independen (LAI),yang tidak</div><div>c. Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut</div><div>d. Laporan perkembangan penanganan surat pengaduan masyarakat</div><div>e. Laporan Pemutakhiran Data</div><div>f. Laporan Perkembangan Barang Milik Negara</div><div>g. Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review Pemerintah Prov. Kalsel</div><div>h. Good Corporate Governance (GCG)</div></div>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Inspektorat

BUPATI TANAH BUMBU

H. SUDIAN NOOR

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
I		FUNGSI KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN PEJABAT NEGARA				
		1 FORMASI PEGAWAI	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		a. Usulan dari Unit Kerja SKPD, disertai: 1) analisa jabatan 2) beban kerja				
		b. Usulan Permintaan Formasi kepada Menpan dan RB dan Kepala BKN				
		c. Persetujuan Menpan dan RB				
		d. Penetapan Formasi ASN e. Penetapan Formasi Khusus				
2		PENGADAAN PEGAWAI				
		a. Proses Penerimaan Pegawai meliputi: 1) Pengumuman 2) Seleksi Administrasi 3) Pemanggilan Peserta Test 4) Pelaksanaan Ujian Tertulis 5) Keputusan Hasil Ujian 6) Wawancara	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		b. Penetapan Pengumuman Kelulusan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		c. Berkas Lamaran yang tidak diterima	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		d. Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP 1) Surat Lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan Kesehatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		e. Nota Usul Pengangkatan CASN menjadi ASN lebih dari 2 tahun	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
3		f. SK CASN/ASN Kolektif	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		PEMBINAAN KARIR PEGAWAI				
		a. Diklat/Kursus/Magang/Tugas Belajar/Ujian Dinas/Ijin Belajar Pegawai: 1) Surat Perintah/Surat Tugas/SK/Surat Ijin 2) Laporan Kegiatan Pengembangan Diri	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		b. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/Sertifikat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		c. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi PNS	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		d. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		e. Disiplin Pegawai 1) Daftar Hadir	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
4		f. Berkas Hukuman Disiplin	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		Penghargaan dan Tanda Jasa	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
5		PENYELESAIAN PENGELOLAAN KEBERATAN PEGAWAI	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
5		MUTASI PEGAWAI				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
6		a. Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Mutasi antar Unit	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		b. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		c. Mutasi Keluarga 1) Surat Izin Pernikahan/Perceraian 2) Surat Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian 3) Surat Nikah / Cerai 4) Akte Kelahiran Anak 5) Surat Keterangan Adopsi Anak 6) Surat Keterangan Meninggal Dunia	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		d. Usul kenaikan pangkat/golongan/jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		e. Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		f. Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai	Biasa/Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		g. Peninjauan Masa Kerja	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		h. Berkas Baperjakat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		ADMINISTRASI PEGAWAI				
		a. Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		b. Cuti Besar	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
7		c. Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		d. Cuti Alasan Penting	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		e. Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		f. Dokumentasi Identitas Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		1) Usul Penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu				
		2) Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan				
		3) Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)				
		4) Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)				
		g. Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kependidikan (DUK)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		h. Berkas Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		KESEJAHTERAAN PEGAWAI				
		a. Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		b. Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai/ASKES	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		c. Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		d. Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		e. Berkas tentang Layanan Pakaian Dinas	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		f. Berkas tentang Layanan Pegawai yang meninggal karena dinas	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		g. Berkas tentang Pemberian Tali Kasih	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		h. Berkas tentang Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
		i. Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
8		PEMBERHENTIAN PEGAWAI TANPA HAK PENSIUN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
9		PERSELISIHAN/SENKETA KEPEGAWAIAN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
10		USUL PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN PENSIUN PEGAWAI/JANDA/ DUDA DAN ASN YANG MENINGGAL	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BKD Tanah Bumbu
11		BERKAS PERSEORANGAN APARATUR SIPIL NEGARA	Rahasia	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	BKD Tanah Bumbu
		a. Berkas Lamaran yang diterima				
		b. Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya				
		c. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN				
		d. SK Pengangkatan CASN				
		e. Hasil Pengujian Kesehatan				
		f. SK Pengangkatan ASN				
		g. SK Peninjauan Masa Kerja				
		h. SK Kenaikkan Pangkat				
		i. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan				
		j. SK Pengangkatan dalam Jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional				
		k. SK Perpindahan Wilayah Kerja				
		l. SK Perpindahan Antar Instansi				
		m. SK Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN)				
		n. Berita Acara Pemeriksaan				
		o. SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin ASN				
		p. SK Perbantuan/Dipekerjakan di luar Instansi Induk				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		q. SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan r. SK Pemberian Uang Tunggu s. SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara t. SK Pengalihan ASN u. SK Pemberhentian sebagai ASN v. SK Pemberhentian Sementara w. Surat Keterangan Pernyataan Hilang x. Surat Keterangan Kembalinya ASN yang dinyatakan hilang y. SK Penggantian Nama z. Surat perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran aa. Akta Nikah/Cerai bb. Akta Kelahiran cc. Isian Formulir PUASN dd. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ASN dan Jabatan ee. Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol ff. Surat Keterangan Mutasi Keluarga gg. Surat Keterangan Meninggal Dunia/hilang hh. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan ii. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional jj. Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus kk. Surat Pemberitahuan Kenaikkan Gaji Berkala ll. Surat Tugas/ Izin Belajar Dalam/ Luar Negeri mm. Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri nn. Kartu Daftar Ulang (Kardaf) ASN oo. Ijazah/Sertifikat pp. SK Penempatan/Penarikan Pegawai qq. SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk rr. Surat Pertimbangan Status ASN ss. SK Pengaktifan Kembali Sebagai ASN tt. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah uu. SK Pensiun				
12		BERKAS PERSEORANGAN PEJABAT NEGARA	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	BKD Tanah Bumbu
13		BERKAS PERSEORANGAN PEJABAT LAINNYA a. Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD b. Ketua, Wakil Ketua, Anggota KPUD, dan Bawaslu	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	BKD Tanah Bumbu

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
14		c. Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Lainnya BERKAS PERSEORANGAN KEPALA SKPD	Rahasia	Eselon II	serta merusak kemitraan dan reputasi Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	BKD Tanah Bumbu
II		FUNGSI KEUANGAN A RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P) 1. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) <ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Musrenbang - Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja) b. Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah c. KUA beserta Nota Kesepakatannya d. Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) e. Nota Kesepakatan PPA f. Prioritas Plafon Anggaran 2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang telah disetujui b. Dokumen RKA-SKPD 3. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) <ul style="list-style-type: none"> a. Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Nota Keuangan Pemerintah - Materi RAPBD b. Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah c. Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang RaPerda APBD d. Dokumen Rancangan Penjabaran APBD beserta lampirannya e. Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Gubernur tentang RAPBD beserta penjabarannya 	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
			Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
			Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		f. Hasil Evaluasi Gubernur tentang RAPBD g. Penetapan Perda APBD oleh Gubernur beserta penjabarannya h. Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) a. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan 1 Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2 Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja) 3 Dokumen evaluasi pelaksanaan RKPD 4 Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah 5 Prioritas Plafon Anggaran Perubahan b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan yang telah disetujui Sekretaris Daerah c. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 1 Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD Perubahan: Nota Keuangan Pemerintah Materi RAPBD 2 Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 3 Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang RaPerda APBD Perubahan 4) Dokumen Rancangan Penjabaran APBD Perubahan beserta 5 Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Gubernur tentang RAPBD Perubahan beserta penjabarannya 6 Hasil Evaluasi Gubernur tentang RAPBD Perubahan 7 Penetapan Perda APBD Perubahan oleh Gubernur beserta 8 Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Perubahan 5 Draf Rencana Kerja Pemerinta Kabupaten Klaten (Renja) dan daraf Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta RKA murni dan perubahan sebelum disahkan 6 <i>Exercise/</i> perhitungan dan Rancangan APBD Perubahan Pemerintah Provinsi (sebelum disampaikan dan dibahas DPRD) 7 <i>Exercise/</i> perhitungan dan Rancangan APBD Perubahan Pemerintah Provinsi (sebelum disampaikan dan dibahas DPRD)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
			Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
			Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	BPKAD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		8 Rancangan KUA 9 Rancangan PPAS 10 Rancangan PPAS Perubahan 11 Rancangan KUPA 12 DPA-SKPD Provinsi Kalimantan Selatan 13 DPPA-SKPD Provinsi Kalimantan Selatan 14 Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah dan besaran uang yang dihibahkan atas beban APBD 15 DPA PPKD B PENYUSUNAN ANGGARAN 1 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten 2 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi 3 Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah 4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 5 Data penerimaan APBD yang dikelola Bendaharawan Umum Daerah C PELAKSANAAN ANGGARAN 1. Surat Penyedia Dana (SPP, SPM, dan Sp2D) : UP, GU, TU, LS	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon III Eselon IV Eselon IV Eselon III	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan	BPKAD BPKAD BPKAD BPKAD BPKAD BPKAD BPKAD BPKAD BPKAD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<p>2 Pendapatan</p> <p>a. Pendapatan Asli Daerah</p> <p>1 Surat Ketetapan Pajak Daerah</p> <p>2 Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pajak Hotel -Pajak Restoran -Pajak Hiburan -Pajak Reklame -Pajak Penerangan Jalan -Pajak Mineral Bukan Logam Bantuan -Pajak Parkir -Pajak Air Tanah -Pajak Sarang Burung Walet -PBB Sektor Perdesaan dan perkotaan -Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) <p>3 Surat Ketetapan Retribusi Daerah</p> <p>4 Bukti Penarikan Retribusi, antara lain :</p> <p>a) Retribusi Jasa Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> -Retribusi Pelayanan Kesehatan -Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil -Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat -Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum -Retribusi Pelayanan Pasar -Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor -Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran -Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta -Retribusi Pengujian Kapal Perikanan <p>b) Retribusi Jasa Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> -Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah -Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan -Retribusi Tempat Pelelangan -Retribusi Terminal -Retribusi Tempat Khusus Parkir -Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa -Retribusi Penyedotan Kakus -Retribusi Rumah Potong Hewan -Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga -Retribusi Penyebrangan di atas Air -Retribusi Pengolahan Limbah Cair 	Biasa/Terbuka	Eselon IV	<p>tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu</p>	BPKAD

[illegible]

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		d. Penyertaan Modal kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Daerah				
		5 Dokumen Penatausahaan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> - Surat Penyediaan Dana (SPD) - Surat Permohonan Pembayaran (SPP) - Surat Perintah Membayar (SPM) - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		6 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana <ul style="list-style-type: none"> - Buku Kas Umum (BKU) - Buku Kas Pembantu (BKP) - Ringkasan Perincian Pengeluaran Objek - Rekening Koran Bank - Laporan Pertanggungjawaban Fungsional dan Administrasi - Bukti penyetoran Pajak - Register Penutupan Kas - Berita Acara Pemeriksaan - Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan Termasuk Arsip Data Komputer (ADK) - Laporan Pendapatan Negara - Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) Bulanan/Tiwulan/ Semesteran - Bukti Kas Pengeluaran berikut lampirannya 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		7 Daftar Gaji	Rahasia	Eselon IV	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	BPKAD
		8 Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		9 Pertanggungjawaban APBD <ul style="list-style-type: none"> - Materi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Daerah - Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Pemerintah - Pemandangan umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD oleh DPRD - Jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggung jawaban APBD - Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD terhadap Raperda 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pertanggung jawaban APBD - Permohonan Evaluasi Gubernur tentang Raperda dan Raperbup Pertanggung jawaban APBD - Evaluasi Gubernur tentang Raperda Pertanggungjawaban dan Raperbub APBD - Perda dan Pergub Pertanggungjawaban APBD 10 Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari : - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Neraca - Laporan Perubahan Saldo Lebih - Laporan Operasional - Laporan Arus Kas - Laporan perubahan Ekuitas - Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		11 Data Belanja Bendaharawan Umum Daerah baik berupa belanja pegawai dan belanja lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		12 Sgi Penguji SP2D yang disampaikan ke Bank Kalsel untuk pencairan dana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		13 Dokumen rekonsiliasi dan verifikasi laporan keuangan atas investasi daerah, investasi permanen dan Non permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		14 Dokumen keuangan penyusunan pertanggungjawaban dana transfer Pemerintah Pusat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		15 Laporan Keuangan Pemerintah yang belum diaudit (unaudited) oleh auditor internal dan eksternal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		D PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI				
		1. Dokumen Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (<i>Blue Book</i>)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat	BPKAD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		2. Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (<i>Green Book</i>)	Terbatas	Eselon III	mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		3. Dokumen <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU), dan dokumen sejenisnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		4. Dokumen <i>Loan Agreement</i> (PHLN) seperti : <i>Draft Agreement, Legal Opinion</i> , Surat menyurat dengan <i>Lender</i>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		5. Dokumen Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, a.l. : Usulan Luncuran Dana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		6. Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya : - <i>Reimbursement</i> - <i>Direct Payment/ Transfer Procedure</i> - <i>Special Commitment/ L/C Opening</i> - <i>Special Account/ Imprest Fund</i>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		7. Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (<i>Payment Advice</i>)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		8. Dokumen Realisasi Pencairan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, antara lain: SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		9. <i>Replenishment</i> (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain: No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA), Statement of Expenditure (SE)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		10 <i>Staff Appraisal Report</i>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		11. <i>Report</i> /Laporan yang terdiri dari: - <i>Progress Report</i> - <i>Monthly Report</i> - <i>Quarterly Report</i>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		12. Laporan Hutang Daerah : - Laporan Pembayaran Hutang Daerah - Laporan Posisi Hutang Daerah	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		13. <i>Completion Report/ Annual Report</i>	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		14. Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		E PENGELOLAAN APBD/DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)				
		1. Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan: - Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran - Pejabat Pembuat Komitmen - Kuasa Pengguna Barang/Jasa - Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah - Pejabat Penandatanganan SPM - Bendahara Penerimaan/Pengeluaran	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		F SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD)				
		1. Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		2. Dokumen Kebijakan Akuntansi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	BPKAD
		3. Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
		4 Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
		5 Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
		G PENYALURAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		1. Surat Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara atas Pengguna Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Spesimen Tanda Tangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
		2. Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya : - SPP-LS, SPP-GU, SP3, Daftar Perincian Penggunaan Dana, SPPR-LS, SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, Bilyet Giro, SPM Nihil - Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta bukti Pendukungnya al : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit - Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
		3. Buku Rekening Bank	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
		4. Keputusan Pembukuan Rekening	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
		5. Pembukuan anggaran terdiri dari : Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan Daftar Pembukuan Pencarian/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencarian (DHP) dan Rekening Koran	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
		H PENERIMAAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN				
		1. Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
		2. Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn, Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan, dll	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
		I PENGELOLAAN ANGGARAN PILKADA DAN BIAYA BANTUAN PEMILU DARI APBD				
		1. Dokumen Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan PEMILU dari APBD a. Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu b. Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa,	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<p>Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan</p> <p>c. Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD, PPK, PPS, KPPS dan Panwasda, Permohonan Pengajuan RKA KPUD</p> <p>d. Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu</p> <p>e. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota</p> <p>f. Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD</p> <p>g. Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada</p> <p>h. Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD</p> <p>i. Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD</p> <p>J. PELAKSANAAN ANGGARAN PILKADA DAN ANGGARAN BIAYA BANTUAN PEMILU</p> <p>1. Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu</p> <p>2. Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu</p> <p>3. Berkas Setor Sisa Dana Pilkada/Pemilu termasuk Setor Komisi Pengadaan Barang/Jasa, Rabat, Bunga, Jasa Giro</p> <p>4. Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank</p> <p>5. Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya</p> <p>K. PELAKSANAAN ANGGARAN OPERASIONAL PEMILU</p> <p>1. Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu dan PPKO Provinsi termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya</p> <p>2. Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer</p>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Terbatas</p>	<p>Eselon IV</p> <p>Eselon III</p> <p>Eselon III</p> <p>Eselon III</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon III</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Memiliki dampak yang mengganggu</p>	<p>BPKAD</p> <p>BPKAD</p> <p>BPKAD</p> <p>BPKAD</p> <p>BPKAD</p> <p>BPKAD</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Bank			pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	
		3. Berkas Penyaluran Biaya Pemilu ke PPK, PPS dan KPPS termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank dan lain-lain	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
		L PEMERIKSAAN/PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH				
		1. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
		2. Pelaksanaan Pengawasan				
		a Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
		b Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
		Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut				
		c Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
		d Laporan Perkembangan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
		e Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review Pemerintah Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
		f Good Corporate Governance (GCG)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
		3. Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah:	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BPKAD
		a Tuntutan Perbendaharaan				
		b Tuntutan Ganti rugi				
III		FUNGSI NON KEUANGAN NON KEPEGAWAIAN				
		A PERENCANAAN				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang /Master Plan (RPJP) b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) c. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan d. Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara(PPAS) 	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA BAPPEDA
		2 Program Kerja Tahunan <ul style="list-style-type: none"> a. Usulan Unit Kerja beserta data pendukung b. Program Kerja Tahunan Unit Kerja c. Program Kerja Tahunan 	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		3. Penetapan / Kontrak Kinerja <ul style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Unit Kerja b. Kepala SKPD 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		4 Laporan <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Berkala <ul style="list-style-type: none"> Laporan Harian Laporan Mingguan Laporan Bulanan Laporan Triwulan Laporan Semesteran Laporan Tahunan Unit Kerja Laporan Tahunan SKPD b. Laporan Insidentil 	Biasa / Terbatas	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		5 Evaluasi Program <ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi program unit kerja b. Evaluasi program SKPD 	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		6 Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		7 Konsultasi Perencanaan Pembangunan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		8 Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		9 Aksi Strategis Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Rancangan Awal Perencanaan Aksi Strategis b. Rapat pembahasan rancangan awal dengan SKPD c. Sosialisasi SKPD 	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		d. Rencana Akhir Perencanaan Aksi Strategis e. Penetapan Perencanaan Aksi Strategis 10 Perencanaan Pendanaan Pembangunan a. Pendanaan APBN b. Pendanaan APBD B HUKUM	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		1 Program Legislasi a. Program Legislasi b. Bahan / Materi program legislasi daerah 2 Rancangan Peraturan Perundang-Undangan a. Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Undang-undang, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan b. Rancangan Peraturan Pemerintah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai diundangkan c. Rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden, termansuk naskah akademik,rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan d. Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik,rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan 3. Peraturan pimpinan Lembaga Negara dan Badan Pemerintah/instansi : Peraturan /Keputusan Gubernur /Bupati/Walikota termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Hukum
		4. Keputusan /Ketetapan Pimpinan Lembaga Negara dan Badan a. Keputusan /Ketetapan Bupati b. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Hukum
		5. Instruksi / Surat Edaran : a. Instruksi / Surat Edaran Gubernur /Bupati/Walikota b. Instruksi / Surat Edaran Pejabat setingkat eselon I dan II termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Hukum
		6. Surat Perintah :	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<p>a. Surat Perintah Kepala Arsip Nasional Republik</p> <p>b. Surat Perintah Pejabat setingkat eselon I dan II</p> <p>7. Standar / Pedoman / Prosedur Kerja / Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknis yang bersifat nasional / regional / internasional termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir</p> <p>8. Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding(MoU)/ Kontrak/Perjanjian</p> <p>Kerjasama :</p> <p>a. Dalam Negeri</p> <p>b. Luar Negeri</p> <p>9. Dokumentasi Hukum</p> <p>Undang-Undang,Peraturan Pemerintah,Keputusan Presiden dan peraturan-peraturan yang dijadikan referensi</p> <p>10. Sosialisasi / Penyuluhan / Pembinaan Hukum</p> <p>11. Bantuan / Konsultasi Hukum /Advokasi</p> <p>Berkas tentang pemberian bantuan/konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)</p> <p>12. Kasus / Sengketa Hukum</p> <p>a. Pidana</p> <p>Berkas tentang kasus/sengketa pidana,baik kejahatan maupun pelanggaran :</p> <p>- Proses verbal mulai dari penyelidikan,penyidikan sampai dengan vonis</p> <p>- Berkas pembelaan dan bantuan hukum</p> <p>- Telaah hukum dan opini hukum</p> <p>b. Perdata</p> <p>Berkas tentang kasus/sengketa perdata :</p> <p>c. Tata Usaha Negara</p> <p>- Proses verbal mulai dari penyelidikan,penyidikan sampai dengan vonis</p> <p>- Berkas pembelaan dan bantuan hukum</p> <p>- Telaah hukum dan opini hukum</p> <p>- Berkas perkara PTUN sebelum disampaikan ke persidangan</p> <p>d. Perburuhan</p> <p>Berkas tentang kasus/sengketa Perburuhan :</p> <p>- Proses verbal mulai dari penyelidikan,penyidikan sampai dengan</p>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Terbatas</p>	<p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon III</p>	<p>mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p>	<p>Bagian Hukum</p> <p>Bagian Hukum</p> <p>Bagian Hukum</p> <p>Bagian Hukum</p> <p>Bagian Hukum</p> <p>Bagian Hukum</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<p>vonis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkas pembelaan dan bantuan hukum - Telaah hukum dan opini hukum <p>e. Arbitrase</p> <p>Berkas tentang kasus/sengketa Perburuhan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis - Berkas pembelaan dan bantuan hukum - Telaah hukum dan opini hukum <p>f. Sengketa adat</p> <p>g. Kasus-kasus yang berkaitan dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)</p> <p>h. Anak kasus pelecehan seksual/kekerasan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban</p> <p>13. Perizinan</p> <p>14. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hak Cipta b. Hak Paten <ul style="list-style-type: none"> Paten Biasa Paten Sederhana c. Hak desain Industri d. Hak Rahasia Dagang e. Hak Merk f. DTLS (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) <p>15. Permohonan Haki yang ditolak (Hak Cipta, Paten, Desain Industri,</p> <p>C ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN</p> <p>1. Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan b. Perubahan c. Pembubaran <p>2. Uraian Jabatan dan Tata Kerja</p> <p>3. Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional</p>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p>	<p>Bagian Hukum</p> <p>Bagian Hukum</p> <p>Bagian Hukum</p> <p>Bagian Ortala</p> <p>Bagian Ortala</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		4. Evaluasi Kelembagaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Ortala
		D KEARSIPAN				
		1 Kebijakan Kebijakan tentang pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
		2 Pembinaan kearsipan A) Bina Arsiparis 1) Bimbingan konsultasi arsiparis	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
		2) Penilaian Arsiparis	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	
		3) Pemilihan arsiparis teladan a) Penyelenggaraan b) Berkas penetapan arsiparis teladan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
		4) Database arsiparis	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
		B) Bimbingan dan Konsultasi (Sosialisasi, Seminar, Lokakarya, Workshop) 1) Penerapan sistem dalam penyelenggaraan kearsipan 2) Penggunaan sarana dan prasarana kearsipan 3) Unit kearsipan 4) Sumber daya Manusia	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	
		C) Supervisi dan Evaluasi 1) Perencanaan 2) Pelaksanaan 3) Laporan hasil supervisi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
		D) Data Base Bimbingan, Konsultasi dan Supervisi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
		E) Fasilitasi Kearsipan 1) SDM kearsipan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		2) Prasarana dan sarana F) Unit Kearsipan Teladan 1) Penyelenggaraan 2) Berkas penetapan Unit kearsipan teladan G) Jadwal Retensi Arsip H) Tata Naskah Dinas (TND) I) Klasifikasi arsip J) Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (KKAAD)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
		3 Pengelolaan Arsip A) Pengelolaan arsip Dinamis 1) Penciptaan a) Pencatatan - Buku agenda - Kartu kendali - Lembar pengantar / buku ekspedisi. 2) Penggunaan a) Pengklasifikasian Pengamanan dan akses arsip b) Peminjaman 3) Pemeliharaan a) Pemberkasan - daftar arsip Aktif b) Penataan Arsip inaktif - Pengaturan fisik - Pengolahan informasi arsip - Penyusunan daftar arsip inaktif c) Penyimpanan Arsip - Skema penyimpanan arsip aktif dan inaktif - Peta lokai penyimpanan arsip - pengamanan d) Alih Media - Kebijakan alih alih media - Autentikasi - Berita acara - Daftar arsip yang alihmediakan e) Program arsip vital	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas Biasa/Terbuka Terbatas	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon III Eselon IV Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip Dispersip Dispersip Dispersip Dispersip Dispersip

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		4) Autentikasi Arsip Dinamis <ul style="list-style-type: none"> a) Pembuktian autensitas b) Pendapat tenaga ahli c) Pengujian d) Penetapan autensitas arsip statis/surat pernyataan penciptaan arsip 	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
		5) Penyusutan <ul style="list-style-type: none"> a) Pemindahan Arsip inaktif <ul style="list-style-type: none"> - berita acara pemindahan - daftar arsip yang dipindahkan b) Pemusnahan Arsip yang tidak bernilai guna <ul style="list-style-type: none"> - penilaian panitia penilai - permintaan persetujuan (kepala ANRI, Kepala lembaga kearsipan) - penetapan arsip yang dimusnahkan - berita acara pemusnahan - daftar arsip yang dimusnahkan c) Penyerahan arsip Statis <ul style="list-style-type: none"> - pembentukan panitia penilai - notulen rapat penilai - surat pertimbangan panitia penilai - surat persetujuan dari kepala LKD - surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh dan dapat dipergunakan - keputusan penetapan penyerahan - berita acara penyerahan arsip - daftar arsip yang diserahkan 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
		6) Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis <ul style="list-style-type: none"> a) Database pengolahan arsip aktif b) Database pengolahan arsip inaktif c) Database arsip Statis 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip
		B) Pengelolaan Arsip Statis <ul style="list-style-type: none"> 1) Akuisisi <ul style="list-style-type: none"> a) Monitoring fisik dan dan daftar b) Verifikasi terhadap daftar arsip c) Menetapkan status arsip statis d) persetujuan untuk penyerahan e) penetapan arsip yang diserahkan f) berita acara penyerahan arsip g) daftar arsip yang diserahkan 2) Sejarah Lisan <ul style="list-style-type: none"> a) administrasi pelaksanaan sejarah lisan 	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Dispersip

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> b) Hasil wawancara sejarah lisan <ul style="list-style-type: none"> - berita acara wawancara sejarah lisan - laporan kegiatan - hasil wawancara (kaset / CD) dan transkrip 3) Daftar Pencarian Arsip Statis <ul style="list-style-type: none"> a) pengumuman b) akuisisi daftar pencairan arsip statis 4) Penghargaan dan imbalan 5) Pengolahan <ul style="list-style-type: none"> a) Menata informasi b) Menata fisik c) menyusun sarana bantu temu balik <ul style="list-style-type: none"> - Guide - Daftar arsip statis - inventaris arsip statis 6) Preserfasi <ul style="list-style-type: none"> a) Preventif <ul style="list-style-type: none"> - Penyimpanan - pengendalian hama terpadu - Reproduksi (ahli media) <ul style="list-style-type: none"> * Berita acara alih media * Daftar arsip yang dialihmediakan - perencanaan penanggulangan bencana b) Kuratif <ul style="list-style-type: none"> - Perawatan arsip 7) a) Pembuktian autensitas <ul style="list-style-type: none"> b) Pendapat tenaga ahli c) Pengujian d) Penetapan autensitas arsip statis/surat pernyataan 8) Akses Arsip Statis <ul style="list-style-type: none"> a) Layanan arsip b) Penerbitan naskah sumber <ul style="list-style-type: none"> - Administrasidan proses penyusunan - Hasil naskah sumber arsip c) Pameran arsip 9) Jasa Kearsipan <ul style="list-style-type: none"> a) Konsultasi kearsipan b) Manual kearsipan c) Penata arsip d) Otomasi kearsipan e) Penyimpanan arsip f) Perawatan dan pemeliharaan arsip g) Database jasa kearsipan 				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		E KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN				
		1. Telekomunikasi : Administrasi penggunaan / langganan peralatan telekomunikasi meliputi : telepon,radio,teleks,TV kabel dan internet	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Umum
		2. Perjalanan Dinas a. Dalam Negeri b. Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Umum
		3. Administrasi penggunaan fasilitas kantor meliputi permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas dan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Umum
		4. Risalah/Notulen Rapat a. Rapat staf b. Rapat pimpinan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Umum
		5. Administrasi penyediaan konsumsi dan akomodasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Umum
		6. Pengurusan kendaraan dinas: a. Pengurusan surat-surat kendaraan dinas b. Pemeliharaan dan perbaikan c. Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Umum
		7. Pemeliharaan gedung dan taman : a. Pertamanan /landscaping b. Penghijauan c. Perbaikan gedung d. Perbaikan rumah dinas /wisma e. Kebersihan gedung dan taman	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Umum
		8. Pengelolaan jaringan listrik, air, telepon, dan komputer : a. Perbaikan /pemeliharaan b. Pemasangan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Umum
		9. Ketertiban dan keamanan a. Pengamanan,penjagaan,dan pengawalan terhadap pejabat, kantor, dan rumah dinas : 1). Daftar nama satuan pengamanan 2). Daftar jaga / daftar piket 3). Catatan gangguan / pelanggaran /kejadian 4). Surat ijin keluar masuk orang atau barang b. Laporan ketertiban dan keamanan 1). Kehilangan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		2). Kerusakan 3). Kecelakaan 4). Gangguan 10. Administrasi pengelolaan parkir 11. Administrasi pakaian dinas pegawai,satpam,petugas kebersihan dan pegawai lainnya F HUBUNGAN MASYARAKAT 1. Keprotokolan : a. Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar) b. Buku tamu c. Agenda kegiatan pimpinan lembaga/institusi d. Kunjungan dinas dalam dan luar negeri 1). Kunjungan dinas pimpinan lembaga /instansi 2).Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai e. Daftar nama/alamat kantor /pejabat 2. Dokumentasi/liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media : kertas/foto/video/rekaman suara /multimedia 3. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan : a. Kliping koran b. Brosur /Leaflet/poster /plakat c. Pengumuman /pemberitaan 4. Hubungan antar lembaga Negara dan Badan Pemerintah/Instansi : a. Hubungan antar lembaga pemerintah b. Hubungan dengan perusahaan c. Hubungan dengan perguruan tinggi /sekolah,termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapangan (PKL) d. Forum kehumasan (Bakohumas/Perhumas)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Umum
			Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Bagian Umum
			Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Kalsel	Diskominfo
			Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Diskominfo
			Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Diskominfo
			Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Diskominfo
			Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Diskominfo
			Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Diskominfo

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		e. Hubungan dengan media massa : 1). Siaran pers/konferensi pers/press release 2). Kunjungan wartawan /peliputan 3). Wawancara 5. Dengar pendapat/hearing DPR	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Diskominfo
		6. Bahan/materi pidato/sidang MPR, DPR, DPD, kabinet, DPRD, Muspida Provinsi/kabupaten/kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Diskominfo
		7. Naskah pidato sambutan yang belum dibacakan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Diskominfo
		8. Penerbitan Majalah, buletin, koran dan jurnal	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Diskominfo
		9. Publikasi melalui media cetak maupun elektronik	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Diskominfo
		10. Pameran/sayembara/lomba/festival, pembuatan spanduk dan iklan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Diskominfo
		11. Penghargaan/Tanda Kenang-kenangan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Diskominfo
		12. Administrasi pemberian penghargaan/tanda kenang-kenangan kepada masyarakat yang memiliki jasa prestasi besar	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	Diskominfo
		G PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN				
		1 Kebijakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan serta penddayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi : kelembagaan, sumberdaya dan jaringan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		2 Penelitian dan pengkajian a Rencana Kerja - Master plan / rencana strategis - Rencana kerja tahunan : proposal / <i>idea concept paper</i> (ICP) - Berkas / kontrak MoU kerjasama / material transfer agreement (MTA)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian penelitian b Administrasi penelitian : surat tugas / surat perintah, pembentukan tim kerja, dokumen / formulir c Pelaksanaan penelitian / pengkajian <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur / petunjuk - Data primer - Log Book - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Pelaksanaan survey - Laporan hasil pendataan / survey - Analisis / pengolahan data d Hasil penelitian / pengkajian / rekomendasi <ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil penelitian dan hasil luaran - Rekomendasi e Hasil penelitian dan pengkajian hasil jasa layanan 				
		3 Pengembangan dan Inovasi <ul style="list-style-type: none"> - Rencana Kerja - Administrasi pengembangan dan inovasi - Pelaksanaan - Hasil pengembangan / inovasi 	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		4 Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagunaan/replika/prototipe hasil penelitian/pengkajian/perekayasaan/pengembangan/inovasi : masyarakat, dunia industri, pemerintah	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		5 Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		6 Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi <ul style="list-style-type: none"> a Promosi b Permayarakatan 	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		7 Pembinaan penelitian/pengkajian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		8 Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		9 Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		10 Master proceeding/jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi a. Penerbitan: jurnal / buletin ilmiah, bahan publikasi khusus b. Leaflet dan booklet c. Kamus istilah	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		11 Hak atas kekayaan intelektual (HAKI)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		12 Forum Komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		13 Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK a. Jasa laboratorium pengujian b. Jasa teknologi produksi c. Jasa studi d. Jasa penyewaan peralatan e. Jasa perbantuan tenaga ahli / profesi f. Jasa sertifikasi / kalibrasi dan sertifikasi g. Buku rekaman barang yang diuji / dikalibrasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		14 Sertifikasi personil peneliti	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		15 Akreditasi laboratorium	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BAPPEDA
		H PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
		1. Pedoman-pedoman kediklatan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD
		2. Kurikulum-kurikulum diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		3. Modul-modul diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD
		4. Panduan fasilitator	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD
		5. Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD
		6. Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD
		7. Akreditasi Lembaga Diklat <ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan akreditasi - Laporan hasil verifikasi lapangan - Berita acara rapat verifikasi - Berita acara rapat tim penilai - Surat keputusan penetapan akreditasi - Sertifikasi akreditasi - Laporan akreditasi lembaga diklat 	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD
		8. Sertifikasi sumber daya manusia kediklatan <ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan sertifikasi - Laporan hasil verifikasi lapangan - Berita acara rapat verifikasi - Berita acara rapat Tim penilai - Surat keputusan penetapan sertifikasi - Sertifikat sertifikasi - Laporan sertifikasi individual 	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD
		9. Sistem informasi diklat <ul style="list-style-type: none"> - Data lembaga diklat - Data prasarana diklat - Data sarana Diklat - Data pengelola diklat - Data penyelenggaraan diklat - Data widyaiswara - Data program diklat - Data peserta diklat 	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD BKD BKD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		10. Registrasi sertifikat STTPL peserta diklat a. Surat permohonan kode registrasi b. Buku registrasi c. Surat penyampaian kode registrasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD
		11. Rencana tahunan diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD
		12. Rencana penyelenggaraan diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD
		13. Penyelenggaraan diklat - Surat pemanggilan peserta - Surat keputusan tim penyelenggaraan diklat - Surat keputusan tim pengajar diklat - Panduan diklat - Laporan panitia penyelenggaraan diklat - Sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat - Daftar peserta diklat - Bahan ajar diklat - Daftar hadir peserta diklat - Daftar hadir widyaiswara - Formulir evaluasi diklat - Formulir evaluasi widyaiswara - Hasil formulasi evaluasi peserta diklat - Sertifikat/ STTPL - Sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD
		14. Laporan penyelenggaraan diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD
		15. Saran/Rekomendasi penyelenggaraan diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD
		16. Evaluasi penyeleggaraan diklat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		17 Evaluasi alumni pasca diklat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	BKD
		I KEPUSTAKAAN				
		1. Deposit Bahan Pustaka	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPERSIP
		a. Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				
		b. Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman				
		c. Terbitan Internasional dan Regional				
		d. Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				
		e. Bibliografi dan Katalog				
		f. - Bibliografi Nasional Indonesia (BNI)				
		- Bibliografi Daerah (BD)				
		- Katalog Induk Nasional (KIN)				
		Katalog Induk Daerah (KID)				
		Katalog Dalam Terbitan (KDT)				
		g. Pendaftaran Nomor <i>Internasional Standard Book Number</i> (ISBN)				
		h. Pendaftaran Nomor <i>Internasional Standard Music Number</i> (ISMN)				
		2. Pengembangan Koleksi				
		a. Akusisi				
		- Pembelian	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPERSIP
		- Hibah	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
		- Hadiah	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
		- Tukar Menukar	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
		- Implementasi Undang-Undang KCKR	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPERSIP
		- Terbitan Internal	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
		- Pendistribusian bahan pustaka surplus	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
		- Inventarisasi koleksi (Buku Induk)	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
		- Dokumen pengadaan bahan pustaka sebelum proses lelang	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPERSIP
		b. Pengolahan Bahan Pustaka	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPERSIP
		c. Pangkalan Data Katalog Koleksi	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
		3. Jasa Perpustakaan dan Informasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.	DISPERSIP
		a. Keanggotaan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Sirkulasi c. Referensi d. Alih Aksara, Alih Bahasa dan Kajian Naskah Nusantara e. Kerjama Perpustakaan <ul style="list-style-type: none"> - MoU - Perjanjian kerjasama - Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional f. Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan situs web - Pengembangan kemas ulang informasi multimedia - Pengembangan program aplikasi perpustakaan - Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital g. Pangkalan Data Layanan Perpustakaan 4. Preservasi Bahan Pustaka <ul style="list-style-type: none"> a. Konservasi <ul style="list-style-type: none"> - Perawatan Bahan Perpustakaan - Perbaikan Bahan Perpustakaan - Penjilidan Bahan Perpustakaan b. Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto) c. Transformasi Digital d. Kurasi Digital 5. Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Perpustakaan <ul style="list-style-type: none"> - Perpustakaan Umum - Perpustakaan Khusus - Perpustakaan Sekolah - Perpustakaan Perguruan Tinggi b. Akreditasi Perpustakaan <ul style="list-style-type: none"> - Permintaan akreditasi - Pemberian akreditasi - Pangkalan data perpustakaan yang diakreditasi c. Pangkalan Data Perpustakaan <ul style="list-style-type: none"> - Nomor Pokok Perpustakaan - Perpustakaan Berbasis Wilayah d. Pemasyarakatan Minat Baca <ul style="list-style-type: none"> Organisasi Perpustakaan - Forum Perpustakaan Umum - Forum Perpustakaan Khusus - Forum Perpustakaan Sekolah - Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi 	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tanah Bumbu	
			Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPERSIP
			Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPERSIP

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> - Gerakan Masyarakat Minat Baca - Organisasi Perpustakaan Lainnya <p>6. Pengembangan Pustakawan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikasi Tenaga Perpustakaan b. Pembinaan Tenaga Perpustakaan c. Penerbitan Jurnal d. Penilaian Jabatan Fungsional Pustakawan <ul style="list-style-type: none"> - Tim Penilai Pusat - Tim Penilai Unit Kerja - Tim Penilai Instansi - Tim Penilai Provinsi e. Masyarakat f. Evaluasi Tenaga Perpustakaan g. Pangkalan data Tenaga Perpustakaan h. Pangkalan data Tim Penilai Pustakawan <p>J TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI</p> <p>1. Kebijakan</p> <p>Kebijakan sumber daya dan perangkat Pos dan Informatika, penyelenggaraan Pos dan Informatika</p> <p>A) Standarisasi perangkat Pos dan Informatika</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Teknik Pos dan Telekomunikasi 2) Teknik komunikasi radio 3) Penerapan standar Pos dan Telekomunikasi 4) Kualitas pelayanan dan harmonisasi standar 5) Standar dan audit perangkat lunak <p>2. Sumber Daya Dan Perangkat</p> <p>A) Penataan Sumber Daya</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Alokasi spektrum dinas <ul style="list-style-type: none"> a) Alokasi dinas tetap b) Alokasi dinas bergerak darat 2 Alokasi spektrum Non dinas tetap dan bergerak darat <ul style="list-style-type: none"> a) Alokasi dinas penyiaran b) Alokasi dinas penerbangan, maritim dan satelit 3 Orbit satelit <ul style="list-style-type: none"> a) Notifikasi dan penataan Filinf Satelit b) Tata kelola hubungan antar penyelenggara 4) Ekonomi sumber daya 	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISPERSIP
		<p>1. Kebijakan</p> <p>Kebijakan sumber daya dan perangkat Pos dan Informatika, penyelenggaraan Pos dan Informatika</p> <p>A) Standarisasi perangkat Pos dan Informatika</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Teknik Pos dan Telekomunikasi 2) Teknik komunikasi radio 3) Penerapan standar Pos dan Telekomunikasi 4) Kualitas pelayanan dan harmonisasi standar 5) Standar dan audit perangkat lunak <p>2. Sumber Daya Dan Perangkat</p> <p>A) Penataan Sumber Daya</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Alokasi spektrum dinas <ul style="list-style-type: none"> a) Alokasi dinas tetap b) Alokasi dinas bergerak darat 2 Alokasi spektrum Non dinas tetap dan bergerak darat <ul style="list-style-type: none"> a) Alokasi dinas penyiaran b) Alokasi dinas penerbangan, maritim dan satelit 3 Orbit satelit <ul style="list-style-type: none"> a) Notifikasi dan penataan Filinf Satelit b) Tata kelola hubungan antar penyelenggara 4) Ekonomi sumber daya 	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO
		<p>1. Kebijakan</p> <p>Kebijakan sumber daya dan perangkat Pos dan Informatika, penyelenggaraan Pos dan Informatika</p> <p>A) Standarisasi perangkat Pos dan Informatika</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Teknik Pos dan Telekomunikasi 2) Teknik komunikasi radio 3) Penerapan standar Pos dan Telekomunikasi 4) Kualitas pelayanan dan harmonisasi standar 5) Standar dan audit perangkat lunak <p>2. Sumber Daya Dan Perangkat</p> <p>A) Penataan Sumber Daya</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Alokasi spektrum dinas <ul style="list-style-type: none"> a) Alokasi dinas tetap b) Alokasi dinas bergerak darat 2 Alokasi spektrum Non dinas tetap dan bergerak darat <ul style="list-style-type: none"> a) Alokasi dinas penyiaran b) Alokasi dinas penerbangan, maritim dan satelit 3 Orbit satelit <ul style="list-style-type: none"> a) Notifikasi dan penataan Filinf Satelit b) Tata kelola hubungan antar penyelenggara 4) Ekonomi sumber daya 	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> a) Analisa industri dan ekonomi b) Penanganan izin pria 5) Harmonisasi teknik spektrum <ul style="list-style-type: none"> a) Teknik spektrum antar lembaga b) Harmonisasi dan notifikasi terestrial B) Operasi Sumber Daya <ul style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan spektrum dinas <ul style="list-style-type: none"> a) Pelayanan dinas tetap b) Pelayanan dinas bergerak darat 2) Pelayanan spektrum Non Dinas <ul style="list-style-type: none"> a) Pelayanan dinas penyiaran b) Pelayanan dinas penerbangan, maritim dan satelit 3) Sertifikasi operator radio <ul style="list-style-type: none"> a) Pelayanan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk b) Pelayanan operator radio 4) Penanganan biaya <ul style="list-style-type: none"> a) Penanganan piutang biaya hak penggunaan frekuensi radio b) Analisa dan evaluasi biaya hak penggunaan frekuensi radio 5) Konsultasi dan data operasi sumber daya <ul style="list-style-type: none"> a) Konsultasi dan informasi sumber daya b) Pengelolaan data operasi sumber daya C) Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan sistem monitoring spektrum <ul style="list-style-type: none"> a) Rancang bangun teknologi monitoring spektrum b) Pemeliharaan sistem informasi monitoring spektrum 2) Pengelolaan sistem informasi manajemen spektrum <ul style="list-style-type: none"> a) Rancang bangun sistem informasi manajemen spektrum b) Pemeliharaan sistem informasi manajemen spektrum 3) Monitoring dan Penertiban Spektrum <ul style="list-style-type: none"> a) Monitoring dan Penertiban Spektrum Dinas Bergerak Tetap dan b) Monitoring dan Penertiban Spektrum Dinas Non Bergerak Tetap 4) Monitoring dan Penertiban <ul style="list-style-type: none"> a) Monitoring Standar Perangkat Pos dan Informatika b) Penertiban Standar Perangkat Pos dan Informatika 3. Penyelenggaraan Pos Dan Informatika <ul style="list-style-type: none"> A) Pos <ul style="list-style-type: none"> 1) Layanan dan Penerapan Pos Universal <ul style="list-style-type: none"> a) Layanan b) Penerapan Layanan 2) Layanan Pos Komersial 	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p>	<p>DISKOMINFO</p> <p>DISKOMINFO</p> <p>DISKOMINFO</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> a) Tata Kelola Layanan b) Data dan Informasi Layanan 3) Prangko dan Filateli <ul style="list-style-type: none"> a) Prangko b) Filateli 4) Iklim Usaha Pos <ul style="list-style-type: none"> a) Pos Universal b) Pos Komersial 5) Pentarifan Pos <ul style="list-style-type: none"> a) Layanan Pos Universal a) Pos Komersial B) Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Layanan Jaringan Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> a) Akses b) Backbone 2) Layanan Jasa Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> a) Jasa Teleponi Dasar, Nilai Tambah Teleponi, Sistem dan Transaksi Elektronik b) Jasa Multimedia 3) Penomoran telekomunikasi dan informatika <ul style="list-style-type: none"> a) Penomoran Telekomunikasi b) Penomoran Informatika 4) Tarif dan interkoneksi <ul style="list-style-type: none"> a) Tarif telekomunikasi b) Interkoneksi telekomunikasi 5) Kelayakan sistem telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> a) Pelayanan sistem jaringan dan jasa b) Penerapan teknologi telekpmunikasi C) Penyiaran <ul style="list-style-type: none"> 1) Pemetaan dan database <ul style="list-style-type: none"> a) Pemetaan penyelenggaraan radio dan televisi b) Database penyelenggaraan radio dan televisi 2) Verifikasi dan uji coba siaran <ul style="list-style-type: none"> a) Verifikasi dan uji coba siaran radio b) Verifikasi penyelenggaraan radio dan Televisi 3) Radio <ul style="list-style-type: none"> a) Lembaga penyiaran komunitas dan lembaga penyiaran radio b) Lembaga penyiaran stwasra radio 4) Televisi 	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p>	<p>DISKOMINFO 1</p> <p>DISKOMINFO</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		a) Lembaga penyiaran komunitas, lembaga penyiaran berlangganan b) Lembaga penyiaran swasta televisi 5) Iklim usaha penyiaran a) Penyusunan dan evaluasi regulasi penyiaran b) Penerapan kewajiban lembaga penyiaran D) Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal 1) Telekomunikasi khusus, penyiaran publik dan kewajiban universal a) Analisa penyelenggaraan b) Pelayanan 2) Telekomunikasi khusus Non Pemerintah a) Analisa penyelenggaraan b) Pelayanan 3) Layanan khusus penyiaran a) Publik radio b) Publik televisi 4) Pelayanan kewajiban universal a) Perencanaan pembangunan b) Monitoring dan evaluasi 5) Pengembangan infrastruktur a) Perencanaan infra struktur b) Analisa ekonomis infastruktur E) Pengendalian Pos dan Informasi 1) Monitoring dan evaluasi Pos a) Monitoring b) Evaluasi 2) Monitoring dan evaluasi jaringan dan telekomunikasi a) Monitoring b) Evaluasi 3) Monitoring dan evaluasi jasa telekomunikasi a) Monitoring b) Evaluasi 4) Monitoring dan evaluasi penyiaran a) Monitoring b) Evaluasi 5) Pencegahan dan penertiban a) Pencegahan b) Penertiban 4. Aplikasi Informatika A) e-Government	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO
			Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO
			Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang	DISKOMINFO

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		1) Tata kelola e-Government a) Program e-Government b) Evaluasi e-Government 2) Teknologi dan infastruktur e-Government a) Teknologi e-Government a) Infastruktur e-Government 3) Interoperabilitas dan interkoneksi-tas e-Government a) Interoperabilitas e-Government b) Interkoneksi-tas e-Government 4) Aplikasi layanan pemerintahan a)Aplikasi layanan pemerintahan pusat b) Aplikasi layanan pemerintahan daerah 5) Aplikasi layanan publik a) Inisiasi aplikasi layanan publik b) Fasilitas aplikasi layanan publik B) e-Businnes 1) Tata kelola e-Businnes a) Program e-Businnes b) Evaluasi e-Businnes 2) Teknologi dan infastruktur e-Businnes a) Teknologi e-Businnes b) Infrastruktur e-Businnes 3) Interoperabilitas dan interkoneksi-tas e-Businnes a) Interoperabilitas e-Businnes b) Interkoneksi-tas e-Businnes 4) Aplikasi layanan e-Businnes a) Bidang usaha dan mikro b) Bidang usaha menengah dan besar C) Pemberdayaan Informatika 1) Pemberdayaan informatika masyarakat perkotaan a) Perancangan model b) Penerapan model 2) Pemberdayaan informatika masyarakat pedesaan a) Pengembangan model b) Penerapan model 3) Pemberdayaan informatika masyarakat perbatasan dan pulau a) Pengembangan model b) Penerapan model 4) Pemberdayaan informatika masyarakat khusus a) Pengembangan model	Biasa/Terbuka	Eselon IV	mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	
			Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO
			Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b) Penerapan model D) Pemberdayaa Industri Informatika 1) Industri infrastruktur dan layanan aplikasi informatika a) Pemberdayaan b) Promosi 2) Industri perangkat informatika pengguna a) Pemberdayaan b) Pengembangan produk 3) Industri perangkat lunak a) Pemberdayaan b) Pengembangan produk 4) Industri konten multimedia a) Pemberdayaan b) Pengembangan produk E) Keamanan Informasi 1) Tatakelola keamanan informasi a) Kelembagaan b) Manajemen risiko 2) Teknologi keamanan informasi a) Infra Struktur b) Aplikasi 3) Monitoring evaluasi dan tanggapan darurat keamanan informasi a) Infra Struktur b) Aplikasi 4) Penyelidikan dan penindakan a) Monitoring dan evaluasi keamanan informasi b) Tanggap darurat peristiwa keamanan informasi 5) Budaya keamanan informasi a) Penyidikan b) Penindakan 5. Informasi Dan Komunikasi Publik A) Komunikasi Publik 1) Komunikasi publik a) Program komunikasi publik b) Monitoring dan evaluasi 2) Pengelolaan opini publik a) Pengumpulan opini publik b) Pengolahan opini publik 3) Layanan komunikasi publik a) Pengumpulan data	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO
			Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO
			Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> b) Pengolahan data B) Pengolahan dan Penyediaan Informasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Informasi layanan hukum dan keamanan <ul style="list-style-type: none"> a) Politik dan keamanan b) Hukum dan hak asasi manusia 2) Informasi perekonomian <ul style="list-style-type: none"> a) Keuangan, perbankan dan jasa b) Industri dan perdagangan 3) Informasi kesejahteraan rakyat <ul style="list-style-type: none"> a) Agama, sosial dan budaya b) Pendidikan kesehatan dan lingkungan hidup C) Pengelolaan Media Publik <ul style="list-style-type: none"> 1) Media cetak 2) Media online 3) Media luar ruang dan audio visual D) Kemitraan Komunikasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Kemitraan komunikasi <ul style="list-style-type: none"> a) Program kemitraan pemerintahan dan lembaga negara b) Monitoring dan evaluasi 2) Kemitraan media dan dunia usaha <ul style="list-style-type: none"> a) Program kemitraan media dan dunia usaha b) Monitoring dan evaluasi 3) Kemitraan organisasi kemasyarakatan dan profesi <ul style="list-style-type: none"> a) Program kemitraan organisasi kemasyarakatan dan profesi b) Monitoring dan evaluasi E) Layanan Informasi Internasional <ul style="list-style-type: none"> 1) Layanan informasi media asing <ul style="list-style-type: none"> a) Program layanan informasi media asing b) Monitoring dan evaluasi 2) Layanan informasi perwakilan negara asing dan lembaga <ul style="list-style-type: none"> a) Program layanan informasi perwakilan negara asing dan lembaga b) Monitoring dan evaluasi layanan informasi 3) Layanan informasi masyarakat luar negeri <ul style="list-style-type: none"> a) Program layanan informasi b) Monitoring dan evaluasi layanan informasi 6. Pusat Data Dan Sarana Informatika <ul style="list-style-type: none"> A) Infrastruktur Informatika <ul style="list-style-type: none"> 1) Jaringan <ul style="list-style-type: none"> a) Login administrator website/kode akses elektronik b) Setting konfigurasi network 	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Terbatas</p>	<p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon III</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu</p>	<p>DISKOMINFO</p> <p>DISKOMINFO</p> <p>DISKOMINFO</p> <p>DISKOMINFO</p> <p>DISKOMINFO</p> <p>DISKOMINFO</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		c) Segment network d) Security network e) Management bandwidth f) Lokasi server g) Internet protocol/IP address private 2) Piranti teknologi informatika 3) Keamanan informasi B) Sistem dan Data 1) Portal dan konten 2) Pengumpulan dan pengolahan data a) Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi) b) Data administrasi radio dan TV c) Sistem manajemen database 3) Pengembangan aplikasi C) Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat 1) Pelayanan informasi a) Media baru b) Media konvensional c) Dokumentasi dan perpustakaan 2) Hubungan masyarakat a) Publikasi b) Analisis berita dan pengelolaan opini publik c) Hubungan dan eksternal 3) Bimbingan teknis Bimbingan sumberdaya perangkat Pos dan Informatika, penyelenggaraan Pos dan Informasi dan komunikasi publik, data dan sarana informasi dan humas 4) Evaluasi	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon III Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO DISKOMINFO DISKOMINFO DISKOMINFO DISKOMINFO

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Evaluasi sumber daya dan perangkat Pos dan Informatika, penyelenggaraan Pos dan Informasi aplikasi dan komunikasi publik, data dan sarana informatika, informasi dan humas				
		K. PERSANDIAN				
		1. Kebijakan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO
		A) Kebijakan: pembinaan dan pengendalian persandian, pengamanan persandian				
		1) Pengkajian dan pengusulan kebijakan				
		2) Penyiapan kebijakan				
		3) Perumusan kebijakan				
		4) Masukan dan dukungan kebijakan				
		5) Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)				
		2. Pembinaan Dan Pengendalian Persandian				
		A) Pembinaan dan pengendalian sumber daya manusia, materiil dan				
		1) SDM	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO
		a) Data personel Sandi				
		b) Pembinaan Personel Sandi				
		c) Pengawasan dan Pengendalian				
		2) Materiil dan Jaring Komunikasi Sandi				
		a) Data Materiil dan JKS	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO
		b) Analisa Kebutuhan Materiil dan Jaringan Komunikasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
		Sandi				
		c) Perangkat Khusus Persandian	Terbatas	Eselon III		
		d) Data Spesifikasi Sarana Komunikasi Sandi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO
		e) Perangkat Keras Persandian/Mesin Sandi	Terbatas	Eselon III		
		f) Perangkat Lunak Sandi	Terbatas	Eselon III		
		3) Akreditasi dan Sertifikasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO
		a) Akreditasi Diklat				
		b) Sertifikasi Alat				
		3. Pengamanan Persandian				
		A) Pengamanan sinyal: teknik sandi dan krypto	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	DISKOMINFO

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		1) Pelaksanaan (Perencanaan Dan Administrasi) 2) Pelaporan B) Analisis sinyal: teknik sandi dan kriptografi 1) Pelaksanaan (Perencanaan Dan Administrasi) 2) Pelaporan C) Meteriil sandi: sistem dan peralatan 1) Pelaksanaan (Perencanaan Dan Administrasi) 2) Kunci Sistem Sandi 3) Data Penempatan Jaringan, Peralatan Sandi, dan Tempat Kegiatan Sandi 4) Pelaporan 4. Pengkajian Persandian : Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi A) Perencanaan Pengkajian B) Administrasi Pengkajian C) Pelaksanaan D) Pelaporan L PENGAWASAN 1. Rencana Pengawasan a. Rencana strategis pengawasan b. Rencana kerja tahunan c. Rencana kinerja tahunan d. Penetapan kinerja tahunan e. Rakor pengawasan tingkat Provinsi 2. Pelaksanaan Pengawasan a. Laporan hasil audit (LHA), Laporan hasil pemeriksaan (LHP),Laporan	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas Terbatas Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas Terbatas	Eselon IV Eselon IV Eselon III Eselon III Eselon IV Eselon IV Eselon III Eselon III	mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan	DISKOMINFO DISKOMINFO DISKOMINFO DISKOMINFO DISKOMINFO DISKOMINFO Inspektorat Inspektorat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<p>Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI), yang memerlukan tindak lanjut (TL)</p> <p>b. Laporan hasil audit (LHA),Laporan hasil pemeriksaan (LHP),Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO),Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Laporan Akuntan (LA),Laporan Auditor Independen (LAI),yang tidak</p> <p>c. Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut</p> <p>d. Laporan perkembangan penanganan surat pengaduan masyarakat</p> <p>e. Laporan Pemutakhiran Data</p> <p>f. Laporan Perkembangan Barang Milik Negara</p> <p>g. Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan <i>Review</i> Pemerintah Prov. Kalsel</p> <p>h. Good Corporate Governance (GCG)</p>			tugas Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	

BUPATI TANAH BUMBU

ttd.

H. SUDIAN NOOR